PERANAN WANITA INDONESIA DI MASA PERANG KEMERDEKAAN 1945 – 1950

Oleh :

1. Nana Nurliana
2. MPB. Manus
3. GA. Manilet Ohorella
4. Ratnawati A.
5. Tri Wahyuning M. Irsyam

irektorat
dayaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1986

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

PERANAN WANITA INDONESIA DI MASA PERANG KEMERDEKAAN 1945 – 1950

Oleh :

1. Nana Nurliana
2. MPB. Manus
3. GA. Manilet Ohorella
4. Ratnawati A.
5. Tri Wahyuning M. Irsyam

301.412
nur
p

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SERJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1986

PERPUSTAKAAN
Institut Pertanian Bogor
Dipindai dan Dimasukkan
Ke Perpustakaan Digital Institut Pertanian Bogor
NO INDUK 3396
T G L 30 Januari 1990

Perpustakaan
Direktorat Perlindungan dan
Pembinaan Peninggalan
Sejarah dan Purbakala

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat menambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Oktober 1986.

Direktur Jenderal Kebudayaan,

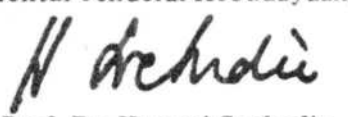

Prof. Dr. Haryati Soebadio.

NIP. 130119123.

DAFTAR ISI

			Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYA AN			iii
DAFTAR ISI			vii
BAB.	I	PENDAHULUAN	1
	II.	PERANAN WANITA DI MASA HINDIA BELANDA DAN JEPANG	6
		A. ACEH	12
		B. SULAWESI UTARA	16
		C. SULAWESI SELATAN	25
		D. B A L I	31
		E. MALUKU	39
	III.	PERANAN WANITA DI MASA PERANG KEMERDEKAAN	50
		A. ACEH	54
		B. SULAWESI UTARA	63
		C. SULAWESI SELATAN	75

D. BALI 95
E. MALUKU 101
IV. PENUTUP 121
DAFTAR KEPUSTAKAAN 126
LAMPIRAN 132

BAB I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan judul yang akan disajikan dalam penulisan ini memang tidak dapat disangkal bahwa keikutsertaan kaum wanita dalam setiap aspek kehidupan manusia di dunia ini tidak dapat diabaikan. Di samping sebagai ibu dan isteri yang merupakan peran kodrati wanita di manapun juga, dalam keadaannya yang sekarang, kehidupan kaum wanita juga semakin berkembang di segala bidang sehingga kegiatannya pun sejalan dengan tuntutan zaman, baik dari masyarakatnya maupun dari lingkungan di sekitarnya. Keikutsertaan kaum wanita Indonesia di masa Perang Kemerdekaan, bahkan jauh sebelum itu setidak-tidaknya membawa perubahan yang tidak sedikit dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Di samping itu bahwa penulisan ini dimaksudkan sebagai kelanjutan dari kajian yang telah dilakukan pada tahun yang lalu atas lima propinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta Jawa Timur.

Demikianlah dalam pembangunan dan perjuangan bangsa Indonesia terutama pada masa-masa revolusi pisik, seluruh lapisan masyarakat pada umumnya ikut serta bahu-membahu bersama pemuda patriot dan jelas pada waktu itu kaum wanita

Indonesia pun turut bahkan terjun dan terlibat bersama-sama para pejuang lainnya, mengabdikan seluruh hidupnya untuk kepentingan rakyat dan bangsa yang dicintainya. Bahkan diakui tanpa keikutsertaan wanita, perjuangan mungkin tidak akan berhasil dengan baik. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa dalam peperangan misalnya, kaum wanita mau tidak mau sering harus turut terlibat oleh karena keadaan yang memaksa. Atas dasar itu maka situasi dan kondisi suatu tempat ataupun waktu, banyak berpengaruh dan menentukan peranan kaum wanita.

Melihat keadaan yang demikian, kita dapat menunjukkan adanya norma yang cukup kuat yang dimiliki kaum wanita bahwa sebagai isteri/ibu atau ibu rumahtangga, mereka secara tidak langsung terlibat pula dalam pekerjaan di bidang-bidang lainnya, seperti misalnya mengurus keuangan, menjadi penghubung, bahkan mencari senjata pun dilakukannya. Sedang yang umum dilakukan adalah mengatur perbekalan dan logistik dalam dapur umum, tugas kepalangmerahan yaitu merawat dan mengobati pejuang serta rakyat yang memerlukannya.

Perlu diperhatikan di sini bahwa dengan mempunyai dua peranan itu, kaum wanita Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan rumahtangganya, maupun dalam kehidupannya di masyarakat luas. Dengan peranan ganda ini maka segala usaha untuk meningkatkan kedudukan wanita, berarti pula bahwa usaha itu meningkatkan kemajuan generasi mendatang.

Peranan dan kegiatan wanita Indonesia yang setiap waktu ditantang oleh tuntutan masyarakat dan zamannya, dapat kita lihat di masa perang kemerdekaan tahun 1945–1950, wanita Indonesia baik di Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara maupun di Bali dan Maluku terlihat aktif bahu-membahu dengan kaum pria bersama-sama melawan, mengangkat senjata dan menghadapi setiap ancaman dari kaum penjajah bangsa asing mana pun yang hendak kembali berkuasa di tanah air Indonesia. Terlihat bahwa perjuangan dari segenap golongan yang ada di dalam masyarakat, sadar akan bahaya yang mengancam kemer-

dekaan Indonesia yang baru saja diproklamirkan oleh Sukarno-Hatta. Oleh karena itu dengan semangat kemerdekaan yang tidak mungkin dapat dimatikan, seluruh rakyat Indonesia dengan segenap jiwa dan raganya mengadakan aksi untuk mempertahankan kemerdekaan itu.

Di sinilah kaum wanita Indonesia membuktikan diri dan memberikan andil yang cukup besar dan berarti bagi perjuangan bangsa. Peranan yang dilakukan meliputi segala aspek kegiatan sejauh kemampuan dan ketrampilan yang dimilikinya. Agak sulit memang untuk menerima kenyataan itu apabila kita melihat adanya ketentuan-ketentuan adat, hukum dan peraturan-peraturan agama yang ketat, seperti terlihat di dalam masyarakat Aceh dan Sulawesi Selatan, kaum wanita mempunyai ruang gerak yang sangat terbatas. Namun karena kondisi mengharuskan wanita di daerah itu ke luar dari lingkungan dan turut terlibat dalam perjuangan dunia moderen yang pada umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki, maka terlihatlah keberanian kaum wanita dalam bertindak. Apabila di Aceh, kaum wanita berjuang atas dasar "Sabilu'llah" (jalan Allah) dengan menolak setiap kompromi; maka di daerah-daerah lain dalam menghadapi kaum penjajah, mereka mengobarkan semangat, bila perlu memimpin perjuangan dan berani menghadapi maut.

Demikianlah dalam kerangka penulisan Peranan Wanita Indonesia di masa Perang Kemerdekaan tahun 1945–1950, kali ini uraian terbatas pada peranan wanita di Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali dan Maluku. Sesuai dengan judul penulisan maka akan diuraikan secara umum Indonesia di masa pendudukan Hindia Belanda dan Jepang. Kemudian Indonesia di masa Perang Kemerdekaan, khususnya hal-hal yang melatarbelakangi kehidupan kaum wanita Indonesia, sehingga ia dapat tampil dan berperan membantu kaum pria membela dan mempertahankan kemerdekaan negaranya, Memang, bila diukur dengan keadaan sekarang orang akan mengatakan tidak ada artinya apa-apa. Akan tetapi untuk kondisi waktu itu, hal-hal seperti: mengajar dalam rangka usaha mencerdaskan bangsa;

memberi pengetahuan tambahan dan ketrampilan di bidang ke Palangmerahan, dapur umum, kepanduan, semuanya itu banyak membantu menanamkan rasa disiplin, melatih kemampuan sikap dan watak serta perkembangan pisik dan semangat kebangsaan. Wanita Indonesia di masa perang kemerdekaan pada umumnya sebagian dari hidupnya diabdikan untuk kepentingan bangsanya. Seperti di Aceh, Tengku Haji Ainal Mardhiah Ali dan Rohana Hasyim melakukan dakwah dan penerangan ke desa-desa, di samping memberikan pengajaran dan latihan tentang PPPK. Kemudian Cut Mariam dan Cut Misran aktif dalam lasykar Putri PESINDO. Di Sulawesi Utara nama-nama Zus Kandou, Nani Wartabone memperlihatkan bahwa kaum wanita memperoleh pengakuan di dalam geraknya. Begitu juga di Sulawesi Selatan, nama Andi Ninnong, Opu Daeng Risaju, Ibu Depu menghiasi sejarah Sulawesi Selatan dalam menentang kaum penjajah asing. Keikutsertaan kaum wanita Bali terutama pada bidang Palang Merah, mereka itu antara lain: I Gusti Ngurah Raka, Desak Made Raka, Ni Wayan Gatri, Gusti Nyoman Alit dan semua kelompok Palang Merah ini langsung di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai. Sedang di Maluku, kegiatan kaum wanita yang cukup terkenal adalah mereka yang tergabung di dalam Ina Tuni. Segala apa yang pernah dialaminya, suka duka, ke luar masuk penjara, dikejar-kejar musuh, harus berpisah dengan keluarga, hidup melarat, bahkan ada pula di antara mereka yang mengalami siksaan pisik dalam tahanan. benar-benar telah merupakan ramuan yang tak dapat dihindari. Berbagai macam penderitaan yang mereka alami, justru merupakan pupuk bagi diri wanita dalam membajakan semangat pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

Demikianlah beberapa hal yang menyebabkan wanita Indonesia sadar dan dengan tekad rela berkorban, mereka menggabungkan diri ke kesatuan gerilya. Meskipun di antara mereka ada yang sama sekali belum pernah berhadapan langsung dengan musuh, namun mereka percaya masih ada kemampuan dan ketrampilan lain yang dapat disumbangkan untuk membantu para

gerilyawan. Sebagai kurir, pengantar makanan ke garis depan, tugas palang merah, memberikan penerangan kepada masyarakat, menangani dapur umum, mencari dan mengumpulkan dana, sampai kepada tugas menjaga beberapa tempat penting di kota-kota, ternyata kaum wanita berhasil melakukannya. Dari kenyataan ini maka hakikat yang dapat kita ambil bahwa pejuang tidak akan berhenti berjuang sebelum cita-citanya terwujud.

BAB II. PERANAN WANITA DI MASA HINDIA BELANDA DAN JEPANG

Kaum wanita, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, sering mempunyai peranan yang menentukan. Dalam kehidupan sehari-hari tugas-tugas yang dilakukan kaum wanita merupakan bagian yang penting, namun sering tidak kelihatan. Baik di lingkungan rumah tangga maupun di dalam masyarakat kegiatan wanita dianggap sudah sewajarnya saja. Bila wanita melakukan kegiatan yang lain dari yang biasa dilakukannya, maka hal itu dianggap tidak wajar. Misalnya yang dilakukan oleh R.A. Kartini dan Dewi Sartika untuk memajukan kepandaian wanita dengan memberi pendidikan khusus, pada masanya dianggap sebagai tindakan yang luar biasa. Pada hal yang dilakukan hanyalah usaha memberi bekal kehidupan yang lebih baik kepada kaum wanita yang akan menjadi Ibu atau calon Ibu. Atas dasar timbulnya kesadaran tentang pentingnya peranan wanita dalam kehidupan masyarakat, maka kedua tokoh pergerakan wanita tersebut di atas dan tokoh-tokoh lain yang mengikutinya terus giat bekerja untuk mewujudkan cita-citanya.

Seperti dikatakan oleh seorang tokoh pergerakan kebangsaan Indonesia bahwa perjuangan wanita di Indonesia tidak da-

pat atau sulit dipisahkan dari kehidupan politik nasional. Oleh karena itu dianjurkan agar kaum wanita Indonesia mengajukan pertanyaan pada dirinya sendiri tentang kedudukan apa yang harus dipegangnya dalam kebangkitan nasional dan bahwa pembangunan persatuan nasional harus menjadi pedomannya.[1] Jadi dari pandangan tokoh tersebut kita mendapat gambaran bagaimana sebenarnya peranan kaum wanita dalam masyarakat Indonesia yang sedang berjuang. Sedikit berbeda dengan keadaan di masyarakat Barat dimana perjuangan kaum wanita terutama ditujukan pada usaha memperoleh hak-hak yang sama dengan pria.[2]

Oleh karena itu sejak akhir abad-19 sampai awal abad-20 dan terus ke masa Jepang dan Perang Kemerdekaan pada pertengahan abad ini, kesadaran kaum wanita akan peranan yang dipegangnya dalam masyarakat terus meningkat. Selain R.A. Kartini dan Dewi Sartika, sejarah Indonesia juga mengenal tokoh-tokoh lain seperti Nyai Achmad Dahlan, Maria Walanda Maramis, Suwarni Djojoseputro, Rangkayo Rasuna Said, Ny. Suyatin Kartowiyono, Ny. Mr. Maria Ulfah, Susilowati, dan lain-lainnya.

Pada mulanya perhatian kaum wanita terutama hanya tertuju pada bidang pendidikan. Hal ini didasari oleh kesadaran bahwa pendidikan dapat membawa pengaruh yang besar pada kemajuan. Oleh karena itu bukanlah tanpa sebab bila tokoh-tokoh wanita yang terkemuka dalam masyarakat Indonesia pada mulanya bergerak dibidang pendidikan. Rohanna Kudus dan Rahma El Yunusiyah merupakan tokoh wanita di Sumatra Barat yang giat memajukan pendidikan seperti Maria Walanda Maramis di Sulawesi Utara.

Demikian pula halnya, organisasi-organisasi wanita yang pertama-tama dibentuk, kegiatannya terutama dalam usaha bagaimana meningkatkan kepandaian wanita, sehingga peranannya pun akan semakin besar. Organisasi Putri Mardika (tahun 1912, Jakarta), Putri Budi Sejati (Surabaya), Keutamaan Istri (Jawa Barat), Sarekat Kaum Ibu Sumatra (Bukit Tinggi) dan

Pikat (Minahasa) merupakan beberapa contoh organisasi wanita yang bergerak di bidang pendidikan untuk wanita.

Kemudian, sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan bertambahnya pengetahuan, kegiatan dan aspirasi kaum wanita pun semakin meningkat. Ruang lingkupnya semakin luas dan jumlah peminat serta peserta dalam organisasi-organisasi kaum wanita semakin besar. Kaum wanita pun banyak memasuki organisasi-organisasi lain yang tidak khusus bagi wanita, seperti Budi Utomo, PNI, PKI, Perhimpunan Indonesia dan lain-lainnya.

Ketika pada tanggal 28 Oktober 1928 dilangsungkan Kongres Pemuda yang menghasilkan ikrar persatuan Sumpah Pemuda, tidak sedikit kaum wanita yang hadir dan berperan serta. Cakrawala perhatian wanita semakin berkembang pula sejalan dengan perkembangan masyarakat. Perhatian terhadap politik semakin nampak terutama dalam hal pembinaan kesatuan nasional demi mencapai cita-cita nasional yaitu kemerdekaan.

Pada tanggal 22 – 26 Desember 1928 di Yogyakarta diselenggarakan Kongres Wanita I yang dihadiri oleh banyak organisasi atau perkumpulan wanita yang ada pada masa itu. Walaupun pokok perhatian masih berkisar pada masalah pendidikan dan hak-haknya dalam lingkup rumah tangga, semangat persatuan yang tumbuh telah menandai peningkatan kesadaran wanita sebagai warga masyarakat. Oleh karena itu maka tanggal 22 Desember kemudian diputuskan dan diakui sebagai "Hari Ibu", yaitu hari yang menandai lahirnya kesadaran wanita Indonesia sebagai warga masyarakat. Walaupun demikian, bukanlah berarti bahwa proses perjuangannya telah mencapai tujuan. Jalan yang harus ditempuh masih panjang.

Pada masa akhir kekuasaan Hindia Belanda, pergerakan wanita Indonesia sudah mencapai tahap kematangan, yaitu tumbuhnya kesadaran penuh bahwa dirinya adalah warga masyarakat yang tak ada bedanya dengan pria dalam hak-hak dan kewajiban. Hanya kodrat alamiah saja yang membedakannya,

terutama dalam peranan-peranan khusus yang ada. Misalnya wanita ditakdirkan menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya. Sikap kematangan diri wanita ini tercermin dalam Kongres Wanita III yang diadakan di Bandung pada tahun 1938. Dalam kongres itu dibahas antara lain masalah hak wanita untuk memilih dan dipilih dalam dewan-dewan perwakilan, sejalan dengan diangkatnya beberapa orang wanita untuk duduk dalam dewan-dewan lokal. Dalam kongres ini disepakati bahwa kaum wanita Indonesia agar diberi hak memilih dan dipilih yang seluas-luasnya, sama seperti hak yang dipunyai oleh kaum laki-laki. Sikap ini menjadi semakin jelas terungkap dalam kongres Wanita IV di Semarang pada tahun 1942 dimana Kongres memutuskan antara lain mendukung tuntutan GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yaitu agar diberikan hak otonomi kepada rakyat Indonesia.

Memasuki masa pendudukan Jepang, kematangan sikap dan peningkatan kesadaran kaum wanita akan kedudukannya dalam masyarakat mendapat tanggapan yang lebih kongkrit. Dalam usahanya untuk memenangkan peperangan melawan Sekutu, pasukan pendudukan Jepang telah menghimpun bala bantuan dari kalangan penduduk.

Tanpa kecualinya, segenap elemen dalam masyarakat yang potensial dikerahkan. Mobilisasi massa dijalankan dimana-mana untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan. Dalam hal ini tidak terkecuali bagi wanita. Dengan pengalaman ini, kaum wanita semakin digiatkan dan disadarkan tentang apa kedudukan dan bagaimana peranannya dalam kehidupan. Tugas mereka bukan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga saja, akan tetapi juga memikul tanggungjawab tugas-tugas kemasyarakatan.

Tidak lama setelah Jepang menanamkan kekuasaannya di Indonesia, mereka mulai mengatur kehidupan masyarakat. Semua perkumpulan-perkumpulan atau organisasi yang berdiri pada masa Hindia Belanda, dilarang. Sebagai gantinya dibentuk organisasi-organisasi yang kegiatannya ditujukan pada usaha

demi memenangkan perang Asia Timur Raya. Bila kaum pria dikerahkan dalam gerakan Tiga A, maka kaum wanita digabung dalam Gerakan Istri Tiga A dan Barisan Putri Asia Raya. Tugasnya terutama mengumpulkan segala perbekalan yang dibutuhkan oleh Pemerintah dalam menghadapi Sekutu, seperti makanan dan pakaian. Dalam gerakan inilah untuk pertama kali kaum wanita Indonesia diikut sertakan dalam pemerintahan Jepang.

Karena kegiatan peperangan semakin besar dan kebutuhan perlengkapan semakin meningkat, Pemerintah Pendudukan Jepang merasa perlu lebih menggiatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu maka pada bulan Maret 1943 dibentuk suatu himpunan baru yang disebut Poetera (Pusat Tenaga Rakyat). Gerakan Tiga A yang dianggap kurang berhasil, dibubarkan. Bagian putri dan Poetera disebut Barisan Pekerja Perempuan Poetera. Tugasnya bukan hanya sekedar mengumpulkan pangan dan sandang, akan tetapi juga meningkatkan semangat dan kepandaian dengan membuka bermacam-macam kursus.

Kemudian untuk menampung kegiatan kaum wanita dalam memperkuat garis belakang dan garis depan, dibentuklah *Fujinkai.* Pimpinannya adalah para istri pejabat pemerintahan dan pamongpraja mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa. Mereka berkewajiban untuk menggerakkan tenaga wanita dilingkungan masing-masing.

Banyak dari mereka itu yang belum pernah berorganisasi, apalagi duduk dalam suatu jabatan pimpinan. Akan tetapi mereka dipaksa menjalankan tugas itu, sehingga mau tidak mau merupakan suatu pengalaman baru yang berharga. Mereka terpaksa menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan masyarakat.

Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan dan pertahanan bagi pemerintah pendudukan Jepang. Oleh karena keadaan medan pertempuran semakin menghebat, sedangkan Sekutu semakin mendesak, penguasa Jepang kemudian membentuk

Djawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa). Maksud dan tujuannya adalah untuk menghimpun semua potensi dari seluruh lapisan masyarakat untuk memenangkan peperangan. Salah satu landasan keyakinannya adalah menanamkan semangat rela berkorban dan melupakan kepentingan sendiri.

Terhadap kaum wanita juga ditanamkan semangat dan keyakinan ini. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Fujinkai di antaranya adalah.[3] :

1. mengorbankan semangat cinta tanah air dan bangsa,
2. menganjurkan agar suka berkorban dan rela menderita demi tanah air dan bangsa,
3. mempersiapkan tenaga bagi pertahanan di garis belakang,
4. memperbanyak produksi bahan makanan dan pakaian.

Untuk lebih meningkatkan peran serta wanita dalam Perang Asia Timur Raya, penguasa Jepang kemudian membentuk Barisan Srikandi yang merupakan bagian dari *Fujinkai.* Barisan ini terutama dimaksud untuk diterjunkan di medan perang. Oleh karena itu selain dilatih dalam hal kepalang merahan, seperti perawatan para korban perang, juga diberi latihan kemiliteran, termasuk menggunakan senjata. Pembentukan Barisan Srikandi ini juga sejalan dengan semakin terdesaknya kedudukan Jepang di medan perang. Satu demi satu pertahanannya di Samudra Pasifik jatuh ke tangan Sekutu. Garis pertahanan Jepang semakin mendekati kepulauan Jepang. Ditambah lagi persediaan logistik pun semakin menipis. Dengan demikian saat kejatuhan kekuasaan Jepang sudah diambang pintu.

Walaupun berat penderitaan yang harus ditanggung oleh orang Indonesia, masa pendudukan Jepang telah memberi pengalaman tersendiri kepada rakyat Indonesia, khususnya kaum wanitanya. Untuk pertama kali seluruh wanita, tanpa memandang tingkat kedudukan dalam masyarakat ataupun latar belakang pendidikan, diikutsertakan di dalam kegiatan kema-

syarakatan. Tujuannya terutama adalah untuk menunjang peperangan yang sedang berkecamuk. Selain diwajibkan menyediakan sandang dan pangan, kaum wanita juga disadarkan akan kewajibannya untuk membela tanah air. Bahkan mereka diharuskan bahu membahu dengan kaum pria menjalankan perintah yang diberikan tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada. Kaum wanita semakin sadar bahwa dunianya bukanlah hanya ke empat dinding rumahnya. Masyarakat luas selalu menanti uluran tangannya. Dimensi peranan wanita semakin luas dan terbuka. Kesadaran ini yang sangat membantu dalam perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya.

A. ACEH.

Kegagahan dan keberanian wanita Aceh dalam menghadapi kolonialis Belanda telah terkenal sejak dulu kala. Kegagahan tersebut diungkapkan oleh Zentgraaff sebagai berikut: "bahwa tidak ada satu bangsa yang begitu bersemangat dan fanatik dalam menghadapi musuh selain bangsa Aceh dengan wanita-wanitanya yang jauh lebih unggul daripada semua bangsa lain dalam keberanian menghadapi maut".[4]

Dalam mempertahankan sesuatu pendirian yang merupakan kepentingan nasional dan agama, para wanita Aceh baik di belakang layar maupun secara terang-terangan telah memimpin perlawanan yang tidak kalah unggulnya dengan kaum pria. Mereka berjuang atas dasar *sabilu'llah* (jalan Allah), menolak setiap kompromi, tidak akan mengkhianati wataknya sebagai seorang wanita dan hanya mengenal alternatif *membunuh* atau *dibunuh.*

Zentgraaff mengungkapkan lebih lanjut bagaimana kegigihan dan ketabahan mereka dalam menghadapi pertempuran. Istri Teungku Mahyidin di Tiro misalnya, pada pertempuran tahun 1910 ia dapat ditawan oleh Belanda dalam keadaan luka parah. Bagaimana pun sakitnya ia tidak mengerang atau menge-

luh. Bahkan ketika seorang opsir Belanda, Schmidt mendekatinya dengan membawa air minum dan menanyakan apakah lukanya mau dibalut dalam bahasa Aceh, ia membuang muka dan berkata: *bek kamet kee kaphe budok!* (jangan kau pegang aku, kafir kusta).[5] Ia lebih menyukai kematian daripada hidup di tangan seorang *kaphe:* seekor anjing kafir.

Wanita-wanita seperti ini banyak sekali jumlahnya, dan keberanian mereka turut menimbulkan kekaguman pada pasukan-pasukan Belanda. Dalam sejarah Aceh dikenal *grandes dames* (wanita-wanita Agung) yang telah memainkan peranan besar dalam politik dan peperangan atau pun sebagai ratu atau istri seorang uleebalang yang berpengaruh. Di antara mereka, tercatat nama-nama seperti Cut Meutia, Cut Nyak Dien, Pocut di Rambong, Pocut Baren, Pocut Asiah Keureutoe yang bergelar raja inong (raja wanita), ia adalah penguasa daerah Keureutoe, Teungku Fakinah dan lain sebagainya.

Teungku Fakinah, tidak saja terkenal sebagai Panglima Perang, tetapi juga sebagai ulama besar dan sebagai pendidik Islam yang semenjak sebelum perang telah membangun *dayah* (pesantren) dan setelah selesai perang melanjutkan kembali pembangunan dayahnya. Di jaman perang ia tampil sebagai Panglima yang ditakuti dan disegani musuh dan setelah kembali dari medan perang ia menjadi ulama dan pendidik Islam yang bekerja keras untuk membangun kembali Pendidikan Islam yang telah porak poranda selama berkecamuknya perang.

Fakinah bersuamikan seorang ulama muda yang bernama Teungku Ahmad, dan kemudian mereka mengajar pada Pusat Pendidikan Islam Dayah Lam Pucok, yang dibangun oleh orang tua Fakinah.[6] Sejak Fakinah mengajar di sana, maka murid-muridnya yang belajar di dayah Lam Pucok tidak lagi hanya terdiri dari kaum pria saja melainkan juga kaum wanita. Ia mengadakan perubahan kurikulum, di mana di samping diajarkan bahasa Arab dan berbagai ilmu agama dan umum, juga diajarkan kerajinan tangan bagi pelajar puteri.

Ketika Belanda mendarat di pantai Cermin, rakyat menyambutnya dengan perlawanan mengangkat senjata, sehingga pertempuran tidak dapat dihindarkan. Fakinah segera mengadakan kampanye perang ke seluruh Aceh Besar, membangkitkan semangat jihad, terutama di kalangan wanita, berusaha mengumpulkan dana perang. Dari hasil kampanyenya tersebut, terkumpul sejumlah dana yang cukup untuk dipakai membentuk pasukan dan benteng (markas) bagi para wanita terutama para wanita yang telah meninggal dalam pertempuran (mati syahid).

Kegagalan Belanda melakukan serangan ke Aceh, mengakibatkan Sultan Alaiddin Mahmud Syah memerintahkan pembentukan pasukan-pasukan sukarela. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Fakinah untuk turut serta berpartisipasi membentuk pasukan yang dinamakan Sukey (kurang lebih sama dengan resimen), yang terdiri dari empat balang (batalyon), dan Fakinah sendiri menjadi Panglima Sukey (Komandan Resimen).

Di antara keempat balang tersebut, ada satu balang yang seluruh anggotanya terdiri dari wanita. Keempat balang yang menjadi bagian dari resimen Fakinah, masing-masing menempati satu kuta (benteng) yaitu:

a. Kuta Cot Weu, sebagai benteng dari balang wanita yang dipimpin oleh Teungku Fakinah. Benteng tersebut sekaligus menjadi markas dari Sukey Fakinah.

b. Kuta Lamsayun, sebagai benteng dari balang yang dipimpin oleh Pang Saleh (Teungku Muhammad Saleh)..

c. Kuta Cot Bakgarot, sebagai benteng dari balang yang dipimpin oleh Pang Amat (Teungku Leupeung, adik ibu Teungku Fakinah).

d. Kuta Bakbale, sebagai benteng dari balang yang dipimpin oleh Pang Abdurrahman (Habob Lhong atau Habib Kabul).

Di samping kaum pria yang menjadi penasehat dari Sukey Fakinah, terdapat juga beberapa wanita yang duduk di staf

Sukey seperti: Cutpo Fathimah Blang Preh, Nyak Raniah Lam Urit, Cutpo Habi, Cutpo Nyakcut dan Cut Puteh.

Kedudukan Belanda di Aceh sudah sangat terjepit, oleh sebab itu mereka minta bantuan tentara dari Batavia untuk mematahkan perjuangan rakyat Aceh. Benteng-benteng Sukey Fakinah di daerah Lamrak tidak luput dari serangan Belanda. Bersama pasukannya Teungku Fakinah mengundurkan diri ke Kuta Cot Ukam, kemudian ke Gleeyeung dan ke Indrapuri. Bersamaan dengan mundurnya Teungku Fakinah tersebut, Kuta Aneuk Galong dan Kuta Cot Bak-U di Montasie jatuh ke tangan Belanda. Pasukan-pasukan Aceh kemudian membuat garis pertahanan baru di Indrapuri, kemudian mundur lagi ke daerah Lamsi, Seulimeum dan akhirnya ke Lam Tamot. Karena serangan Belanda dilakukan dengan gencar maka mereka akhirnya hijrah ke daerah Pidie, dan di sana kemudian mereka membentuk garis pertahanan yang tangguh di Tiro. Ternyata Belanda pun berhasil merebut benteng pertahanan di Tiro. Teungku Fakinah bersama teman-temannya dan pasukannya pindah ke Tangse.

Di Tangse, Teungku Fakinah membangun tempat pendidikan (dayah) yang sifatnya darurat. Dalam keadaan yang sulit pun Fakinah masih menyempatkan diri untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak yang turut menyingkir bersamanya. Dari daerah Tangse, Teungku Fakinah bersama Pocut Lam Gugup, Permaisuri Sulthan, Pocut Awan dan lain-lainnya, mundur ke daerah Pase dan kemudian menyingkir ke daerah Gayo Luas untuk melanjutkan perang gerilya.

Pada tahun 1911, Teungku Fakinah turun dari daerah gerilya menuju ke kampungnya di daerah Lam Krak. Di sana ia membangun kembali dayahnya yang telah porak poranda selama terjadinya peperangan. Dalam waktu yang relatif singkat, dayah Lamdiran berkembang menjadi Pusat Pendidikan Islam yang besar dan penting bagi dunia pendidikan untuk memajukan putera-puteri Aceh.

Teungku Fakinah ternyata juga mampu untuk memimpin rakyat, untuk memperbaiki kampung-kampung, sawah-ladang, pasar-pasar yang telah hancur akibat peperangan. Bersama rakyat, ia pun membangun *ateung seunabat* (jalan) yang cukup panjang, dan sampai sekarang jalan tersebut masih dikenal dengan nama *Ateung Teungku Faki* (Jalan Teungku Faki).

Di antara murid-murid wanitanya ada juga yang mengikuti jejaknya menjadi ulama dan mengajar di dayah-dayah, seperti misalnya Teungku Fathimah Batee Linteung, Teungku Sa'idah Lamjane, Teungku Fathimah Ulee Tutue dan Teungku Hawa Lamdilip.

Dalam perjalanan sejarah Aceh selanjutnya, kegagahan srikandi-srikandi Aceh diteruskan oleh srikandi-srikandi muda dalam berbagai kesempatan. Akibat pendidikan Islam yang kuat ditanamkan pada masa yang lalu, maka mereka pun sekarang giat memasuki berbagai organisasi Islam yang ada seperti SEPIA (Serikat Pemuda Islam Aceh) yang dipimpin oleh Said Abubakar, A. Hasjmy, Thamrin Amin, A. Jalil Amin, Muhammad Ali Piyeung dan lain-lain. Dalam Konggres ke-II yang berlangsung di Montasie dari tanggal 30 Juni – 4 Juli 1939, telah mengganti nama SEPIA menjadi PERAMIINDO (Pergerakan Angkatan Muda Islam Indonesia). Dalam perkembangan selanjutnya bersama-sama dengan Kepanduan Islam mendirikan Gerakan Fajar. Seluruh anggota PERAMIINDO, baik pria maupun wanitanya ikut serta dalam Gerakan Fajar dan secara aktif melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Hindia Belanda di Aceh pada awal tahun 1942.

B. SULAWESI UTARA.

Peranan wanita dalam perjuangan kemerdekaan, khususnya di Sulawesi Utara cukup besar. Bahkan diakui bahwa tanpa keikutsertaan wanita, maka perjuangan itu mungkin tidak akan berhasil dengan baik. Hal ini sejalan dengan kenyataan yang ada bahwa kehidupan suatu masyarakat tidak dapat dilepaskan dari

peranan kaum wanita yang menjadi anggota masyarakat itu. Lebih-lebih bila dalam keadaan yang memang mendorong kaum wanita untuk terpaksa bertindak karena tidak ada pilihan lain. Dalam masa peperangan misalnya, kaum wanita mau tidak mau sering harus turut terlibat karena keadaan yang memaksa. Oleh karena itu situasi dan kondisi sesuatu tempat ataupun waktu banyak berpengaruh dan menentukan peranan kaum wanita.

Demikianlah halnya yang terjadi di Sulawesi Utara di masa perang Kemerdekaan. Keadaan pada waktu itu telah melibatkan kaum wanita untuk turut berperan aktif. Kejadian-kejadian yang berlangsung di situ pada masa itu tidak dapat dilepaskan dari keikut sertaan kaum wanita. Keadaan Sulawesi Utara pada masa antara tahun 1945–1950 tidaklah sama dengan keadaan di Jawa ataupun Sumatra, sehingga kegiatan kaum wanitanya pun berbeda pula. Lebih-lebih karena adat istiadat dan tradisi setempat besar pengaruhnya terhadap perilaku warga masyarakatnya. Untuk mengkaji tentang peranan wanita Sulawesi Utara di masa Revolusi, perlu juga diketahui tentang kehidupan, khususnya kedudukan dan peranan kaum wanita di situ, di masa-masa sebelumnya.

Wanita Sulawesi Utara, khususnya dari Minahasa mempunyai kedudukan yang baik dalam masyarakatnya. Sejak lahir, kanak-kanak, remaja dan dewasa mendapat perlakuan yang sama seperti juga kaum laki-laki. Dengan demikian dapat dimaklumi bahwa mereka itu mendapat kebebasan dalam hal bergaul, sehingga mempengaruhi perkembangan jiwanya yang bebas. Pada umumnya mereka tidak malu-malu atau serba canggung. Mereka juga berani menatap ke depan dengan pandangan yang jernih.[7]

Selain dari itu, mereka termasuk orang yang berani dan kuat serta teguh kemauannya. Bila terpaksa mereka juga dapat mengambil bagian dan berperan dalam tindakan-tindakan yang menuntut keberanian ataupun ketegasan, misalnya dalam peperangan.

Hal ini terungkap dari sebuah legende yang menceritakan tentang pertentangan yang terjadi antara orang Kenilo dan orang Tomposo ataupun cerita tentang perselisihan antara orang Tomohon dan Tondano pada tahun 1837.[8] Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa kaum wanita Sulawesi Utara, khususnya dari Minahasa, menurut adat yang berlaku mempunyai hak yang sama seperti pria, baik dalam keluarga maupun di masyarakat. Seperti yang ditulis oleh Cora Vreede-de Stuers dimana ia mengutip A.L. Woworuntu yang pada tahun 1919 menyatakannya di muka Volksraad.[9] Mereka juga mempunyai kebebasan untuk bertindak dan melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, bahkan sering diminta nasehatnya oleh kaum laki-laki dalam masalah-masalah umum.[10] Oleh karena itu, tidak perlu diragukan lagi bahwa ketika Sulawesi Utara berjuang menghadapi penjajahan Belanda, kaum wanitanya pun tidak mau berpangku tangan.

Sifat dan sikap kaum wanita Minahasa tidaklah berbeda dari saudara-saudaranya di daerah lain di Sulawesi Utara. Memang faktor agama memegang peranan penting, seperti perkembangan agama Islam di Gorontalo dan Bolaang Mongondow. Akan tetapi ternyata adat dan tradisi masih kuat pengaruhnya. Di Bolaang Mongondow misalnya, tidak sedikit anak-anak perempuan yang bersekolah di sekolah-sekolah yang dibuka oleh PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia). Kaum wanitanya juga banyak yang bergabung dalam WAPSII (Wanita PSII) yang giat di bidang pendidikan, keagamaan ataupun kegiatan kemasyarakatan lainnya.[11] Demikian juga halnya dengan kehidupan kaum wanita di Gorontalo; banyak yang aktif dalam Aisyah atau Yong Islamieten Bond (YIB). Bahkan pergi ke Jawa pun tidak dihalangi bila untuk mencari pengetahuan.[12]

Karena di Bolaang Mongondow dikenal kekuasaan raja-raja, maka dalam masyarakat terdapat golongan bangsawan. Berbeda dengan keadaan di Jawa, kaum wanita bangsawan Bolaang Mongondow tidak terlalu ketat diikat oleh adat. Mereka

masih mempunyai kebebasan untuk mencari pengetahuan di luar rumah ataupun ke luar daerah. Tidak sedikit yang mendapat kesempatan melanjutkan studinya ke Jawa.[13]

Memasuki abad ke 20 sektor pendidikan memegang peranan penting dalam mendorong kemajuan kaum wanita di Sulawesi Utara. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda yang melaksanakan politik etika yang salah satu aspeknya adalah pendidikan. Atas dorongan kaum liberal yang berkuasa di negeri Belanda pada waktu itu, pemerintah Hindia Belanda membuka lembaga-lembaga pendidikan bagi orang Indonesia. Walaupun kesempatan yang diberikan masih terbatas, jalur pendidikan ini sudah membuka jalan bagi kemajuan yang pesat untuk orang Indonesia, termasuk kaum wanitanya.

Minahasa merupakan salah sebuah daerah di Sulawesi Utara banyak mendapat perhatian dari pemerintah Hindia Belanda. Demikian juga dengan bidang pendidikan bagi rakyatnya boleh dikatakan cukup berkembang bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di luar Jawa. Tidaklah dapat disangkal bahwa daerah yang mendapat julukan Twapro (Twalfde Provincie) atau propinsi keduabelas dari Negeri Belanda ini penduduknya dapat mengecap pendidikan yang cukup; tidak terkecuali bagi kaum wanitanya.

Sebenarnya sudah sejak sebelum politik etika dijalankan, lembaga-lembaga pendidikan, terutama pendidikan dasar, telah didirikan di Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa.[14] Jumlah sekolah Rakyat yang tiga tahun lamanya pada tahun 1918 sekitar 276 buah dengan perincian sebagai berikut: yang diasuh oleh Zending berjumlah 124 buah; oleh Missi 31 buah; oleh Distrik 23 buah dan oleh Pemerintah yang disebut Sekolah Gubernemen sebanyak 38 buah. Semuanya memakai bahasa Melayu (Indonesia) sebagai bahasa pengantarnya. Setelah selesai mengikuti pendidikan sekolah dasar yang tiga tahun ini, maka seorang siswa bumi putra dapat melanjutkan pendidikannya ke

sekolah yang lebih tinggi. Namun harus melalui sekolah peralihan yang disebut *Schakel School* yang lamanya 5 tahun. Ia dapat melanjutkan pelajarannya ke *MULO* yang didirikan oleh Pemerintah tahun 1916 di Tondano dan kemudian Zending dan Misi juga mendirikannya masing-masing di Tomohon dan Manado pada tahun 1921. Selain dari itu siswa dari sekolah rakyat itu dapat juga melanjutkan ke *HIS* yang setingkat dengan *Schakel School. HIS* ini telah didirikan oleh Pemerintah di Manado pada tahun 1901, kemudian menyusul di Tondano, Langowan, Airmadidi, dan Amurang. Misi dan Zending juga diberi izin mendirikan *HIS* di Manado, Tomohon dan Tondano.

Di samping yang umum, terdapat juga sekolah-sekolah yang bersifat khusus yaitu sekolah kejuruan. Baik Pemerintah, Zending maupun Misi mendirikan sekolah guru untuk mendidik tenaga guru bagi sekolah-sekolah umum yang ada. Sekolah guru didirikan di Tondano, Tomohon dan Manado. Sekolah guru *(Kweek School)* di Tondano didirikan tahun 1865 dan di Sangir Talaud tahun 1907.[15] Sekolah guru swasta atau *particuliere kweekschool* terdapat di Ulu, Tomohon dan Tanawangko serta yang bersubsidi di Woloan yang didirikan tahun 1920.[16] Selain sekolah guru, juga didirikan sekolah-sekolah pendidikan khusus untuk pegawai pemerintah yaitu *OSVIA* di Tondano dengan masa studi lima tahun. Kemudian sekolah pertukangan atau teknik, yang disebut *Ambachtschool* pertama kali didirikan pada tahun 1821 di Tanawangko, dan tahun 1910 dibuka di Kakas. Sedangkan sekolah-sekolah umum yang didirikan oleh pihak swasta semakin lama semakin berkembang karena mendapat dorongan dari Pemerintah berdasarkan surat keputusan nomor 582 tahun 1912. Di antara sekolah-sekolah umum swasta itu adalah *Tondanosche School* yang dibuka tahun 1913 di Tondano, kemudian pada bulan Juli 1914 di Amurang yang dinamakan *Amoerangsche School* dan selanjutnya berturut-turut pada tahun 1915 di Langoan dan tahun 1917 di Airmadidi.[17]

Di Bolaang Mongondow pihak swasta yang aktif mengembangkan pendidikan rakyat adalah SI (Sarekat Islam) yang kemudian menjadi PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia). Pada mulanya memang tidak mudah bagi SI untuk memperoleh ijin bagi pembentukan lembaga-lembaga pendidikan. Pemerintah setempat selalu menghalangi dengan tidak memberikan ijin. Baru setelah Ketua cabang SI Bolaang Mongondow yang bernama Adampe Dolot pada tahun 1925 langsung pergi ke Batavia (Jakarta) untuk mengajukan permohonan itu ke Departemen Pendidikan dan Pengajaran *(Departement Van Onderwijs en Eeredienst),* SI berhasil memperoleh ijin itu. Pada tahun 1926 berdirilah sekolah SI pertama di Malinow, tidak jauh dari Kotamobagu.[18]

Dalam usaha mengembangkan pendidikan ini lebih lanjut, SI Bolaang Mongondow mendirikan suatu badan yang disebut Balai Pendidikan dan Pengajaran Islamiyah (BPPI). Selain membuka sekolah dasar, yang tersebar di hampir semua desa di Bolaang Mongondow, BPPI juga membuka HIS agar murid-murid sekolah rakyat dapat melanjutkan studinya.[19]

Kegiatan pendidikan swasta di Gorontalo terutama adalah atas prakarsa Muhammadiyah yang dibentuk pada tahun 1929. Di antara tokohnya adalah H. Yusuf Abbas yang banyak menaruh perhatian pada bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Lembaga pendidikan yang didirikan mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan lanjutan. Selain itu juga tidak sedikit kegiatan kursus-kursus yang diadakan untuk memajukan pengetahuan kaum wanita. Hal yang akhir ini merupakan kegiatan dari Yong Islamieten Bond Dames Afdeeling (YIB bagian wanita).[20]

Karena secara umum masyarakat Sulawesi Utara memandang kaum wanita sederajat dengan kaum pria, maka kesempatan memperoleh pendidikan pun terbuka seluas-luasnya bagi mereka. Di hampir semua sekolah yang ada, baik milik pemerintah maupun swasta, siswa wanita bercampur dengan siswa

pria; tanpa ada pemisahan. Demikian juga halnya dengan sekolah-sekolah yang didirikan oleh BPPI di Bolaang Mongondow.[21] Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam pun tidak mengenal perbedaan derajat antara pria dan wanita.

Bila ditinjau kurikulumnya, pada umumnya ada kesamaan isi pelajaran yang diberikan di sekolah-sekolah yang setingkat. Bahasa pengantar yang dipakai umumnya adalah bahasa Melayu (Indonesia) dan di sekolah rendah mata pelajarannya meliputi pelajaran membaca, menulis dan berhitung. Juga diajarkan pelajaran tambahan seperti olah raga, menggambar, menyanyi, ilmu bumi dan ilmu pengetahuan alam. Dalam pendidikan lanjutan diajarkan juga bahasa Belanda dan ilmu pengetahuan lainnya.[22] Di sekolah-sekolah Muhammadiyah dan PSII dimasukkan juga pendidikan semangat kebangsaan, terutama oleh guru-guru yang didatangkan dari Jawa. Dengan demikian siswa-siswa sekolah tersebut terbina kesadaran kebangsaannya.[23] Sebuah contoh sebagai ilustrasi adalah pengalaman pribadi yang diceritakan oleh L.C. Mokoginta. Ketika ia masih duduk di sekolah rendah BPPI atau HIS di Kotamabagu ia sering ikut mendengar ceramah dan pembicaraan-pembicaraan tentang perjuangan nasional dalam rapat-rapat PSII. Kalau ditanya oleh orang tuanya karena pulang terlambat dikatakannya bahwa ia baru habis bermain bola. Hal-hal yang didengarnya dalam pertemuan-pertemuan PSII itu pernah pula didengar dari gurunya di sekolah.[24] Jadi murid-murid wanita pun tidak sedikit memperoleh pengetahuan tentang arti kebangsaan dan semangat perjuangan.

Selain sekolah-sekolah umum yang tersebut di atas, pada masa itu masyarakat Sulawesi Utara juga merasakan perlunya diadakan pendidikan khusus untuk kaum wanita. Oleh karena itu kemudian dibuka sekolah yang hanya diperuntukkan bagi anak perempuan saja. Yang boleh dianggap tertua adalah sekolah putri yang bernama *Christelijke Meisjes School,* yang dibuka pada tahun 1881. Kemudian disusul oleh *Meisjes Kost School* di Tomohon yang pada tahun 1895 diberi subsidi oleh pemerintah.[25]

Karena pada umumnya biaya sekolah itu, terutama milik pemerintah, masih dianggap cukup mahal, maka di kalangan kaum wanita Minahasa timbul gagasan untuk membuka kesempatan memperoleh pendidikan bagi kaum wanita dengan biaya yang rendah. Pelopor dan pencetus gagasan ini adalah Maria Walanda Maramis yang pada tahun 1917 mendirikan organisasi PIKAT (Percintaan Ibu kepada anak temurunnya) di Manado. Adapun tujuan dari organisasi ini terutama adalah meningkatkan dan memajukan taraf pengetahuan dan pendidikan kaum wanita, khususnya di Minahasa. Dalam hal ini dirasakan perlunya memberi bekal kepada kaum wanita untuk dapat berdiri sendiri dengan bekal ilmu yang ada. Selain itu, sebagai pendidik generasi selanjutnya, ibu rumah tangga juga perlu memperoleh pengetahuan yang cukup agar dapat memberi bekal kepada anak keturunannya. Usaha PIKAT ini maju dengan pesat dan menyebar ke daerah-daerah lain di Sulawesi Utara. Sekolah rumah tangga *(Huishoud School)* PIKAT dibuka di Manado, Sangir, Talaud, Bolaang Mongondow dan Gorontalo. Bahkan ada cabangnya di Jakarta.[26]

Bukan hanya di lapangan pendidikan saja kaum wanita Sulawesi Utara berperan, tetapi banyak juga yang bergerak di lapangan politik atau bidang kemasyarakatan yang lain. Semuanya itu tidak terlepas dari pendidikan yang diperolehnya dan adat masyarakat yang menunjangnya. Pada tahun 1927 di Manado berdiri perkumpulan Putri Setia dan dipimpin oleh Sofie Kamelia Pandean (Ny. S.K. Pandean). Kegiatannya terutama di bidang kesejahteraan wanita dan keluarga. Akan tetapi di antara anggotanya tidak tertutup kemungkinan untuk memasuki kegiatan politik.[27]

Di daerah Sangir Talaud dapat dicatat berdirinya Kumpulan wanita Maria Martha di Tahuna. Kegiatannya masih terbatas pada soal kesejahteraan keluarga dan keagamaan. Sedangkan di Bolaang Mongondow yang giat mendorong kemajuan wanita adalah SI yang dibentuk seksi wanita dan disebut Onder

Departemen Pengerahan Wanita. Ketuanya adalah Hatidah Mokobombang yang dibantu oleh Djamila Dolot dan Aida Mustafa. Cabangnya tersebar di seluruh pelosok Bolaang Mongondow. Kegiatan seksi wanita ini, selain pendidikan dan hal-hal lain yang menyangkut kepentingan wanita, juga menyebarluaskan kesadaran akan pentingnya perjuangan melawan penjajahan Belanda. Hatidah Mokobombang sering menganjurkan agar kaum wanita turut serta dalam kegiatan dan perjuangan kaum laki-laki dalam usahanya menentang penjajahan. Di masa perang kemerdekaan tokoh wanita ini memang aktif di dalam Laskar Banteng di Bolaang Mongondow.

Ketika wilayah Sulawesi Utara diduduki oleh pasukan Jepang, kaum wanita di daerah itupun tidak luput dari penderitaan dan beban kehidupan seperti yang dialami oleh saudara-saudaranya di tempat lain. Semua kegiatan organisasi-organisasi yang ada dipusatkan di bawah pengawasan Jepang. Seperti di wilayah kekuasaan Jepang lainnya, kaum wanita disatukan kegiatannya dalam Fujinkai. Tujuannya terutama adalah untuk membantu usaha perang Jepang. Gadis-gadis yang bersekolah dikerahkan tenaganya untuk kepentingan pasukan pendudukan. Mereka juga dilatih dalam hal-hal yang berkaitan dengan peperangan seperti kepalang merahan. Juga terus ditanamkan semangat berjuang untuk membela tanah air dari serangan musuh yaitu Sekutu. Hal yang terakhir ini sangat besar pengaruhnya terhadap sikap kaum wanita Sulawesi Utara ketika harus mempertahankan kemerdekaan negerinya di masa revolusi. Semuanya harus hidup prihatin. Makanan dijatah karena para petani wajib menyerahkan sebagian besar dari hasilnya kepada Jepang. Makanan sehari-hari penduduk terpaksa diubah; mereka membiasakan diri makan beras bercampur jagung.[29]

Kekuasaan Jepang di Sulawesi Utara berakhir dengan penyerahan secara resmi kepada Sekutu pada tanggal 2 September 1945. Pada waktu itu pihak Sekutu memerintahkan agar orang Jepang tetap mempertahankan status-quo. Padahal pada tanggal

21 Agustus 1945 sejalan dengan tersiarnya berita proklamasi Kemerdekaan RI di Minahasa, penguasa Jepang telah menyerahkan kekuasaannya kepada wakil-wakil bangsa Indonesia. Peristiwa ini oleh orang Indonesia dianggap sebagai awal kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka.

C. SULAWESI SELATAN.

Penjajahan asing yang lama berkuasa di Sulawesi Selatan adalah bangsa Belanda dan kenyataan yang terlihat, timbul kemelaratan, penderitaan dan korban yang cukup banyak. Kedatangan bangsa Belanda dimulai pada tahun 1601 dan berusaha mengadakan hubungan dagang dengan raja Gowa Alauddin, tetapi tidak mendapat perhatian. Kemudian pada tahun 1607 datang lagi ke Somba Opu dengan maksud yang sama, menjalin hubungan dagang. Usaha Belanda untuk menguasai Gowa yang sangat strategis di wilayah Indonesia Timur waktu itu berlangsung terus hingga masa pemerintahan Raja Gowa Sultan Hasannuddin.

Secara kronologis usaha Belanda untuk menguasai Sulawesi Selatan secara berturut-turut dilakukan pada tahun 1616 dan pihak Belanda dapat dibinasakan. Pada tahun 1625 Gubernur Belanda Herman van der Speult kembali lagi ke Somba Opu untuk berunding, tetapi usaha tersebut tetap gagal. Kemudian pada tahun 1627 Gowa menyerang Belanda di perairan Maluku dan perang berlangsung sampai tahun 1630. Pada masa pemerintahan Sultan Hasannuddin yaitu pada tahun 1666/1667, Belanda dengan persenjataan lengkap mengadakan penyerangan untuk menghancurkan Gowa. Dengan perlawanan yang gigih dan korban yang cukup banyak, perang Gowa melawan Belanda ini berakhir dengan penandatanganan perjanjian Bongaya. Sejak itu Belanda mulai meluaskan kekuasaannya dengan politik adu domba dan raja-raja Sulawesi Selatan tetap mengadakan perlawanan dan berjuang mempertahankan eksistensi kerajaan dan kedaulatannya.

Raja-raja Sulawesi Selatan (tokoh wanita) yang terlibat langsung dalam perjuangan menentang penjajahan Belanda antara lain ialah:[30] Ratu Imanengratu Aru Data Raja Bone ke XXIV (1824–1835), yang tidak mau tunduk pada Belanda untuk hadir dan menandatangani perjanjian Makasar. Motivasi perlawanannya timbul karena beliau merasa tidak puas terhadap pemerintah Belanda yang mengacuhkan kedudukan Bone. Sebagai salah satu sekutu Belanda yang diakui, mempunyai hak istimewa di mana raja-raja Sulawesi Selatan yang akan berhubungan dengan VOC hanya diperbolehkan apabila diatur oleh Raja Bone. Dalam perlawanannya, taktik yang dipergunakan adalah taktik perang gerilya dengan mengadakan penyerangan yang bersifat sporadis. Ini dikarenakan perbandingan persenjataan yang tidak seimbang. Dalam menghadapi Belanda, Raja Bone ini bekerjasama dengan Pangkajene, Maros, Sinjai dan Bulukumba.

Kemudian pada masa pemerintahan Ratu Tenri Awaru Besse Kajuara, yaitu Raja Bone yang ke XXVIII (1859), perjuangannya didasarkan atas keinginan untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Bone yang telah dihancurkan oleh Belanda. Dalam pemerintahannya, beliau bertindak sebagai panglima perang yang langsung memimpin pertempuran dan didampingi iparnya. Beliau berhasil menghimpun seluruh rakyat Bone termasuk kaum wanitanya, sehingga tidak heran bila pasukan Bone waktu itu terdapat pasukan wanita yang ikut ke medan perang dengan tugas merawat pasukan yang terluka, bahkan kalau perlu bertempur melawan musuh. Di samping itu di kerajaan Bone talah tampil pula seorang permaisuri Raja Labbakang ke IV (Andi Arif), di mana permaisuri ini cukup besar peranannya dalam pembentukan pribadi dan watak puteranya yaitu Andi Maruddani. Oleh karena didikan ibundanya, akhirnya Andi Maruddani tidak mau bekerjasama, bahkan dengan gigih menentang penjajahan Belanda di Sulawesi Selatan. Di sini terbukti bahwa dengan pendidikan di rumah pun, kaum wanita

mampu memberikan pandangan yang luas pada kenyataan yang sesungguhnya tengah terjadi di wilayah sendiri waktu itu.

Tokoh wanita lain yang mampu mengobarkan semangat anti Belanda yaitu Andi Kambo Opu Daeng Nisompa. Aktivitas beliau dilakukan melalui Hadat Luwu. Andi Kambo menaruh curiga atas kedatangan bangsa Belanda di Sulawesi Selatan, karena jelas akan merusak kehidupan ekonomi rakyat dan merusak nilai-nilai serta tradisi luhur yang telah terpelihara di Luwu selama ini. Di samping itu menurut tradisi turun-temurun, ada 6 (enam) hal yang tidak boleh diambil atau diserahkan pada pihak lain, apalagi pihak asing (Belanda). Keenam hal tersebut tidak lain adalah 3 (tiga) bilah pedang pusaka, sebilah badik, seuntai rantai emas dan pelabuhan. Oleh karena itulah beliau dengan gigih menentang kerjasama apa pun bentuknya yang ditawarkan oleh Belanda.

Seorang ratu dari kerajaan Enrekang yaitu Pancai Tana Bunga Walie,[31] ketika pecah perang rakyat Massenrengpulu, pada tahun 1905–1906, beliau memimpin langsung pertempuran melawan penjajah Belanda. Dengan kenyataan ini jelas bahwa wanita sejak dulu telah terlibat secara langsung dalam perjuangan pisik melawan penjajah Belanda yang ada di Sulawesi Selatan.

Kemudian seorang tokoh wanita lagi yaitu Opu Daeng Risaju atau disebut juga Indok Saju; beliau adalah wanita ningrat dari kerajaan Luwu dan ikut ambil peranan dalam perjuangan melawan Belanda. Beliau lebih dikenal sebagai seorang politikus wanita waktu itu. Dalam perjuangannya, ia selalu membakar semangat rakyatnya. Dalam suatu rapat akbar di Kecamatan Malangke, ia ditangkap dan dimasukkan dalam penjara oleh Belanda. Meskipun ketentuan-ketentuan adat sangat ketat pada waktu itu, tetapi tidak menjadi penghalang baginya untuk tetap berjuang bersama rakyatnya. Pengabdiannya dalam dunia pergerakan mengakibatkan Datu Luwu mencabut gelar kebangsawanannya. Dalam kaitannya dengan pencabutan gelar itu patut kita perhatikan ucapan beliau yang berani di depan

Datu Luwu, We Kambo Opu Daeng Risompa bersama seluruh anggota Dewan Hadat Kedatuan Luwu, yang dengan suara lantang berkata: "Kalau hanya karena adanya darah daging kebangsawanan dalam tubuhku, lalu saya harus meninggalkan dunia pergerakan, lebih baik jika saya menanggalkan saja darah daging kebangsawananku daripada meninggalkan dunia pengabdianku kepada nusa, bangsa dan agama". Sambil membuka peniti kebayanya, ia menatap dengan mata tajam kepada Sri Datu, dan selanjutnya ia berkata: "Di mana darah daging kebangsawananku itu di sini, irislah, supaya Datu dan Hadat tidak perlu turut terhina jika saya diperlakukan tidak sepantasnya, karena aku memenuhi panggilan ibu pertiwi.[32] Sejak itu Datu Luwu mencabut gelar kebangsawanannya dan beliau lebih dikenal dengan nama Indok Saju. Ia pernah pula ke Jawa dan menemui pemimpin-pemimpin pergerakan antara lain H.O.S. Tjokroaminoto. Dari pengalamannya dalam pertemuan itu, ia semakin menggiatkan perlawanannya di Sulawesi Selatan, bahkan secara terbuka beliau menyerang kaum Hadat di Luwu yang dikatakannya sebagai penjilat bangsa Belanda.

Dari beberapa contoh di atas, maka perjuangan kaum wanita Sulawesi Selatan pada waktu itu umumnya baru pada perjuangan tingkat daerah, tetapi dengan tujuan merebut kembali kedudukan dan status para raja untuk mendapatkan wilayah kekuasaan masing-masing seperti semula dari tangan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Dengan demikian yang diperjuangkan kaum wanita Sulawesi Selatan pada awal abad 20 tidak hanya terbatas pada perbaikan status saja, tetapi wanita sudah pula memimpin perlawanan yang mengarah pada persatuan perjuangan menuntut kemerdekaan untuk kesatuan bangsa Indonesia. Dan Makassar yang kini disebut Ujung Pandang telah menjadi pusat perkembangan gerakan-gerakan tingkat daerah waktu itu, seperti: persekutuan "Timors Verbond" yang didirikan pada tahun 1921, Persatuan Perkumpulan Celebes atau Serikat Celebes

(Maret 1930) dan Serikat Ambon Cabang Makassar yang telah mengadakan musyawarah pada tahun 1932. Adapun yang bergerak di luar wilayah Sulawesi Selatan yaitu pada tahun 1938 organisasi daerah yang dipimpin oleh Andi Zainal Abidin bersama Andi Burhanuddin berhasil mempersatukan kegiatan pemuda asal Sulawesi Selatan yang ada di Jakarta. Kemudian Nadjanuddin Daeng Malewa sendiri aktif dalam organisasi yang dipimpin oleh Dr. Soetomo di Surabaya. Demikianlah perjuangan pergerakan pemuda di Sulawesi Selatan ini berlanjut sampai pada masa pendudukan tentara Jepang. Oleh karena situasi dan kondisi Sulawesi Selatan yang agak berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya, maka corak pergerakannya pun berbeda juga.

Sebelum tentara Jepang masuk ke Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan, wanita Sulawesi Selatan sebenarnya sudah dapat membantu untuk kemudahan-kemudahan bagi dirinya, terutama untuk mempertinggi kedudukan sosial bagi golongan sendiri. Namun dengan datangnya tentara Jepang di beberapa wilayah Indonesia dan jelas memperlihatkan kekasaran dan keserakahannya yang tidak manusiawi, maka hukum adat dan hukum moral warisan nenek moyang Sulawesi Selatan, tanpa disadari mulai diperketat kembali untuk ketertiban hidup lingkungan sendiri. Meskipun tidak secara nyata membentuk lasykar atau barisan-barisan wanita secara khusus, tetapi sampai dengan jatuhnya pemerintahan Jepang pada tentara sekutu, cukup banyak wanita Sulawesi Selatan yang ikut aktif dalam pasukan-pasukan yang dibentuk oleh kaum pria untuk mempertahankan diri dan membantu para pejuang.

Tokoh-tokoh wanita yang banyak tampil dan berbicara di waktu itu pada umumnya adalah wanita-wanita yang datang dari luar wilayah Sulawesi Selatan. Hal ini sangat wajar, karena sebagai seorang perantau, mereka tidak merasa canggung dan bebas bergerak. Apalagi dengan bekal kepercayaan yang ada pada dirinya sendiri, mau tidak mau mereka menjadi semakin

matang dalam menghadapi segala kesulitan yang ada. Sikap hidup yang penuh dengan tantangan dan godaan pada masa pendudukan tentara Jepang itu justru menjadikan kemantapan pada diri kaum wanita dalam menghadapi tahun-tahun revolusi pisik di mana kekejaman tentara Belanda dengan Nefisnya tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga semacamnya yaitu Tokketai di zaman Jepang.

Organisasi-organisasi wanita pada zaman Jepang seperti yang ada di Jawa yaitu Huzinkai, Jawa Hokokai, baru muncul di Makassar menjelang penyerahan Jepang kepada tentara Sekutu. Badan semacam itu di Sulawesi Selatan diberi nama Sumber Darah Rakyat atau disingkat Sudara di mana Andi Mappanyukki, Raja Bone terpilih, sebagai Ketua Umum dan Dr. Ratulangi sebagai wakilnya, di samping sebagai Ketua untuk wilayah Makassar. Sedang Lanto Daeng Pasewang ditunjuk sebagai Kepala Stafnya. Organisasi semacam di atas walaupun tidak ada bagian Keputrian secara khusus, tetapi tujuan tetap sama yakni ingin lepas dari penindasan kaum penjajah asing dan memajukan bangsa dan negara Indonesia, sehingga rakyat bebas dari kemelaratan dan kesengsaraan.

Dari situasi dan kondisi yang demikian itu, maka tokoh-tokoh wanita yang muncul di tahun-tahun revolusi pisik ternyata dapat bekerjasama dan bahu-membahu dengan pejuang-pejuang pria lainnya memerangi KNIL. Meskipun mereka itu tidak dibesarkan dan dididik dalam organisasi yang sudah ada, tetapi organisasi wanita di Sulawesi Selatan itu pada umumnya lahir atas kesadaran mereka sendiri. Dengan nalurinya sebagai seorang wanita, mereka ingin melihat bahwa keturunannya nanti dapat diperlakukan secara manusiawi, dan sebagai warga masyarakat yang bebas dan merdeka. Mereka tidak ingin dijajah lagi oleh bangsa asing mana pun juga, terlebih-lebih oleh bangsa Belanda yang secara terang-terangan ingin kembali ke bumi Indonesia.

Munculnya tokoh-tokoh wanita seperti: Maradia Depu, Emmy Saelan, Nyonya Milda Towolioe, Nyonya Ida Latumahina, Nyonya Sultan Daeng Raja, Nyonya Ipa, Nyonya Sitti Mulyati dan beberapa isteri tokoh-tokoh pejuang Palopo yang diasingkan ke luar Sulawesi Selatan dan ditinggalkan oleh suami-suami mereka; kemudian Nyonya Ali Malaka, Nyonya Ne Pattileuw, tidak lain adalah sederetan nama-nama wanita yang tampil atas kesadaran sendiri. Mereka berusaha untuk bersatu menghadapi bahaya yang datang dari luar dengan tugas dan kegiatan bermacam-macam. Yang jelas, mereka bangkit dan bergerak bersama beberapa rekannya karena mereka tidak senang melihat bangsa Indonesia diinjak-injak oleh bangsa asing. Melalui kedudukan dan posisinya baik dalam keluarga, rumah tangga dan masyarakat bersama kaum pria bertekad menghadapi kaum penjajah yang ingin kembali menguasai Indonesia.

D. BALI.

Pada masyarakat Bali yang beragama Hindu berlaku sistem *kasta,* yang didasarkan pada agama. *Kasta* atau penggolongan dalam masyarakat sebenarnya dimaksudkan sebagai penggolongan dalam tugas dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan tugas dan kewajiban, masyarakat dibagi dalam *Catur Warna,* golongan *Brahmana,* adalah mereka yang menguasai ilmu agama dan mengamalkan ilmunya bagi kesejahteraan masyarakat. Golongan *Ksatria* bertugas dan berkewajiban memimpin, menjaga keamanan dan ketenteraman rakyat. Golongan *Waisa,* kelompok yang mempunyai ketrampilan, sementara yang masuk golongan *Sudra* adalah mereka yang *kuat* untuk mengerjakan pekerjaan yang berat. Ketiga golongan pertama disebut *Triwangsa,* dan golongan keempat dikenal juga dengan nama *Jaba.*

Kaum wanita Bali terutama mereka yang tergolong dalam Triwangsa sangat dikekang oleh adat. Menurut kebiasaan mereka menjelang dewasa tidak sering ke luar dari rumah lagi. Mere-

ka tidak mempunyai kebebasan untuk memilih suaminya sendiri, kawin paksa pun sering berlaku bagi dirinya. Tidak jarang mereka menikah dengan seorang lelaki yang sudah mempunyai isteri atau beberapa isteri. Ia biasanya hanya menerima tanpa protes, apa yang dianggap orang tuanya baik bagi dirinya.

Perkawinan antar *kasta* tidak dianjurkan, namun bila hal ini toh terjadi, maka wanita yang bersuamikan pria dari kasta yang lebih rendah, maka wanita itu dikeluarkan dari *kasta*-nya. Bersama-sama dengan suaminya ia di *selong* (dibuang ke Lombok). Bila wanita dalam perkawinan mendapat suami dari kasta yang lebih tinggi, maka ia akan diangkat ke dalam kasta suaminya. Hal ini disebut *Aswundung.*

Tugas seorang wanita setelah bersuami adalah mengurus rumah tangga, suami dan anak-anaknya. Di samping tugas ini, iapun juga biasanya memelihara ternak yang ada di halaman rumah seperti babi dan ayam.[33]

Sejak tahun 1908, yaitu sejak jatuhnya kerajaan Klungkung, Bali berada di bawah Pemerintahan Hindia Belanda. Bersama-sama dengan Lombok, Bali dijadikan Karesidenan. Bali sendiri dibagi ke dalam dua bagian, yaitu Bali Utara dan Bali Selatan. Kota Singaraja merupakan pusat Bali Utara, sedangkan Denpasar merupakan pusat Bali Selatan. Tiap-tiap bagian Bali masih dibagi-bagi lagi dalam beberapa *onderafdeling,* setiap *onderafdeling* dibagi dalam beberapa *landschappen.*

Yang mengepalai (*Residentie* yang terdiri dari Bali dan Lombok itu adalah seorang *Resident.* Bali Utara maupun Bali Selatan, masing-masing dikepalai oleh seorang *Asistent Resident* (setingkat Bupati). Setiap *onderafdeling* dikepalai oleh seorang *Controleur.* Di bawah *Controleur* terdapat para raja yang mengepalai beberapa kerajaan (daerah). Di setiap kerajaan struktur pemerintahan di bawah raja terdapat seorang *Punggawa.* Setiap daerah yang dikuasai seorang raja dibagi lagi ke dalam beberapa desa dan desa-desa ini dibagi lagi ke dalam beberapa *Banjar.*

Dari tingkat daerah sampai tingkat *Banjar*, pemerintahannya berada di tangan orang Bali sendiri.

Dari tahun 1908 hingga tahun 1938 Pemerintah selalu mengawasi jalannya atau pelaksanaan pemerintahan daerah yang dikelola oleh raja. *Controleur* yang bertugas untuk mengawasi secara langsung segala kegiatan pemerintahan daerah. Pada tahun 1938 kepada para raja diberi *zelfbestuur*, yang berarti bahwa mereka ke dalam, yaitu ke daerah kekuasaannya sendiri tidak diawasi lagi oleh seorang *Controleur*. Kerajaan-kerajaan yang ada pada waktu itu adalah Kerajaan Buleleng, Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli dan Karangasem.

Bidang yang paling penting yang berkembang setelah Politik Etis dilaksanakan di Indonesia adalah bidang pendidikan. Bidang ini yang mempunyai dampak terbesar dalam perkembangan bangsa Indonesia. Setelah Bali pada tahun 1908 dapat dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda, yaitu setelah Kerajaan Klungkung dapat ditundukkan, maka perluasan pendidikan pun diadakan di Bali. Di samping didirikannya berbagai sekolah, seperti *Vervolgschool* (sekolah setaraf SD), *Volkschool, Eerste Klasse School, Tweede Klasse School, HIS (Hollandse Inlandse School)* dan beberapa sekolah lainnya, dengan taraf sekolah dasar, juga didirikan sekolah-sekolah kejuruan. Yang tersebut terakhir adalah *Vakschool*.

Namun meskipun sekolah-sekolah tersebut telah didirikan di Bali, periode sebelum 1920 belum memberi kesempatan untuk para wanita Bali untuk mengunjungi sekolah-sekolah. Tradisi dan adat masih mengungkung wanita Bali, ruang geraknya berada di lingkungan keluarga saja.

Keadaan ini mengalami perubahan, ketika beberapa pemuda kembali dari Jawa setelah bersekolah di sana. Mereka menganggap bahwa wanita Bali paling sedikit harus mengetahui tentang tulisan dan buku-buku agama Hindu. Pada tahun 1924

didirikanlah *Sekolah Perempuan Shanti* atas prakarsa *Perkumpulan Shanti* yang didirikan pada tahun 1921. Di sekolah ini diberi mata pelajaran menulis dan membaca Huruf Bali, dan pelajaran mengenai Agama Hindu dan Buku-buku *Wiracarita* (Falsafah Agama Hindu). Ternyata dari isi pelajaran-pelajaran yang diperoleh diketahui bahwa memperbaiki keadaan dan derajat bangsa merupakan hal yang terpuji. Sekolah Perempuan Shanti tidak berusia panjang. Pada tahun 1926 sekolah ini ditutup, karena di dalam keanggotaan Perkumpulan Shanti terjadi keretakan.

Sejak tahun 1926 perluasan pendidikan modern diperluas di Bali. Keinginan wanita Bali untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang didirikan Pemerintah Belanda mulai menjadi kenyataan sejak tahun 1926. Meskipun belum dalam jumlah yang besar, namun kehadiran mereka di antara kaum pria bukan sesuatu yang aneh. Bahkan sejumlah di antara murid-murid wanita setelah menamatkan sekolahnya di *Vervolgschool* dan sekolah setingkat, meneruskan pelajarannya ke pulau Jawa, yaitu ke Blitar ke *Meisjes Normaalschool* (Sekolah Pendidikan Guru Wanita). Di antara mereka terdapat nyonya Merta (Nona Rapeg), nona Sang Ayu Kompyang, nona Sampreng, Made Catri. Yang dikirim dari Bali ada dua puluh orang, sedangkan yang dari Lombok lima orang.

Pada tahun 1935, setelah mengakhiri pendidikan di *Meisjes Normaalschool* di Blitar, putri-putri tersebut kembali dan mengajar di tempat-tempat di Bali dan Lombok. Akan halnya Nona Rapeg (I Gusti Ayu Rapeg) ia ditugaskan untuk mengajar di Denpasar, di *Meisjes Vervolgschool.* Meisjes Vervolgschool tersebut baru dibuka setelah para lulusan dari *Meisjes Normaalschool* kembali. Pelajaran yang diberikan dalam segala mata pelajaran. Namun khusus untuk *Meisjes Vervolgschool* ada pelajaran ekstra, yaitu mengenai *Huishouding* (mengatur rumah tangga).

Para murid berasal dari semua lapisan masyarakat. Setiap murid diwajibkan membayar uang sekolah sebanyak 25 *cent* (25 sen Belanda). Bahasa yang dipakai adalah bahasa Melayu/ Indonesia. Sebagai mata pelajaran tambahan diberikan juga bahasa Belanda. Seluruh sekolah dikelola oleh guru-guru Indonesia (bumiputra). Kemudian juga dibuka kursus-kursus pendidikan untuk guru-guru sekolah desa, yang dinamakan *Opleiding Volks Onderwijzer.* I Gusti Ayu Rapeg juga menjadi guru di sini dan semua muridnya pada waktu itu adalah wanita, yang berasal dari seluruh Bali. Mereka diasramakan.

Di samping pendidikan yang telah disebut, terdapat juga *Huishoudschool* (Sekolah Kepandaian Putri). Sekolah ini dibuka oleh raja-raja di Bali (Zelfbestuurders), dan mereka yang memiliki sekolah ini. Yang menjadi murid-murid pada sekolah ini adalah wanita-wanita dari kalangan keluarga raja, bahkan juga istri-istri mereka. Mereka semua diasramakan dan diperbolehkan pulang sekali seminggu. Direktrisnya orang Belanda. Yang pernah menjadi direktrisnya adalah *Juffrouw Perquin.* Namun sekolah ini tidak begitu mendapat sambutan, dan oleh sebab itu gedungnya digunakan sebagai asrama Meisjes Vervolgschool yang berada dalam satu pekarangan.

Di *Huishoudschool* diberi pelajaran mengenai kepandaian putri dan antara lain bahasa Melayu dan bahasa Bali.

Dengan bertambahnya wanita-wanita Bali memperoleh pendidikan, maka bertambah pula kesadaran mereka akan hal-hal yang menyangkut keadaan negerinya. Kejadian-kejadian di pulau Jawa, yaitu perjuangan-perjuangan di bidang politik mendapat tanggapan di Bali.

Awal dari adanya organisasi-organisasi wanita dilatarbelakangi oleh organisasi-organisasi pendahulunya. Pada tahun 1935 terbentuk perkumpulan *Eka Laksana.* Perkumpulan ini berkecimpung dalam bidang budaya dan kesenian, sementara anggotanya terdiri dari para pelajar dari Bali dan Lombok.

Perkumpulan ini disusul oleh *Bali Dharma Laksana,* yang mempunyai tujuan untuk memberi bantuan kepada para pelajar Bali yang cakap untuk dapat menyelesaikan pendidikannya, dalam jenjang pendidikan manapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Berkat pengalaman-pengalaman para wanita Bali baik dalam pendidikan maupun dalam pengamatannya mengenai organisasi dan juga atas nasehat Cokorde Ngurah Pemayun, mereka menyadari bahwa mereka pun memerlukan suatu sarana untuk mencapai cita-citanya. Anjuran Cokorde Ngurah Pemayun yang pada waktu itu menjabat sebagai *School Opziener* (Penilik Sekolah) agar kaum wanita berbuat sesuatu bagi kaumnya mendapat sambutan.

Organisasi yang pertama didirikan adalah *Peroekoenan Istri,* wanita yang mengambil inisiatif di dalam pembentukan organisasi ini adalah nyonya Malkan, istri seorang pegawai negeri. Tujuan dan kegiatan perkumpulan ini masih terbatas pada kehidupan serasi dan gotong royong antara para anggotanya. Pengurus Pertama diangkat pada tahun 1934. Yang diangkat sebagai ketuanya adalah Ibu Malkan sendiri, sedangkan yang diangkat sebagai wakil ketua adalah Nyonya Rahayu. Perkumpulan yang kedua, adalah *Poetri Bali Sadar.* Para anggotanya agak selektif, yaitu mereka yang telah dapat membaca dan menulis. Dan yang terpenting dari organisasi ini adalah, bahwa para anggotanya harus orang Bali. Pada tahun 1936 pengurus pertama Poetri Bali Sadar dibentuk. Mereka yang duduk di dalamnya adalah I Gusti Ayu Rapeg (kini nyonya Merta), menjabat sebagai ketua, sebagai wakil ketua diangkat nyonya Anak Agung Rai. Sementara yang menjadi penulis dan bendahara adalah nyonya Ni Ketut Luh Kenteng, dan para pembantu pengurus adalah nyonya Ni Ketut Setiari dan nyonya Ni Made Tjatri.

Sebuah organisasi wanita lainnya didirikan di Klungkung. Organisasi wanita yang bernama *Kemadjoean Kaoem Poetri* ini terbuka bagi setiap wanita yang ingin menjadi anggotanya.

Melalui organisasi-organisasi wanita ini para wanita Bali mulai kegiatannya, pertama-tama melalui aktivitas-aktivitas sosial, seperti disebutkan di atas. Karena kegiatan-kegiatan ini tidak mengganggu ketenteraman, maka Pemerintah Belanda tidak pernah merasa perlu untuk ikut campur tangan.

Dengan datangnya Jepang di pulau Bali pada bulan Februari 1942, maka berakhir pula kehidupan organisasi-organisasi yang dibentuk pada zaman Hindia Belanda. Namun sebagai penggantinya Jepang mengadakan suatu wadah baru di mana para ibu dapat aktif berorganisasi. Wadah baru ini adalah *Fujinkai,* dan terdapat di seluruh Indonesia yang diduduki Jepang.

Bagi wanita Bali Fujinkai merupakan juga wadah pengganti organisasi wanita yang telah dilarang. Organisasi ini terbuka untuk setiap wanita Bali, dan sifatnya sosial dan mendidik. Pusat kegiatan *Fujinkai* terdapat di Denpasar sedangkan cabang-cabangnya terdapat di Tabanan, Karangasem dan Singaraja.

Ketika organisasi ini didirikan anggotanya tidak banyak. Rakyat tidak berani masuk suatu organisasi tanpa restu raja.[34] Di Tabanan dan Karangasem jumlah anggota *Fujinkai* cukup banyak, karena yang mempelopori organisasi ini adalah: putri-putri kraton. Merekalah yang mengajak kaum wanita di kerajaannya untuk menjadi anggota *Fujinkai.* Di samping ajakan untuk menjadi anggota Fujinkai, para wanita kraton sering menyediakan tempat di kraton untuk kegiatan-kegiatan, atau pertemuan-pertemuan.

Bila *Fujinkai* di kerajaan-kerajaan hanya dapat berkembang bila ada dorongan dari kraton, maka Denpasar mempunyai pengalaman yang lain. Karena kota ini merupakan kota pendidikan, maka mereka yang menjadi anggota Fujinkai lebih bebas dari wanita-wanita di kerajaan-keraaan untuk menentukan keinginannya menjadi anggota. Para anggota Fujinkai di Denpasar terdiri dari wanita-wanita yang pada zaman Hindia Belanda telah mengecap pendidikan modern, baik di Jawa, maupun di Bali

sendiri. Di samping itu mereka mungkin telah pernah menjadi anggota sebuah organisasi wanita sebelumnya.

Fujinkai Denpasar didirikan pada pertengahan tahun 1942, tidak lama setelah kedatangan Jepang. Tidak diadakan persyaratan khusus mengenai keanggotaan, setiap wanita Bali dan luar Bali dapat menjadi anggotanya. Pada saat pembentukannya jumlah anggotanya 80 orang, mereka terdiri dari istri-istri pegawai negeri, para guru, pegawai wanita dan istri-istri pegawai swasta. Yang menjadi anggota pengurus pertama adalah nyonya Manuaba, nyonya Merta (I Gusti Ayu Rapeg), nyonya Oka Yasmin, nyonya Ida Bagus Oka dan nyonya Jayanegara.[35]

Pertemuan-pertemuan Fujinkai diadakan sekali sebulan yang dihadiri oleh para pengurus dan anggota. Uang iuran biasanya digunakan untuk membeli alat-alat perlengkapan pendidikan kewanitaan, seperti alat-alat dapur, alat-alat rumah tangga dan alat-alat untuk upacara-upacara.

Kegiatan-kegiatan *Fujinkai* Denpasar dan pada umumnya Fujinkai di tempat-tempat lainnya adalah mengunjungi *banjar-banjar,* yaitu di balai pengobatannya. Mereka juga sering bekerja sebagai sukarelawan di balai-balai pengobatan atau mereka sering mencari dana atau kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan sebuah balai pengobatan. Di bidang pendidikan, mereka biasa mengutamakan diri dalam mengajarkan para wanita dalam ketrampilan-ketrampilan yang dibutuhkan seorang ibu rumah tangga.

Pengaruh *Fujinkai* terhadap wanita Bali cukup besar, namun pengaruhnya berbeda-beda pada tiap kerajaan. Fujinkai yang paling maju adalah yang terdapat di Denpasar, karena Denpasar sudah mempunyai kelompok wanita yang berpendidikan modern. Mereka lebih bebas bergerak daripada sesama kaumnya di desa-desa yang masih terkungkung oleh adat dan tradisi.

Pendudukan Jepang telah membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan wanita Bali. Para wanita yang sebelumnya hanya mengenal lingkungan rumah dan halamannya, pada pen-

dudukan Jepang mulai ke luar dari lingkungan ini. Karena kepeloporan para putri-putri, para wanita yang biasanya tinggal di rumah mulai sering bertemu di pendopo-pendopo puri untuk bersama-sama menganyam atau mengadakan kegiatan lain.

Pada periode Jepang wanita Bali mulai dipekerjakan sebagai pegawai di kantor-kantor pemerintah. Buruh wanita yang memperbaiki jalan, mencat rumah dan bekerja di pabrik tenun mulai menjadi pemandangan yang biasa.

Kegiatan-kegiatan wanita yang makin meluas mengungkapkan bahwa tradisi dan adat yang mengkungkung mereka selama ini memberi mereka kelonggaran untuk ikut serta dalam segala segi kehidupan. Peranan mereka meluas dan kesempatan untuk itu tidak mendapat kekangan lagi. Berkat adanya sekelompok wanita yang mendapat kesempatan pendidikan modern dan berkat kesadaran kaum pria untuk mengikut sertakan kaum wanita, maka mereka dapat diterima di segala lapangan pekerjaan yang sesuai dengan sifat kewanitaannya. Yang juga banyak jasa dalam mengikut sertakan wanita di kalangan rakyat biasa adalah para wanita puri. Karena ajakan mereka maka rakyat biasa dapat menerima kehadiran wanita di luar rumah dan halamannya.

E. MALUKU.

Sebelum kedatangan bangsa Belanda ke Meluku kaum wanita sudah berperan dalam masyarakat. Selain sebagai istri dan ibu rumahtangga dalam peran kodrati yang dibawa sejak lahir, mereka berperan pula dalam bidang pendidikan, kebudayaan, ekonomi bahkan politik dan pemerintahan. Banyak wanita yang menjadi guru-guru mengaji, penutur kisah sejarah pedagang-pedagang kecil atau keliling bahkan ada yang menduduki jabatan sebagai kepala pemerintahan. Bidang-bidang pekerjaan, atau jabatan-jabatan itu tentu saja berada dan berjalan pada tingkat yang sederhana; sesuai pendidikan dan kemampuan mereka dewasa itu. Pendidikan sejak masa masuknya agama

Islam sampai pendidikan di zaman Portugis, cukup membantu kaum wanita daerah Maluku dalam menjalankan perannya pada bidang-bidang tersebut di atas.

Dengan masuknya pendidikan barat atau modern melalui proses kolonisasi dan penjajahan, barulah terasa bahwa keadaan pendidikan dewasa itu sangatlah kurang. Politik pengajaran/ pendidikan liberal yang dijalankan sejak tahun 1864 sampai akhir abad ke 19 itu, ternyata tidak bertujuan untuk mendidik rakyat dalam arti yang umum. Bahkan kemudian tindakan pengadaan sekolah-sekolah Desa, sekolah-sekolah kelas dua dan sekolah-sekolah kelas satu pada tahun 1907.[36]

Pemerintah Belanda telah menciptakan sekolah bagi rakyat Maluku dengan melihat dan membedakannya dari segi suku, kelas-kelas masyarakat serta kepentingan-kepentingan Belanda sendiri. Jadi apabila pendidikan dan kesempatan belajar antara orang-orang di desa dan di kota diperbandingkan, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan di kota dan kesempatan belajar serta peralatan sekolah di kota jauh lebih baik dari desa-desa. Dengan demikian di kota-kota banyak kaum wanita yang mengecap pendidikan, dan kemudian banyak di antara mereka yang berprofesi sebagai pendidik dan terutama sebagai pegawai pemerintah. Sedang kaum wanita di desa, bukan saja karena perbedaan sarana pendidikan dan kurangnya kesempatan belajar, tetapi juga perbedaan perlakuan yang diterima dari pemerintah Belanda. Oleh sebab itu dalam hati kaum wanita desa lebih banyak tumbuh benih pemberontakan.[37]

Ketika terjadi perlawanan-perlawanan rakyat terhadap kaum penjajah maka kaum wanita pun tidak tinggal diam dan berpangku tangan. Mereka turut mengambil bagian dalam perlawanan itu, baik melalui bidang militer, ekonomi, politik dan sosial.

Dalam masa Perang Pattimura 1817 kita kenal nama Martha Christina Tiahahu putri Paulus Tiahahu dari Abubu. Dengan gigihnya gadis itu mengadakan perlawanan di samping ayahnya

yang memimpin rakyat Nusa Laut. Dengan semangat kepahlawanan yang tinggi, gadis itu berjuang membela bangsanya sampai akhirnya ia meninggal di atas sebuah kapal dalam perjalanannya menuju Batavia (Jakarta).

Jauh sebelum itu rakyat Hitu mengenal soerang tokoh wanita istri Kapitan Telukalessy bernama Chotidjah. Wanita berkulit putih itu banyak membantu suaminya dalam mengatur siasat menghadapi Belanda pada Perang Hitu I dan II tahun 1643 sampai dengan tahun 1646. Ia terus mendampingi suaminya dalam Perang di Kapahaha sampai ia tertembak oleh Ver Heiden karena melindungi suaminya.[38]

Di negeri Ruhumoni Haruku rakyat mengenal pula tokoh wanita bernama *Bunga Sina Monia Latua Rima,* dalam Perang Hatuhaha. Wanita itu turut dalam medan perang dengan keberanian yang sangat tinggi. Dengan semangat yang berkobar-kobar ia meneriakkan komando pada kaum laki-laki dan perempuan untuk menghadapi musuh yaitu penjajah "walanda". Untuk menambah perbekalan rakyat Monia Latu'a Rima mendatangi suatu dapur ke dapur yang lain menyuruh kaum wanita memasak makanan bagi kaum laki-laki yang sedang berperang. Ia menasehatkan pula supaya kaum wanita mengasuh dan mendidik anak-anak laki-laki mereka dengan sebaik-baiknya supaya kelak dapat menggantikan ayah mereka berperang melawan penjajah.[39]

Gerakan atau peranan ketiga wanita yang diutarakan merupakan gerakan perorangan atau individual, belum dalam susunan perkumpulan atau organisasi. Namun usaha dan perjuangan mereka, telah merintis jalan bagi kemajuan wanita lainnya di daerah Maluku.

Peranan wanita dalam bidang politik mulai terlihat setelah adanya cabang organisasi Ina Tuni yang terbentuk di Ambon. Organisasi ini mulai terbentuk di Semarang sebagai seksi wanita dari Sarekat Ambon yang didirikan oleh A.Y. Patti pada tahun 1920. Pada tahun 1923 ketika A.Y. Patti mengunjungi Ambon

untuk mengadakan penjajakan dan pendekatan dalam masyarakat Ambon, turut pula beberapa orang dari Ina Tuni. Tak lama sesudah itu cabang Ina Tuni sudah terbentuk di Ambon dengan tokoh-tokoh yang terkenal antara lain, Ina Bala Watimena dan kemudian Ina Taule. Dalam organisasi ini kaum wanita Maluku terutama di Ambon dan sekitarnya, diajak untuk bekerja sama dalam kegiatan sosial dan kebudayaan. Mereka mengadakan kursus-kursus ketrampilan (menjahit, menenun, memasak dan lain-lain), semacam kursus PKK. Pada dasarnya kaum wanita dalam Ina Tuni, ingin memajukan kesejahteraan keluarga Maluku dan memberi pendidikan yang baik kepada kaum wanita dalam mendampingi suaminya yang menjadi Anggota/kaum pergerakan. Organisasi ini berada di Maluku sampai masuknya pendudukan Jepang di sana.

Dalam zaman Jepang daerah Maluku termasuk salah satu daerah dari Indonesia bagian Timur yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan militer dari Angkatan Laut Jepang yang berpusat di Makassar. Daerah Indonesia Timur yang terbagi atas 4 bagian yaitu, Kalimantan, Sulawesi, Nusatenggara dan Maluku, masing-masing dikepalai seorang Gubernur.[40] Ibu kota dari keempat daerah itu adalah Banjarmasin, Makassar, Bali dan Ambon. Jadi pembagian ini merupakan lanjutan dari provinsi Groote Oost yang dibentuk oleh Belanda pada tahun 1938.[41] Kemerosotan ekonomi di daerah ini juga merupakan ciri khas masa itu sama dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Penggantian pegawai-pegawai Belanda dengan pegawai-pegawai Indonesia juga merupakan ciri yang sama dengan keadaan yang ada di lain daerah. Perbedaannya dengan daerah lain bahwa di Maluku terutama di Ambon orang-orang dapat berhubungan langsung dengan tentara Jepang, tetapi pergerakan nasional ditiadakan sama sekali. Pergerakan nasional baru muncul lagi pada tahun 1944, yaitu dengan terbentuknya organisasi pemuda Parindra-"Suryawirawan", dengan ketuanya G.F. Manuputty dan Nurdin Iskandar Alam sebagai sekretaris.[42]

Dalam zaman Jepang itu dibentuk suatu pemerintahan sipil di bawah pimpinan tokoh pergerakan nasional di Maluku E.U. Pupella. Beliau berkedudukan di Ambon sebagai Minseibu Chokan, yakni semacam kepala daerah tingkat dua. Akan tetapi sayangnya satu segi yang sangat penting menjadi hilang yaitu kebebasan untuk berorganisasi bila dibandingkan dengan batasan yang diberikan dalam zaman Belanda. Itulah sebabnya tidak ada organisasi yang terorganisir secara baik ataupun kelompok sosial yang menonjol. Organisasi Fujinkai untuk wanita yang didirikan di daerah-daerah lain tidak terdapat di daerah ini, organisasi-organisasi sosial hanya dapat didirikan apabila dibentuk sendiri oleh Jepang seperti pembentukan tonarigumi. Melalui organisasi tentara Jepang dapat mengawasi kegiatan dan gerak gerik penduduk.

Di pihak lain kekejaman tentara Jepang yang terkenal itu meluas sampai ke pelosok-pelosok desa. Untuk mencukupi kebutuhan makanan tentara, kebun-kebun dan ladang-ladang rakyat di desa diambil alih menjadi milik mereka. Rakyat dipaksa untuk mengolah kebun dan ladang secara intensif supaya menghasilkan, tetapi bila tiba saat panen dilarang mengambilnya. Bila ada yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan yang ingin mengambil bahan makanan itu dari kebunnya maka semacam hukuman dera akan diterimanya bahkan jiwanya pun akan menjadi tebusan. Kaum laki-laki banyak yang dikirim ke Biak, Rabaul dan kepulauan Mikronesia bahkan ke negeri-negeri yang jauh untuk bekerja di daerah pertambangan, membangun lapangan terbang dan lain-lain.[43]

Keadaan ekonomi menjadi sangat sulit mengakibatkan kelaparan di mana-mana. Banyak anak-anak dan wanita yang sakit, dan mati kelaparan. Sedang wanita-wanita yang ditinggal suaminya dan anak-anak gadis yang ditinggal mati orang tuanya, dikejar-kejar untuk melayani kebutuhan biologis tentara.

Suasana kehidupan masyarakat yang demikian itu sudah tentu menimbulkan kegelisahan yang sewaktu-waktu dapat

pecah menjadi perlawanan terhadap Jepang. Tetapi karena kekejaman dan tindakan kaum militer Jepang yang sangat keras maka perlawanan rakyat tak dapat dilakukan secara massal. Perlawanan lebih bersifat kelompok-kelompok kecil dan individual. Keadaan yang terjadi pada pertengahan tahun pertama sampai tahun ketiga masa pemerintahan Jepang itu menyimpan dendam yang dalam di dada semua rakyat di Maluku di samping perasaan takut yang mencekam. Itulah sebabnya menjelang kedatangan Sekutu, kelompok-kelompok kecil pemuda maupun individu-individu menjalin hubungan di antara mereka, dan juga dengan Sekutu untuk memperoleh kekuatan guna menghantam Jepang.

Dalam masa itu kaum wanita terpaksa ikut berperan, dalam semua bidang. Kaum wanita yang ditinggal oleh suami-suami mereka, selain berperan sebagai ibu dari anak-anaknya, mereka juga berperan sebagai ayah. Mereka harus bergerak dalam bidang ekonomi untuk mencari nafkah bagi keluarganya, juga menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Mereka juga menjadi pelindung bagi anak-anak gadisnya, yang selalu dikejar tentara Jepang. Dalam hal seperti itu kaum wanita yang telah ditinggal suaminya cepat mengambil jalan keluar. Anak-anak gadisnya dicarikan jodoh dengan secepatnya. Baik dengan famili sendiri yang masih perjaka maupun yang sudah berkeluarga.

Jarang sekali kaum wanita yang berperan dalam bidang politik, sosial, dan pendidikan formal. Mereka lebih memfokuskan kegiatan dalam lingkungan keluarga terutama dalam bidang ekonomi. Kaum wanitalah yang pergi dari desa ke desa untuk mencari bahan makanan untuk kebutuhan keluarga. Kadang-kadang ada pula yang bekerja pada bagian perbekalan tentara Jepang. Dari sana mereka bisa memperoleh makanan sebagai upahnya dan kadang-kadang mendapat bahan untuk pakaian.

Menjelang kedatangan pasukan Sekutu rakyat mulai membentuk kelompok-kelompok kecil bekerja menjadi mata-mata Sekutu untuk melumpuhkan kekejaman Jepang. Para pemuda

membentuk kelompok-kelompok bersenjata terutama di daerah Ternate, Tidore, Bacan dan Obi. Juga di pulau Seram di desa Kaiboku dan Tual di Maluku Tenggara, dimana terdapat pusat-pusat penahanan orang Belanda.[44] Dalam kegiatan-kegiatan pemuda seperti itu nampaknya kaum wanita kurang berperan, akan tetapi mereka tetap berperan di garis belakang guna menunjang kehidupan ekonomi keluarga.

CATATAN
BAB II

1) Pidato Bachder Djohan dimuka Kongres Pemuda Indonesia I pada tahun 1926 di Jakarta, dalam *Ditangan Wanita.* hlm. 23 Yayasan Idayu, Jakarta 1975.
2) Loc Cit.
3) Kongres Wanita Indonesia, Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia, P.N. Balai Pustaka, 1978, hlm. 61.
4) H.C. Zentgraaff, *Aceh,* Jakarta, Penerbit Beuna, 1983, hlm. 109.
5) *Ibid.*, hlm. 111.
6) H.M. Zainuddin, Srikandi Atjeh, Medan, Pustaka Iskandar Muda, 1966, hlm. 70.
7) N. Graafland, "Kaum Wanita di Minahasa" (1881) dalam Maria Ulfah Subadio dan T.O. Ihromi, ed, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia. Bunga Rampai Tulisan-Tulisan.* Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1983, hlm. 37.
8) *Ibid.* hlm. 37-38.
9) Cora Vreede-de Steurs, *The Indonesian Woman Struggles and Achievements,* 's-Gravenhage, 1960, hlm. 96.

10) Loc. Cit.
11) Wawancara dengan Bapak M.D. Kartawinata di Manado, 19 Sept. 1985.
12) Wawancara dengan Ibu S. Kartawinata-Abbas di Manado, 19 September 1985.
13) Wawancara dengan Ibu L.C. Mokoginta-Pontoh di Kotamobagu, 20 September 1985.
14) Sebagai sumber informasi tentang bidang pendidikan ini adalah buku terbitan Depdikbud., *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara,* Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sulawesi Utara, 1978/1979; Eveline E. Moniaga, "Pendidikan Wanita di Minahasa: sebagai salah satu kegiatan PIKAT, sejak awal berdirinya sampai dengan tahun 1930", skripsi Sarjana, Fakultas Sastra, UI, Jakarta 1983.
15) Depdikbud. (1978/1979), *Op. Cit,* hlm. 79 dan 106.
16) Eveline E. Moniaga, Op. Cit, hlm. 29.
17) *Ibid.*, hlm. 40-41.
18) Depdikbud. (1978/1979), Op. Cit., hlm. 86-87.
19) Wawancara dengan Bapak M.D. Kartawinata di Manado, 19 September 1985.
20) Keterangan Ibu S. Kartawinata-Abbas di Manado, 19 September 1985.
21) Keterangan Bapak M.D. Kartawinata-Abbas di Manado, 19 September 1985.
22) Eveline E. Moniaga, Op. Cit., hlm. 37.
23) Depdikbud. (1978/1979), *Op. Cit.*, hlm. 147; Bapak M.D. Kartawinata, *op. cit.*
24) Keterangan Bp. L.C. Mokoginta di Kotamobagu, 21 September 1985.
25) Eveline E. Moniaga, *Op. Cit.*, hlm. 38.
26) Wawancara dengan Ibu Maas Wuisan-Tangkilisan di Manado, 21 September 1985; Keterangan Ibu S.K. Pandean di Manado, 20 September 1985; *Pahlawan Nasional Ibu*

Maria Walanda Maramis, Dharma Wanita Prop. Sulawesi Utara, Manado, 1983.

27) Keterangan Ibu S.K. Pandean, *Op. Cit.*
28) Wawancara dengan Bapak Hasyim Manuarfa di Kotamobagu, 20 September 1985.
29) Keterangan Ibu Balom Papueng di Manado, 19 September 1985.
30) Rabihatun Idris, dkk, "Peranan Wanita di Sulawesi Selatan menentang Penjajahan Asing", Seminar Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan menentang Penjajahan Asing, Ujung Pandang, 8–11 Desember 1982, hlm. 5.
31) H. Nursima Ali, "Profil Pejuang Wanita di Daerah Sulawesi Selatan", Ujung Pandang, Februari 1983, hlm. 24.
32) *Ibid,* halaman 26.
33) Nyoman Suaryana, "Perkembangan Pergerakan Wanita di Bali (1935–1942);, Skripsi Sarjana Muda Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Udayana, Denpasar, 1979, halaman 12, 13.
34) *Ibid,* halaman 16.
35) Wawancara dengan Ibu Rapeg pada tanggal 25 September 1985. Tjok Istri Saraswati, Peranan Wanita dalam Revolusi physik di Bandung, Tabanan, Buleleng 1945–1949, Skripsi Sarjana Muda Jurusan Ilmu Sejarah, Universitas Udayana, Denpasar, 1982.
36) Depdikbud, – Sejarah Pendidikan Daerah Maluku Proyek IDKD tahun 1980/1981 – hlm. 26.
37) Wawancara dengan Bapak E.U. Pupella, Jl. Tebet Timur Dalam V/no. 1 Jakarta Selatan, tanggal .....1985.
38) Rijali, – Hikayat Lorina dan Morina; naskah tidak diterbitkan dari negeri Hitu.
39) Wawancara dengan Bapak Amin Ely. Komp. DPR Slipi tanggal 14 Januari 1986.
40) Richard Z. Leirissa, *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia,* Lembaga Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Tahun 1975, hlm. 96.

41) Brugmans, *Nederlandsch Indië Onder de Japanesche Bezetting* dalam R.Z. Leirissa, *Maluku Dalam Perjuangan Nasional Indonesia*, hlm. 96.
42) Wawancara dengan Bapak M. Amin Ely, tanggal 20 Desember 1985. Komplek DPR Slipi – Jakarta.
43) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Maluku*, Proyek IDSN Tahun 1983/1984, hlm. 84.
44) *Ibid.*, hlm. 85.

BAB III. PERANAN WANITA DI MASA PERANG KEMERDEKAAN

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan pada rapatnya tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan Wilayah Republik Indonesia dibagi atas 8 Propinsi yang masing-masing dikepalai seorang Gubernur. Propinsi-propinsi tersebut adalah: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil (Nusa Tenggara) dan Maluku. Kemudian propinsi-propinsi ini dibagi lagi menjadi Karesidenan (Kabupaten) yang dikepalai seorang Residen (Bupati).

Akan tetapi keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau memungkinkan adanya berbagai hambatan. Antara lain dalam bidang komunikasi antar pulau, pertahanan dan bidang pengangkutan. Hambatan-hambatan tersebut menyulitkan penyebaran berita atau hal-hal yang perlu disampaikan dalam waktu yang singkat. Juga dalam mempertahankan seluruh wilayah Indonesia terhadap musuh sangatlah sulit, karena luasnya kepulauan Indonesia. Hal itu menyebabkan pertahanan secara keseluruhan sulit dilakukan, dan juga karena persenjataan yang sangat kurang. Namun hal itu tidak berarti tidak terdapat perlawanan di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Bahwa di Jawa dan Sumatera dilanda perang Kemerdekaan yang dahsyat, adalah karena di kedua pulau itu perhatian Belanda sangat besar. Kedua pulau itu sampai masa perang Pasifik masih merupakan sumber penghasilan yang besar bagi Negeri Belanda. Itulah sebabnya mereka masih ingin memperoleh kembali jajahan Hindia Belanda. Sumber keuntungan dan kemakmuran yang diperoleh negerinya pada masa penjajahan yang lampau harus diperoleh kembali. Oleh sebab itu pula Belanda tidak bersedia menerima kenyataan bahwa Indonesia telah merdeka dan berdaulat pada 17 Agustus 1945.

Dasar pemikiran yang dianut Belanda dibantu oleh Civil Affair Agreement yang ditandatangani Pemerintah Belanda dan Inggris. Maka atas dasar Civil Affair Agreement itulah Belanda membonceng Inggris sebagai anggota Sekutu yang datang ke Indonesia untuk melucuti Jepang dan menguasai kembali Indonesia sebagai negara jajahannya. Sementara di Indonesia pejoang-pejoang yang bersemboyan *Merdeka atau Mati* telah berjanji mempertaruhkan nyawa dan harta bendanya untuk mempertahankan kemerdekaannya dan wilayah negaranya.

Sehubungan dengan itu maka kedatangan Sekutu yang dibelakangnya membonceng NICA tentu saja ditentang oleh rakyat Indonesia yang diwakili oleh para pemuda. Di Pulau Jawa, Sumatera dan pulau-pulau Nusantara lainnya timbul perlawanan-perlawanan. Para pemuda pejuang yang terdiri dari kaum pria dan wanita sama-sama mengangkat senjata.

Para pemuda berperang digaris depan, dan para pemudi pun ikut mengangkat senjata, maupun dalam barisan palang merah. Di garis belakang yang tidak kurang pentingnya, para wanita mendirikan dapur umum guna memberi pangan bagi para pejuang yang sedang bertempur. Mereka mendirikan pos-pos palang merah, mereka bertindak sebagai kurir, mata-mata, guru dan ibu rumah tangga. Para wanita itu mengambil alih peran pria dimana perlu sambil menjalankan pekerjaan lainnya agar perjuangan dapat mencapai kemenangan.

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan di saat itu ternyata mampu membakar semangat kaum wanita Indonesia terutama remaja-remaja putri yang ingin berbakti, mengabdi bahkan berkorban untuk kepentingan negara Republik Indonesia. Dan dengan tercapainya proklamasi kemerdekaan itu berarti pula mulainya babak baru bagi sejarah pergerakan Indonesia tidak terkecuali pergerakan wanitanya. Organisasi wanita yang ada waktu itu, yang merupakan ciptaan pemerintah Jepang, bernama Fujinkai dibubarkan.

Pemerintah Republik Indonesia menyerukan agar wanita Indonesia yang pada mulanya tergabung dalam Fujinkai diharapkan setidak-tidaknya segera masuk dalam wadah organisasi bangsa sendiri yaitu Persatuan Wanita Indonesia. Hal ini dilakukan dengan suatu pertimbangan agar tenaga mereka segera dapat dipergunakan untuk kepentingan perjuangan, terutama dalam bidang-bidang sosial.

Sehubungan dengan itu dalam kaitannya dengan peranan wanita Indonesia di masa perang kemerdekaan, maka di seluruh tanah air dibentuk persatuan wanita Indonesia. Perwani kemudian menjalankan tugas di garis belakang membantu mereka yang bertempur di garis depan. Dalam perkembangan selanjutnya dibentuk pula lasykar-lasykar wanita untuk membantu di garis depan sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing. Dengan semangat perjuangan yang tinggi, wanita di samping tugasnya mengurus keluarga di rumah, mereka juga bergabung dalam perkumpulan-perkumpulan wanita untuk menolong mereka yang menderita akibat peperangan.

Di masa perang kemerdekaan itu nampak pula ada kelompok lain dalam masyarakat yang menunjukkan kegiatan berorganisasi yaitu kelompok wanita yang bekerja di kantor-kantor. Ada pula kelompok yang bersifat khusus, misalnya para istri yang tergabung dalam lingkungan angkatan bersenjata, bahkan para istri dari pemuda-pemuda pejuang biasa di daerah-daerah di luar pulau Jawa dan Sumatera. Meskipun mereka mempunyai

kewajiban sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri dan wanita, namun di antara kegiatan kodrati yang rutin itupun mereka tidak lupa pada panggilan tanah airnya.

Ketika terjadi pertempuran-pertempuran, banyak orang yang mengungsi ke desa-desa, tetapi ada juga yang tetap tinggal di kota. Pada umumnya wanita yang ada di kota ini mengadakan kontak kerja sama dengan kaum wanita yang mengungsi ke desa untuk membantu perjuangan, terutama dalam hal penyediaan perbekalan bagi para pejuang di garis depan. Dapat dibayangkan keadaan di waktu itu, setengah kacau dan menegangkan. Apalagi bangsa Indonesia baru saja lepas dari tekanan Jepang, bahkan masih ada daerah-daerah yang berada di bawah bayangan penjajahan sampai tahun 1949. Seperti diketahui penjajahan Jepang tak kurang kejamnya dari periode penjajahan sebelumnya. Pada masa penjajahan Jepang itu bangsa Indonesia menderita kesengsaraan yang lebih parah, di mana-mana di pelosok-pelosok kota dan desa banyak rakyat yang sengsara karena lapar dan miskin. Banyak rakyat yang menderita busung lapar dan mengenakan pakaian dari goni. Keadaan seperti itu masih terbayang dengan jelas dibenak para wanita. Sehingga mereka sudah barang tentu bangkit serentak untuk ikut mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapainya.

Pengalaman-pengalaman di masa lampau itu, baik pengalaman pahit maupun manis telah membentuk watak kaum wanita. Dengan keyakinan yang pasti mereka tetap memelihara komunikasi dan informasi dengan kawan-kawan yang bergerak di bidang politik, untuk menentang kembalinya pasukan sekutu dan Belanda ke tanah air setelah pemerintah Jepang menyerah. Mereka menyadari bahwa perjuangan harus dilandasi dengan tekad yang kuat, tujuan yang baik dan luhur.

Sehubungan dengan itu maka para wanita dengan cara apa saja telah ikut ambil bagian dalam masa perang kemerdekaan. Oleh karena mereka berada dalam masa itu, mau tidak mau mereka ikut terlibat dalam perjuangan. Adapun volume dan

kadar perjuangan yang diemban, sesuai dengan keadaan di daerah masing-masing.

A. ACEH

Berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang mengalami perang kemerdekaan, maka daerah Aceh tidak mengalami pertempuran fisik melawan Belanda pada masa perang kemerdekaan tersebut. Dengan demikian kegiatan dan peranan wanita di Aceh agak berbeda dengan kegiatan dan peranan wanita di daerah-daerah lain di Indonesia. Hal ini tidak berarti bahwa mereka hanya berdiam diri, berpangku tangan. Kegagahan mereka telah terkenal sejak dulu, bahkan telah diakui oleh pihak luar, seperti diungkapkan oleh H.C. Zentgraaff:

> "..... perannya di dalam peperangan sampai sekarang pun sukar untuk dinilai dan biasanya aktif sekali. Wanita Aceh, gagah berani, adalah penjelmaan dendam kesumat terhadap kita yang tidak ada taranya serta tak mengenal damai. Jika ia turut bertempur, maka tugas itu dilaksanakannya dengan suatu energi yang tidak kenal maut dan biasanya mengalahkan prianya. Ia adalah pengemban dendam yang membara yang sampai-sampai ke liang kubur atau dihadapan maut pun masih berani meludah ke muka si 'kaphe' (kafir) ....."[1]

Seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia, di Aceh pun terbentuk Ikatan Pelajar Indonesia Kutaraja, pada pertengahan bulan Mei 1946, dengan susunan pengurus antara lain:

Ketua	:	A.T. Effendi
Wakil Ketua	:	Djanan Zamzani
Sekretaris I	:	A. Wahab Lubis
Sekretaris II	:	Alisah Alamsyah
Bendahara I	:	Teuku Jakob
Bendahara II	:	Cut Kemala Sari[2]

Program jangka pendek Ikatan Pelajar Indonesia (IPI) Kutaraja ialah mengadakan konperensi Ikatan Pelajar Indonesia

Daerah Aceh, yang direncanakan akan diselenggarakan bulan Juli 1946. Untuk itu harus segera dibentuk Ikatan Pelajar Indonesia di kota-kota lain di daerah Aceh, di samping itu juga diadakan kontak-kontak dengan tokoh-tokoh pelajar di kota lain. Dalam rangka mencari dana dan menyemarakkan konperensi IPI tersebut, maka diadakan serangkaian kegiatan antara lain: diselenggarakannya pameran ilmiah, pagelaran konser musik Persatuan Murid Sekolah Menengah Kutaraja dan musik Ikatan Pelajar Indonesia Takeungon, pertunjukan drama, pertandingan sepakbola serta lelang lukisan dari pelukis-pelukis kenamaan dan pelukis dari Ikatan Pelajar Indonesia sendiri yaitu Sombu Pillay.[3]

Dalam rapat persiapan konperensi IPI yang diselenggarakan pada awal bulan Juni 1946, hadir dua orang anggota IPI Pusat yang merupakan utusan dari Kementrian Penerangan dan Kementrian Luar Negeri yaitu Gatot Iskandar dan Suroso. Di samping itu hadir pula utusan dari Persatuan Wanita Indonesia dari Jawa yaitu Maryati. Dalam rapat tersebut berbicara tokoh-tokoh penting di Kutaraja, utusan IPI Pusat, Ketua IPI Kutaraja dan utusan Persatuan Wanita Republik Indonesia.

Pada bulan Juli 1946 diselenggarakan Konperensi Ikatan Pelajar Indonesia Daerah Aceh I. Salah satu hasil konperensi tersebut adalah secara resmi dikukuhkan berdirinya IPI Aceh dengan ketua M. Djanan Zamzami, serta membentuk bagian pertahanan yang dinamakan Dewan Pertahanan Pelajar. Dewan ini kemudian membentuk Kesatuan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP), serta menunjuk Zulkifli Ali sebagai komandannya dan Mahyuddin M, sebagai sekretaris. Nama TRIP disesuaikan dengan nama organisasi Angkatan Perang yang pada waktu itu dikenal dengan Tentara Republik Indonesia Divisi V (kemudian menjadi Divisi Gajah I).

Pembentukan TRIP di Banda Aceh langsung diikuti oleh pembentukan TRIP di kota-kota kabupaten (yang memiliki SMP), sehingga di sekitar bulan April 1947 yaitu menjelang

penggabungan TRIP Divisi Gajah I dan II menjadi Divisi X telah berbentuk batalyon-batalyon:

1. Batalyon I berkedudukan di Kutaraja
2. Batalyon II berkedudukan di Sigli
3. Batalyon III berkedudukan di Langsa
4. Batalyon IV berkedudukan di Takengon.

Di kemudian hari TRIP Aceh juga dilengkapi dengan Batalyon Tentara Pelajar Angkatan Laut Republik Indonesia dan Dewan Keputrian Pertahanan.[4]

Terbentuknya batalyon-batalyon TRIP di kota-kota kabupaten telah memungkinkan para pemuda pelajar langsung berperan dalam kegiatan perjuangan pisik di bidang pertahanan dan keamanan di samping kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang bersifat menunjang. Kecuali beberapa orang bertempur di *Medan Area,* maka sebagian besar dari para pelajar turut serta dalam pengamanan pantai dan instalasi vital bersama kesatuan TRI Divisi X, dan organisasi massa bersenjata lainnya.

Pelaksanaan Doktrin *belajar sambil berjuang dan berjuang sambil belajar* telah memungkinkan mereka untuk berbakti demi perjuangan mempertahankan kemerdekaan di samping tetap berprestasi dalam pelajaran, karena baik pada tahun pelajaran 1946/1947 maupun tahun-tahun pelajaran berikutnya semua ujian akhir dan kenaikan kelas berlangsung secara tertib. Keberhasilan ini justru meningkatkan pertumbuhan minat belajar di kalangan usia belajar maupun pra dan purna belajar sebagai suatu hikmah kemerdekaan yang sebelumnya tidak dimiliki, kalaupun ada masih sangat terbatas.

Sementara para pemuda pelajar aktif dalam kesatuan bersenjata maka sebagian besar pelajar SMP yang belum mencapai usia 15 tahun bersama-sama dengan para pelajar putri dikerahkan kegiatannya pada bidang sosial kemasyarakatan seperti PMI, Kepanduan, Dapur Umum dan tenaga tatausaha pada badan-badan perjuangan di desa-desa.

Kutaraja, di samping sebagai pusat kegiatan pemerintahan juga merupakan pusat kegiatan organisasi pelajar baik yang tergabung dalam kesatuan bersenjata maupun kesatuan organisasi sosial serta kesejahteraan lainnya.

Di awal pembentukannya TRIP masih memiliki ciri-ciri sebagai organisasi intra sekolah, sedangkan latihan serta ketrampilan kemiliteran yang dipelajari masih merupakan suatu kegiatan yang secara formal berbentuk kerjasama dengan TRI Divisi Gajah I. Di samping dari TRI Divisi Gajah I, para kader TRIP juga banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari tokoh-tokoh serta pimpinan Divisi Rencong.

Sesuai dengan instruksi Komandan Tentara Pelajar Divisi Sumatera no. 7/47/BS tertanggal 23 Maret 1947, TRIP Daerah Aceh ditetapkan menjadi Resimen II Divisi Sumatera dan Kutaraja menjadi Pusat Komando yang membawahi Batalyon I di Banda Aceh, Batalyon II di Sigli, Batalyon III di Langsa, Batalyon IV di Takeungon. Selain batalyon-batalyon tersebut, komando Resimen II Divisi X Tentara Pelajar juga membawahi Dewan Keputrian Pertahanan di Banda Aceh serta Kompi Meulaboh Batalyon I, Kompi Tapaktuan Batalyon II dan Kompi Lhok Seumawe Batalyon III. Sebagai komandan Resimen ditunjuk Amir Hamzah Ali.

Peranan TRIP dalam perang kemerdekaan antara lain adalah bersama-sama unsur Tentara Pelajar Islam membentuk Batalyon Tentara Pelajar Angkatan Laut Republik Indonesia, untuk kemudian bergabung dengan ALRI menjaga perairan serta pantai di sepanjang Kruengraya, Ujung Batee, Ulee Lheue dan Lhok Seudu. Penjagaan tersebut dimaksudkan untuk menahan pasukan-pasukan Belanda agar tidak masuk ke wilayah Aceh. Di samping menjaga pantai juga menggerakkan Dewan Keputrian Pertahanan dalam berbagai kegiatan seperti PMI, Dapur Umum, mengajar, mengisi siaran radio, dan kegiatan kepanduan.

Palang Merah Indonesia

Kegiatan kepalang-merahan dibagi menjadi 2 bagian yaitu PPPK dan Kolone Mobil. Bila petugas PPPK hanya menolong orang-orang yang mendapat kecelakaan di tempat atau sekitar tempat tinggalnya, maka anggota kolone mobil harus segera ke rumah sakit bila sirine berbunyi. Mereka harus segera siap diberangkatkan dan dikirim ke mana saja. Ada pun anggota-anggota kolone mobil antara lain adalah: Subeha, Almeidar Alamsjah, Trees Hasibuan, Artini Suratno, Sri Karis, Yurmeini, Mariamah, Rusni, Saerah dan Syamsiah Daulay. Sedangkan anggota PPPK antara lain adalah: Saidah, Rohani, Cut Rahmah, Hamnah, dan Hidupiah. Sebagai pelatih dan pembina mereka adalah Rohanah Jamil, dr. Mahyudin, dr. Midi, R. Saleh, dan dr. Ratumbuisang.

Dapur Umum

Kegiatan lain yang dilakukan oleh kaum wanita adalah membentuk dapur-dapur umum di rumah masing-masing. Ketika para pejuang meninggalkan rumahnya menuju daerah pertempuran, maka kaum wanitanya pun mulai membagi tugas masing-masing, kaum ibu rumah tangga dengan segala daya yang ada berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangganya selama ditinggal berjuang, sedangkan remaja putrinya secara bersama-sama pergi mencari bahan-bahan makanan untuk keperluan dapur umum dan kemudian dikirim ke daerah pertempuran di Bukit Kubu.

Mengajar

Seperti telah diuraikan di atas bahwa Aceh tidak mengalami revolusi pisik, maka keadaan daerahnya pun dapat dikatakan normal, meskipun harus selalu waspada. Melihat kenyataan ini, Tentara Pelajar menyadari bahwa usaha mencerdaskan bangsa merupakan salah satu tugas suci untuk mengisi kemerdekaan. Proses pendidikan dan pengajaran ini harus terus dilang-

sungkan meskipun negara dalam keadaan perang. Kader-kader bangsa yang cerdas harus terus tumbuh dan berkembang. Jika para pelajar tingkat Sekolah Menengah meninggalkan bangku sekolah karena terlibat dalam Perang Kemerdekaan, maka mereka yang masih ditingkat Sekolah Rendah harus tetap mendapat pendidikan. Dalam kaitan itulah Tentara Pelajar memberikan tugas kepada Dewan Keputrian Pertahanan untuk mengatur sebagian dari anggotanya, agar bertugas sebagai guru sukarela.

Kegiatan Kepanduan

Latihan Kepanduan dinilai banyak membantu menanamkan rasa disiplin, melatih kemampuan intelijen dan perkembangan pisik, serta semangat, watak-watak keperwiraan dan cinta tanah air. Karena itu kegiatan kepanduan tidak luput dari perhatian para pelajar putri.

Di samping TRIP, ada juga organisasi-organisasi lain seperti Tentara Pelajar Islam (TPI), Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI), PESINDO dan lain sebagainya. Kegiatan para pelajar putri di TPI tidak jauh berbeda dengan rekan-rekannya di TRIP. Mereka juga aktif di dapur umum yang dipusatkan di Jl. Ahmad Yani Banda Aceh (bekas gedung sekolah HIS Katolik), juga di Simpang lima. Mereka menyediakan makanan untuk para pejuang di daerah perbatasan Aceh-Sumatera Timur yang dikenal dengan nama Bukit Kubu.

Kegiatan lain dari remaja-remaja putri di TPI adalah melakukan dakwah atau penerangan ke desa-desa dalam rangka kemerdekaan Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Tengku Haji Ainal Mardiah Ali dan Rohana Hasyim. Mereka juga melakukan latihan PPPK, yaitu bagaimana cara balut-membalut, menolong yang pingsan dan lain sebagainya. Semuanya itu mereka lakukan untuk persiapan sewaktu-waktu Belanda menyerang Aceh.[5] Mereka juga melakukan latihan baris-berbaris.

Bagi remaja putri yang tergabung dalam lasykar putri PESINDO, mereka juga mengadakan latihan kemiliteran, yang

latihannya diberikan oleh kaum pria. Latihan kemiliteran dipusatkan di rumah Haji Daud Dariah. Pimpinan lasykar putri PESINDO adalah Cut Mariam, dan Cut Misran sebagai wakilnya.[6] Mereka diajarkan juga cara balut-membalut, mengangkat tandu. Dalam rangka dapur umum, di samping masak-memasak di antara mereka ada yang bertugas sebagai pengumpul bahan makanan. Bahan makanan dikumpulkan dari rumah-rumah penduduk dan kemudian bahan-bahan tersebut dimasak untuk dikirimkan ke front pertempuran.

Peranan wanita Aceh yang lain yang tak kalah pentingnya di masa perjuangan tersebut adalah mereka secara sukarela dan spontan membantu mencarikan dana untuk pembelian pesawat udara Dakota. Dana itu mereka kumpulkan dengan cara menyerahkan perhiasan dan barang-barang berharga lainnya yang mereka miliki. Hal tersebut bermula dari kunjungan Presiden Sukarno ke Kutaraja, dalam kesempatan itu, di hadapan ribuan rakyat Aceh yang tengah menghadiri rapat raksasa, Presiden menyinggung masalah diperlukannya sejumlah dana untuk pembelian pesawat dakota, mengingat Republik Indonesia pada waktu itu masih dalam cengkeraman Belanda dan sulitnya komunikasi antar pulau di Indonesia, serta hubungan ke luar, dan hubungan dengan peningkatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, khususnya Angkatan Udara.

Kemudian dalam pertemuan dengan GASIDA (Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh) bertempat di Aceh Hotel Kutaraja, Presiden selain membicarakan berbagai hal sehubungan dengan situasi negara pada waktu itu juga pada kesempatan itu Presiden telah mengusulkan kepada pihak GASIDA apakah mereka sanggup menyediakan sebuah pesawat terbang Dakota (bekas pakai) yang berharga 120.000 dollar Malaya atau sekitar 25 kg emas. Menjelang akhir pertemuan itu, Presiden mengatakan tidak akan mau makan sebelum mendengar jawaban dari GASIDA ya atau tidak, atas usul tersebut. Ketua GASIDA, M. Djuned Yusuf beserta H. Zainuddin dan sesepuh GASIDA lain-

nya yang hadir dalam pertemuan itu, mengisyaratkan kepada T.M. Ali Panglima Polem (selaku juru bicara) bahwa mereka menerima usul Presiden tersebut. Selanjutnya GASIDA membentuk suatu panitia (untuk pelaksanaan pembelian pesawat) yang diketuai oleh T.M. Ali Panglima Polem. Dan berdasarkan pembicaraan dengan Residen Aceh, kemudian diputuskan bahwa Aceh akan membeli dua pesawat terbang dakota, yang satu atas nama GASIDA dan yang satu lagi atas nama seluruh rakyat Aceh.

Pada bulan Agustus 1948, T.M. Ali Panglima Polem selaku Ketua Panitia pembelian pesawat tersebut, menerima sebuah surat dari Residen Aceh beserta sebuah telegram yang bertanggal 23 Agustus 1948, dengan nomor 3470/KSU/48 dan Nomor 3461/KSU/48, yang berasal dari Kepala Staf Angkatan Udara Komandemen Sumatera di Bukit Tinggi, Soejono. Isi telegram tersebut menyebutkan bahwa cek sebesar 120.000 dan 140.000 M.$, telah diterima dan telah diteruskan ke Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia, Komodor Suryadharma. Komodor Udara Suryadharma selaku Kepala Staf, mengucapkan banyak terimakasih kepada rakyat Aceh atas bantuannya itu. Kedua pesawat yang dibeli dengan uang atau sumbangan rakyat Aceh tersebut masing-masing diberi nama Seulawah I dan Seulawah II.[7]

Tengku H. Ainal Mardhiah sebagai tokoh wanita di Aceh

Tengku H. Ainal Mardhiah sejak masa mudanya telah berkecimpung dalam berbagai perjuangan. Di antara gerakan-gerakan yang diikutinya antara lain adalah: Gerakan Pemuda, tahun 1938. Gerakan ini bercita-cita agar Indonesia Merdeka. Dalam gerakan tersebut ia menjabat sebagai Ketua I bagian keputrian. Pada mulanya organisasi itu bernama SEPIA (Serikat Pemuda Islam Aceh). Pada tahun 1945, ia menjadi anggota Dapur Umum Divisi Rencong. Ia ikut serta mempersiapkan kebutuhan makanan bagi anggota pasukan divisi tersebut.

Pada tahun 1947 ia menjadi ketua GAPIDA-Putri (Gabungan Pelajar Islam Daerah Aceh), Pada tahun 1947–1950, ia menjadi anggota Tentara Pelajar Islam, dan kemudian tahun 1948–1950 ia menjadi ketua Keputrian PII Daerah Aceh. Pada tahun itu pula ia pernah menjadi wakil ketua muslimat masyarakat Daerah Aceh, yang bergerak dalam bidang pendidikan dan politik. Sebagai wakil ketua dari organisasi tersebut, ia pada tahun 1949 ikut menghadiri Konggres Wanita II di Jakarta.

Pada tahun 1950, ia dipercaya untuk memegang jabatan sebagai wakil ketua muslimat PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh), daerah Aceh. Pada tahun itu pula ia mengikuti Konggres PII di Bandung. Selanjutnya, pada tahun 1960 ia mengikuti konggres Wanita di Jakarta dan menjadi anggota peninjau dalam KIAA, di Bandung. Ia juga menjabat ketua seksi penghubung PIV dan KA (Persatuan Istri-Istri Veteran dan Karyawati), dan akhirnya sejak tahun 1957 sampai sekarang ia menjabat sebagai pengawas Asrama Putri Islam Cut Meutia.

Sejak lama ia memang bertekad untuk memajukan pendidikan para wanita di Aceh, yang dinilainya ketinggalan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya sarana untuk menampung cita-cita mereka, dalam rangka memperoleh pendidikan yang wajar. Atas dasar tekad itulah maka dengan mengerahkan seluruh dana dan daya yang ada, Tengku H. Ainal Mardhiah mewujudkan rencana pembangunan lembaga pendidikan Cut Meutia.

Dalam hal perlunya pendidikan bagi kaum wanita, Dr. Ny. TO. Ihromi mengemukakan beberapa alasan tentang perlunya para wanita mendapat pendidikan yaitu:

1. Hal itu terbuka jalan bagi pendidikan anak yang direncanakan dan dilakukan secara sadar;
2. Hal itu memperkembangkan sifat-sifat hemat, rapi dan teratur dalam rumah tangga dan turut pula membantu untuk mengurangi kecenderungan beranak banyak;

3. Hal itu mengurangi kematian dan penyakit di kalangan rakyat, karena wanita yang terdidik mau menerima pengertian kebersihan;
4. Hal itu membuat hidup lebih nikmat dan membuat kaum pria yang maju lebih merasa kerasan di rumah;
5. Hal itu membuka jalan bagi kaum wanita untuk ikut serta dalam kemasyarakatan dengan menduduki berbagai jabatan.[8]

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka yang pertama kali harus disediakan adalah lembaga pendidikan dalam bentuk sekolah yang merupakan wadah pelaksanaan kegiatan dalam bidang pendidikan.

Tengku H. Ainal Mardhiah telah mewujudkan hal itu, yaitu dengan didirikannya Asrama Putri Islam Cut Meutia pada tahun 1953, yang kemudian dilembagakan setelah didirikannya gedung-gedung pendidikan lainnya seperti SPG (tahun 1963), T.K. Cut Meutia dan SMA Cut Meutia. Lembaga Pendidikan Cut Meutia lahir dengan tujuan ingin bekerja sama dengan pemerintah dalam bidang pendidikan, membina mental bagi terciptanya kesejahteraan lahir dan bathin bangsa Indonesia. Dengan adanya lembaga ini maka dapat diharapkan bahwa lembaga ini akan dapat mencetak kader-kader masyarakat yang berdedikasi, sejajar dengan pendidikan lembaga-lembaga pendidikan lainnya.

B. SULAWESI UTARA

Berita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 tidak segera diterima oleh rakyat Sulawesi Utara. Akan tetapi melalui para petugas orang Indonesia yang dipekerjakan dibidang komunikasi, berita dari Jakarta itu dapat tertangkap juga. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika salah seorang petugas yaitu A.S. Rombot sedang memonitor berita-berita Domei dari Tokyo, terdengar berita tentang Proklamasi Kemerdekaan yang sudah disebarkan ke seluruh dunia. Seperti biasanya, berita-

berita itu tidak diperoleh langsung dari Jakarta, tetapi dari Australia.[9]

Pada umumnya rakyat Sulawesi Utara tidak cepat mendengar tentang berita Proklamasi Kemerdekaan itu.

Hanya orang-orang Jepang dan para petugas yang terbatas jumlahnya. Lebih-lebih karena terbatasnya sarana jaringan komunikasi, telah lebih menghambat penyebaran berita pada masa itu. Di Minahasa, A.S. Rombot segera menghubungi W.F. Sumanti yang menjadi Komandan (Daidanco) Boo Ei Teisintai di Tondano. Keduanya kemudian menghubungi para tokoh nasionalis, di antaranya Kusno Dhanupojo; Dr. R.C.W. Senduk dan G.E. Dauhan. Ketiga tokoh ini yang menjadi anggota PPPKI kemudian mengadakan pembicaraan dengan para anggota yang lain. Hasilnya dicapai kesepakatan menunjuk 3 orang wakil rakyat Sulawesi Utara untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang. Ketiga wakil rakyat itu ialah E.H.W. Palengkahu, Zus Kandou dan Ch.D. Pontoh yang masing-masing mewakili golongan pamongpraja, golongan wanita, dan golongan pemuda. Dengan dipilihnya Zus Kandou menunjukkan bahwa kaum wanita memperoleh pengakuan bahwa peranannya dalam masyarakat tidak dapat diabaikan.

Kemudian pada tanggal 21 Agustus 1945 secara simbolis diadakan upacara penyerahan pemerintahan sipil dari penguasa Jepang kepada wakil-wakil rakyat Minahasa. Upacara yang dihadiri oleh massa rakyat di Tondano ini berlangsung dengan pengibaran bendera Merah Putih dan penurunan bendera Hinomaru. Rakyat menyambut peristiwa ini dengan pawai yang menunjukkan luapan perasaan kebahagiaan dan kegembiraan; namun penyerahan kekuasaan itu belum disertai dengan sarana pendukungnya yang memungkinkan orang Indonesia menjalankan pemerintahan sendiri. Akan tetapi paling tidak kejadian itu telah mendorong rakyat di Minahasa, pada khususnya, untuk terus mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai.[10]

Pada tanggal 23 Agustus 1945 diadakan lagi upacara pembentukan Pasukan Pembela Tanah Air (PTA) yang berkewajiban, menjaga keamanan dan mendukung pemerintah. Upacara ini juga diadakan di Tondano di bawah pimpinan Letkol. Takasaki atas nama Komandan Pasukan Pendudukan Jepang. Yang diangkat sebagai komandan PTA adalah P.A. Tiendas. Dengan pembentukan PTA ini maka Boo Ei Teisintai, yaitu organisasi pemuda semi militer yang dipimpin oleh W.F. Sumanti dinyatakan bubar dan melebur ke dalam PTA.

Bersamaan dengan itu di Tondano dibentuk sebuah Akademi Militer dibawah W.F. Sumanti yang bertugas melatih para perwira Pembela Tanah Air. Tidak sedikit tokoh nasionalis yang menjadi pengajar pada Akademi Militer tersebut, seperti G.E. Dauhan, dr. R.CL. Senduk dan lain-lainnya. Dengan demikian semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan membela tanah air dapat terus dikembangkan. Akan tetapi umur Akademi Militer dan Pembela Tanah Air tidak panjang karena Laksamana Muda K. Hamanaka mendapat perintah dari Panglima Sekutu agar Jepang mempertahankan status-quo walaupun sudah menyerah kepada Sekutu.

Di Gorontalo penyerahan kekuasaan Jepang kepada Indonesia berlangsung pada tanggal 9 September 1945. Pihak Indonesia diwakili oleh tokoh pejuang Nani Wartabone. Ia kemudian membentuk suatu lembaga pemerintahan yang disebut Dewan Nasional yang beranggotakan para pemuka masyarakat Gorontalo. Para wakil rakyat Gorontalo mengeluarkan pernyataan tetap setia kepada Negara Republik Indonesia yang baru diproklamasikan. Keadaan yang agak berbeda terjadi di Bolaang Mangondow di mana Jepang merahasiakan kekalahannya, sehingga tidak ada upacara serah terima kekuasaan. Namun rakyat akhirnya dapat mengetahui kekalahan Jepang itu. Pada pertengahan bulan September 1945 datang utusan dari Markas Besar Pasukan Pemuda Indonesia (PPI) di Tondano menemui J.F.K. Damopolii di Kotamobagu. Para utusan itu mengemukakan

tentang apa yang sudah terjadi di Minahasa. Maka pada tanggal 17 September 1945 dibentuklah PPI Komisariat Bolaang Mongondow dengan nama PPI Lasykar Banteng

Pasukan Pemuda Indonesia (PPI) sebenarnya sudah dibentuk pada waktu kedudukan Jepang mulai terdesak oleh Sekutu. Untuk mempertahankan diri maka penguasa Jepang mengundang tokoh-tokoh pemuda untuk merundingkan tentang cara-cara membela tanah air dan mempertahankan diri dari serangan musuh. Maka pada tanggal 12 Februari 1945 lahir kesepakatan akan membentuk suatu wadah di mana para pemuda akan memperoleh latihan-latihan kemiliteran yang diperlukan. Barisan-barisan atau kesatuan-kesatuan pemuda yang telah ada, seperti Seinandan, Keibodan, Kaigun Heiho dan lain-lainnya akan dilebur ke dalam PPI.

Akan tetapi rencana ini belum terlaksana sampai kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Demikianlah akhirnya PPI ini mulai berperan ketika tiba saatnya untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan tanah air.

Bahaya yang mengancam kemerdekaan yang baru dicapai itu tidak lama kemudian datang berupa pendaratan pasukan Sekutu pada tanggal 5 September 1945. Sebuah delegasi Sekutu di bawah pimpinan Letkol. Muir dari Australia tiba di pelabuhan Manado.

Maksud kedatangannya adalah untuk merundingkan pelaksanaan peralihan kekuasaan dari Jepang kepada Sekutu dan untuk mengawasi para tawanan perang serta menawan para prajurit Jepang.[11] Untuk pelaksanaan tugas itu kemudian datang berangsur-angsur pasukan Sekutu, khususnya dari Australia. Di dalam pasukan Australia yang datang itu ikut serta pasukan-pasukan Belanda beserta aparat pemerintahan Sipil yang tergabung dalam NICA (Netherlands Indies Civil Administration). Sampai akhir bulan Oktober 1945 NICA disebut CONICA (Command of Netherlands Indies Civil Administration) dan pada pertengahan tahun 1946 diganti dengan sebutan Residen.

Dengan demikian jelaslah bahwa pemerintahan Hindia Belanda telah dikembalikan kedudukannya seperti sebelum perang.[1 2] Sejalan dengan itu Belanda segera mengkonsolidasi kekuasaannya dan mengembalikan kekuatannya antara lain dengan menghimpun orang-orang yang masih setia atau yang ditahan oleh Jepang karena membantu Belanda.

Selain dari itu Belanda juga mulai menjalankan politik kolonialnya lagi. Rakyat dilarang mengibarkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua senjata yang ada di tangan rakyat harus diserahkan kepada Sekutu karena mereka yang berkewajiban menjaga keamanan dan ketenteraman. Rakyat yang dicurigai atau dianggap berbahaya ditangkap atau dianiaya. Dengan demikian kaum pejuang menyadari bahwa segala jalan harus ditempuh untuk menentang kekuasaan Belanda yang membahayakan kemerdekaan.

Menyadari tentang hal ini, penduduk Sulawesi Utara tidaklah tinggal diam saja. Semangat mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Tanah Airnya semakin berkobar. Seperti kaum nasionalis di tempat lain, mereka tidak rela bangsa dan negaranya kembali ke alam penjajahan. Lebih-lebih karena mereka di masa kekuasaan Jepang sudah digembleng semangatnya untuk membela Tanah Airnya. Demikian juga halnya dengan kaum wanitanya yang mau tidak mau ikut terseret arus keadaan pada waktu itu. Mereka yang tadinya hanya berperan dalam lingkungan rumah tangga dan keluarganya saja, oleh Jepang dikerahkan untuk terjun ke dalam kegiatan kemasyarakatan. Dalam Fujinkai misalnya, walaupun mereka tidak dipersiapkan untuk maju ke medan pertempuran, mereka disadarkan akan kewajiban sebagai warga untuk turut aktif menunjang usaha perang Jepang. Tidak hanya mengumpulkan bahan makanan, akan tetapi juga dilatih untuk menghadapi bahaya, seperti tugas dapur umum atau perawatan korban. Dengan demikian dimensi baru telah terbuka bagi kaum wanita, khususnya di Sulawesi Utara yang memang pada umumnya mereka itu sudah mempunyai kesempatan yang besar dalam kehidupan kemasyarakatan.

Keadaan Sulawesi Utara berbeda dengan Jawa ketika menghadapi kedatangan kembali kekuasaan Belanda. Tidak seperti di Jawa, di Sulawesi Utara tidak meletus pertempuran-pertempuran yang besar. Walaupun demikian tidaklah berarti bahwa rakyat atau para pejuang tidak bersemangat dalam menghadapi musuh. Gema semangat perjuangan bangsa Indonesia di daerah-daerah lain telah mendorong semangat juang putra-putri Sulawesi Utara. Lebih-lebih bila diingat bahwa wilayah Minahasa terkenal dengan sebutan Twapro *(Twaalfde Provincie)* yaitu dianggap sebagai propinsi Negeri Belanda yang ke-dua belas, sehingga tidak sedikit terdapat orang yang setia kepada negeri Belanda. Mereka ini menghendaki Belanda kembali berkuasa. Pertentangan antara pihak yang mempertahankan kemerdekaan dengan pihak yang hendak berkuasa kembali, tidaklah dapat dihindari. Dalam keadaan seperti ini kaum nasionalis Sulawesi Utara berupaya untuk bersatu menghadapi ancaman bahaya yang datang.

Walaupun di Sulawesi Utara tidak berkobar pertempuran yang besar dan hebat, banyak kaum wanita yang ikut aktif dalam pasukan-pasukan atau kelasykaran yang dibentuk untuk mempertahankan diri. Pada umumnya kaum wanita itu bergabung dalam pasukan yang ada dan tidak membentuk pasukan tersendiri, kecuali di Bolaang Mongondow. Di wilayah ini PPI membentuk Lasykar Banteng khusus untuk wanita.

Tugas dan kegiatan wanita dalam pasukan itu bermacam-macam. Ada yang menjadi penghubung, mengurus keuangan, bahkan mencari senjata dan lain-lainnya. Yang umum dilakukan adalah mengatur perbekalan dan logistik dalam dapur umum serta tugas kepalang merahan, yaitu merawat dan mengobati pejuang dan rakyat yang memerlukannya.

Bila mengingat keadaan pada masa itu, bukanlah hal yang ringan untuk mencari perbekalan bagi pasukan yang berjuang. Seperti obat-obatan sangat sukar diperoleh karena blokade Belanda. Mereka harus berani menerobos blokade dan

pertahanan Belanda. Misalnya yang dialami oleh Nona Gusta Ngantung, salah seorang anggota lasykar yang berani dan aktif. Dengan beberapa rekannya yang pria, Gusta mendapat tugas untuk menghubungi seorang pelaut Australia yang hendak menukar senjata dengan emas. Tempatnya disepakati di suatu tempat di pantai Tondano. Peristiwa yang terjadi pada bulan Juni 1947 ini menemui kegagalan karena kepergok oleh Belanda. Akibatnya Gusta Ngantung dan kawan-kawannya tertangkap. Gusta Ngantung sendiri adalah salah seorang tokoh pendiri LRRI (Lasykar Rakyat Republik Indonesia).

Ketika pasukan Australia pada akhir tahun 1945 meninggalkan wilayah Sulawesi Utara, seluruh tugas pengawasan di daerah itu sepenuhnya berada di tangan pasukan Belanda dengan NICA-nya. Sejalan dengan itu kaum pejuang Republik Indonesia semakin memperkuat diri. BPNI dan PPI bersatu menggalang kekuatan dengan jalan membentuk sektor-sektor di seluruh Sulawesi Utara. Dalam pasukan-pasukan itu bergabung kaum wanita yang turut bertugas baik di garis depan maupun di garis belakang. Yang terkenal giat di garis depan di antaranya adalah Nona Gusta Ngantung yang tergabung dalam sektor Airmadidi bersama-sama B. Wenas, V. Mandey, David Sompie, dan lain-lainnya.[13]

Untuk barisan belakang dan kepalang merahan di daerah Manado dipimpin oleh Maas Tangkilisan dengan dibantu oleh Trees Rahasia, Roos Hermanses, Adel Rahasia dan Ida Pantouw.[14]

Sedangkan untuk daerah Tondano dipegang oleh Emma Raturambi, Wuli Supit, Jet Pangalila, Niece Pantouw dan Noce Kumaunang; Daerah Tomohon ditangani oleh Stans Siwy dan Gusta Ngantung.[15] Jadi dalam suasana genting di mana perang sewaktu-waktu dapat meletus, rakyat Sulawesi Utara yang setia kepada Republik Indonesia telah bersiap sedia.[16]

Keadaan di Bolaang Mongondow agak berbeda dari pada di Minahasa dan Gorontalo. Ketika PPI dibentuk di Minahasa de-

ngan markas besar di Tondano, dikirim dua orang pemuda untuk membicarakan tentang usaha pertahanan kemerdekaan. J.F.K. Damopolii kepala daerah Bolaang Mongondow dan istrinya yang bernama Nurtina Gonibala segera menyatakan setuju pada usul pembentukan komisariat PPI di Bolaang Mongondow, karena kedua tokoh daerah tersebut merupakan pendukung Republik Indonesia. Dibentuklah sebuah komisariat dengan susunan sebagai berikut:[17]

Ketua Komisariat	:	J.F.K. Damopolii
Sekretaris	:	Nurtina Gonibala alias Ny. Damopolii
Anggota-anggota	:	Abdurrachman Mokobombang
		S.A. Mokobombang
		L. Mokobombang
		A.H. Roupu
		S. Daun
		A. Atom
		M.S. Detu.

J.F.K. Damopolii sebagai ketua komisariat PPI segera mengerahkan penduduk untuk bergabung dalam barisan kelasykaran yang disebut PPI Lasykar Banteng. Yang diangkat sebagai komandan Lasykar Banteng ini adalah Abdurachman Mokobombang.[18] Tidak sedikit para pemuda dan pemudi Bolaang Mongondow yang memenuhi seruan Damopolii dan mendaftarkan diri. Pusatnya ada di Molinow, dekat Kotamobagu. Mereka yang memasuki PPI pada umumnya adalah kaum muda yang pernah memperoleh pendidikan semangat kebangsaan dari tokoh-tokoh PSII setempat. Tidak sedikit kaum pemudi yang tadinya adalah anggota pandu putri PSII (SIAP = Sarekat Islam Afdeeling Pandoe) yang dipimpin oleh Hasinah Mokobombang. Dengan demikian kaum pemudi yang juga merupakan siswa-siswa HIS (Hollands Islamitsche School) dan sekolah-sekolah lain yang dikelola oleh yayasan H.O.S. Tjokroaminoto merupakan salah satu pelopor perjuangan kaum wanita di Sulawesi Utara.[19]

Nyonya Damopolii alias Nurtina Gonibala tidak dapat tinggal diam. Dia pun segera merekrut kaum wanita di sekitarnya dan membentuk pasukan Lasykar Banteng Kompi Wanita dan dia juga yang menjadi komandannya. Persenjataan mereka pada umumnya sangat terbatas dan sederhana, yaitu bambu runcing dan beberapa senjata tajam yang mereka miliki. Beberapa pucuk senjata api dan granat yang diperoleh dari Jepang dipegang oleh anggota Lasykar Banteng pria.[20] Walaupun persenjataan mereka sangat terbatas, baik anggota pria maupun wanitanya dengan penuh semangat giat berlatih menggunakan senjata. Sejak bulan September 1945 latihan-latihan diadakan di desa Molinow dekat Kotamobagu. Para pelatih mereka adalah bekas anggota Heiho, Keibodan dan lain-lainnya, yang pernah mendapat latihan kemiliteran dari Jepang.

Karena kegiatan-kegiatannya yang dianggap mengancam kekuasaannya, J.F.K: Damopolii pada tanggal 27 September 1945 ditangkap oleh Belanda dan ditahan di Manado. Maka sejak itu pimpinan Lasykar Banteng untuk sementara diambil alih oleh istrinya, Nurtina Gonibala. Latihan-latihan diteruskan dengan tujuan mendesak Belanda di Bolaang Mongondow dan menegakkan kekuasaan Republik Indonesia.

Kaum pejuang Bolaang Mongondow pada umumnya, dan khususnya anggota Lasykar Banteng, tidak hanya giat berlatih kemiliteran akan tetapi juga giat mengadakan gangguan pada pasukan-pasukan Belanda yang lewat di daerah itu dan mengadakan sabotase, antara lain memutuskan kawat-kawat telepon. Mengetahui hal itu, maka Belanda mengadakan pembersihan dengan menangkapi orang-orang yang dicurigai. Di antara yang berhasil ditangkap adalah Nurtina Gonibala sendiri; Hatidah Mokobombang yang menjadi ketua Onder Departemen Wanita PSII, Bolaang Mongondow; Agus Sukarni, salah seorang pelatih PPI Lasykar Banteng; Abdurrachman Mokobombang, Komandan Lasykar Banteng dan lain-lainnya.[21] Mereka semua dimasukkan ke dalam penjara di Kotamobagu dan ditahan selama

tiga bulan. Dalam hal ini Nurtina Gonibala dikecualikan dan dia ditahan di Manado.[22]

Walaupun para pimpinannya ditangkap Belanda, pasukan Lasykar Banteng tidak membubarkan diri. Mereka memindahkan pusat latihannya ke perkebunan Tandyan di luar desa Molinow, kira-kira 15 Km dari Kotamobagu. Selain sebagai tempat latihan, di Tanoyan juga didirikan dapur umum yang bertugas untuk menyediakan makanan dan logistik bagi pasukan yang dilatih serta anggota-anggota pasukan gerilya yang selesai bertugas penghadangan atau sabotase. Pasukan Belanda sering mengadakan patroli di jalan-jalan yang penting seperti jalan-jalan antara Inokonto – Kotamobagu – Molibagu dan jalan-jalan di pantai utara.

Dapur umum itu memperoleh bahan makanan dari penduduk setempat yang pada umumnya bersimpati kepada perjuangan pasukan Lasykar Banteng. Pengurus dapur umum ini adalah Hatidah Mokobombang (setelah dibebaskan dari tahanan) dan Gilly Mokobombang.[23]

Ketika Belanda mengetahui bahwa rakyat banyak memberi bantuan kepada pasukan Lasykar Banteng, maka Belanda mengeluarkan peraturan-peraturan yang keras dan pengawasan yang ketat untuk membatasi kegiatan rakyat membantu para pejuang. Karena hambatan-hambatan itu, rakyat memberi ijin kepada para anggota lasykar untuk mengambil saja hasil kebun yang diperlukan, seperti jagung, padi, pisang dan lain-lainnya. Memang hasil kebun di Bolaang Mongondow melimpah, karena tanahnya yang subur.[24]

Bantuan rakyat kepada pasukan gerilya dari Lasykar Banteng tidak hanya terbatas pada bahan makanan saja. Walaupun sukar diperoleh, bahan-bahan lain yang diperlukan selalu diusahakan oleh rakyat, seperti garam dan obat-obatan. Di samping itu rakyat juga banyak membantu lasykar dengan memberikan informasi tentang kekuatan serta gerak-gerik pasukan musuh. Dari sikap dan tindakan rakyat ini jelaslah bahwa rakyat

Bolaang Mongondow menolak kedatangan kekuasaan Belanda di daerahnya.

Keadaan di Gorontalo tidak jauh berbeda dari keadaan di Bolaang Mongondow. Sejak Nani Wartabone pada bulan September menerima kekuasaan pemerintahan dari tangan Jepang, ia segera mengaktifkan kembali kaum pemuda di daerahnya. Dibentuklah beberapa pasukan di antaranya Pasukan Keamanan Rakyat (PKR) dan Tentara Indonesia Merdeka (TIM). Para anggota pasukan ini pun selalu giat berlatih. Senjata-senjata mereka peroleh dari Jepang ditambah dengan macam-macam senjata yang mereka punyai, seperti lembing, keris, pedang, dan tentu saja bambu runcing.[25]

Seperti halnya di tempat-tempat lain, rakyat juga bangkit kesadarannya bahwa para pemuda itu berjuang untuk membela kemerdekaan dan menjaga keamanan. Mereka selalu menyediakan keperluan hidup pasukan-pasukan itu berupa perbekalan dan bahan-makanan serta obat-obatan. Sudah barang tentu kaum wanita Gorontalo juga tidak mau tinggal diam. Di antara pejuang-pejuang wanita dari Gorontalo yang terkenal adalah Zus Wartabone (Boki), Eki Nesin, Fin Bijai, Ni Kok Tien, Kusnah Manguntjeh, Salama Djafara dan Saerah Abas.[26]

Yang tidak kurang pentingnya peranan kaum wanita adalah di bidang pendidikan. Mereka menyadari bahwa pendidikan dapat memberi pengaruh yang besar terhadap pembinaan semangat perjuangan dan kebangsaan.

Salah satu contohnya adalah yang dilakukan oleh kaum wanita pejuang di daerah Tondano. Pada bulan November 1945 beberapa orang nasionalis mendirikan sebuah yayasan yang disebut *Yayasan Pendidikan Bangsa.* Di antara tokoh-tokohnya adalah Engel A. Parengkuan dan D.H.A.A. Kawilarang, yayasan ini mendirikan Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan (SMRK) yang selain memberi pelajaran yang bersifat umum, seperti yang disyaratkan oleh Inspeksi Pengajaran NICA, juga diajarkan pembinaan semangat kemerdekaan dan kebangsaan, walaupun

secara tidak terang-terangan. Di antara para pengajarnya adalah Ny. Senduk-Kaligis; Ny. Adam dan Ny. A. Muntu.[27]

Sama halnya seperti bidang pendidikan yang bergerak secara terang-terangan adalah usaha golongan yang pro Republik Indonesia untuk merebut pengaruh di bidang politik dan pemerintahan. Pada tahun 1947 Dewan Minahasa diaktifkan lagi oleh NICA. Tugasnya antara lain adalah untuk menyalurkan hasrat rakyat dan memperjuangkan kepentingannya kepada pejabat yang berwenang. Golongan yang pro Republik Indonesia yaitu KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sosialis), BNI (Barisan Nasional Indonesia) dan Partai Katolik berusaha keras untuk merebut kursi dalam dewan tersebut agar dapat menghadapi kelompok-kelompok yang pro-Belanda atau yang menghendaki negara federal. Dewan Minahasa ini berkedudukan di Manado yang sejak waktu itu merupakan ibu kota Minahasa. Sebagai ibu kota, Manado diperintah oleh seorang Walikota dan antara tahun 1949–1951 yang diangkat sebagai walikota adalah Ny. Anie M. Waworuntu, salah seorang tokoh wanita pada masa itu. Nampaklah di sini bahwa kepercayaan yang besar telah diberikan kepada seorang wanita untuk memimpin sebuah pemerintahan di masa yang tidak damai itu.

Di daerah yang terpencil Sangir-Talaud, di masa perjuangan ini kaum wanita juga tidak mau ketinggalan mengabdikan dirinya dalam upaya mempertahankan kedaulatan negerinya. Pada bulan Oktober 1945 dibentuk Partai Rakyat Indonesia (PARI) yang bertujuan tetap mempertahankan status wilayah Sangir-Talaud sebagai daerah Republik Indonesia di bawah pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Dalam usahanya ini kaum wanita juga menyatukan diri dan membentuk satu organisasi yang dinamakan PERWANIS (Persatuan Wanita Indonesia Siau). Susunan pengurusnya adalah sebagai berikut:

Pengawas Umum	:	Ny. F. Pasandaran-Lalisang
Ketua	:	Ny. Nona Mohede

Panitera	:	Ny. A. Elias-Panguliman
Bendahara	:	Ny. K. Paparang-Rindu
Anggota-anggota	:	Ny. K. Bawoleh, Nona Theodora Tamaka dan Nona Adelaide Sebentar.

Demikianlah gambaran secara umum peranan dan kegiatan kaum wanita di Sulawesi Utara yang baru sedikit terekam oleh sumber-sumber sejarah. Masih banyak yang belum tercatat dan terungkapkan. Lebih-lebih peranan kaum wanita Sulawesi Utara yang berada di luar wilayah itu, seperti di Jawa, Sumatera dan lain-lainnya.

C. SULAWESI SELATAN.

Berbicara tentang Peranan Wanita Sulawesi Selatan di masa Perang Kemerdekaan tahun 1945–1950, sebagai pengantar, kami ingin menggambarkan selintas situasi Sulawesi sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 secara umum.

Dengan tercapainya proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke menyambut dengan perasaan gembira dan bersyukur bahwa cita-cita bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa asing, akhirnya tercapai. Seluruh rakyat Indonesia termasuk rakyat Sulawesi bersatu dan bertekad untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan negaranya. Walaupun saat itu pemerintah Jepang berusaha menutupi kenyataan itu, namun berita tentang Proklamasi 17 Agustus 1945 tersiar dan terdengar oleh Rakyat Sulawesi Selatan. Hal ini dapat dimaklumi karena pada saat-saat sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, beberapa orang wakil dari daerah-daerah dipanggil ke Jakarta dan Sulawesi mengirimkan tiga orang pemimpinnya yaitu:

1. Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi,
2. Andi Sultan Daeng Raja,
3. Andi Pangerang Daeng Rani.

Ketiga orang tokoh wakil dari Sulawesi ini betul-betul menyaksikan dan menghayati saat-saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Kita ketahui bahwa pada akhirnya DR. G.S.S.J. Ratulangi ditetapkan sebagai Gubernur Sulawesi yang pertama dan berkedudukan di kota Makasar, Ujung Pandang sekarang.

Sekembalinya ketiga orang tokoh pemimpin itu ke kota Makasar, maka disusunlah pemerintahan nasional Propinsi Sulawesi. Pada waktu itu seluruh Sulawesi hanya terdiri dari satu propinsi dan tidak seperti sekarang terdiri dari empat propinsi yaitu: Propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Propinsi Sulawesi Tenggara.

Agar berita tentang proklamasi itu diketahui secara jelas dan merata, maka oleh Gubernur Ratulangi dikirimlah utusan-utusan ke beberapa tempat sampai ke pelosok-pelosok Sulawesi dengan tujuan memberikan penerangan dan semangat kepada rakyat agar tetap berjoang untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan tanah airnya. Bangsa asing manapun, termasuk Jepang tidak ada hak sama sekali untuk menjalankan kekuasaannya di Indonesia.

Dengan adanya penerangan tersebut, maka di mana-mana di Sulawesi dibentuklah organisasi-organisasi pemuda dengan tujuan untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan negaranya.

Sementara rakyat dan para pemuda sedang menyusun barisan dan mempererat persatuan, maka awal bulan September 1945, tentara Sekutu telah mendarat di Makasar (Ujung Pandang), yang dalam hal ini tentara Australia telah ditunjuk dan ditugaskan untuk mengambil alih kekuasaan, terutama melucuti senjata-senjata tentara Jepang yang telah menyerah tanpa syarat. Di lain pihak pemuda-pemuda pejoang Indonesia mengetahui bahwa tentara Jepang yang tidak punya hak lagi atas negara Indonesia, berusaha mendesak agar Jepang menyerahkan

senjata-senjata pada bangsa Indonesia. Oleh karena adanya dua kepentingan yang berbeda, maka bentrokan senjata antara pemuda-pemuda pejoang dan tentara Jepang tak dapat dihindarkan.

Tentara Jepang karena tidak menyerahkan senjata-senjata itu kepada rakyat Indonesia, tentu saja menjadi sasaran kemarahan pemuda-pemuda pejoang bangsa Indonesia. Akhirnya di beberapa tempat di Sulawesi terjadi pertempuran antara pemuda pejoang yang sangat membutuhkan senjata dan tentara Jepang yang tidak mau menyerahkan senjata-senjata yang diperlukan oleh rakyat untuk mempertahankan kemerdekaannya dari ancaman tentara Sekutu. Di sinilah bersama pemuda pejoang, wanita Sulawesi bahu-membahu membantu perjoangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Untuk menunjang penulisan peranan wanita Sulawesi Selatan di masa perang kemerdekaan, kami telah melakukan wawancara langsung pada pelaku-pelaku yang mengalami, menyaksikan, bahkan menghayati dengan sesungguhnya masa perang kemerdekaan Indonesia.

Jadi peranan wanita yang dimaksudkan di sini tidak lain adalah peranan aktif para tokoh-tokoh wanita yang secara phisik, baik dalam bentuk organisasi maupun secara pribadi terlibat langsung dalam perjuangan perang kemerdekaan.

Sebagai perbandingan dapat kita lihat bahwa pada masa pergerakan kebangsaan, keterlibatan kaum wanita di Sulawesi Selatan dapat dikatakan hanya sedikit saja. Namun tidak berarti bahwa wanita tidak punya andil, wanita tetap membantu dan memberikan pengorbanan yang cukup berarti demi tercapainya kemerdekaan dan kedaulatan negara Indonesia, andil dan semangat joang kaum wanita Sulawesi Selatan tidaklah meragukan. Aktivitas, peranan wanita tampak pada perkumpulan-perkumpulan yang bersifat sosial, antara lain dalam hal memberikan kepandaian pada lingkungannya, ketrampilan pada anggota-anggotanya seperti latihan kepalangmerahan.

Dalam organisasi pergerakan di Sulawesi Selatan kita melihat ada seksi wanita seperti: PSII, wanita Muhammadiyah (Aisyiah), Wanita Nahdatul Ulama (Fatayat), Masyumi (Muslimat) dan Wanita PMI (Marhaeni),[28] yang kesemuanya itu bernaung pada organisasi yang membawahinya dengan arah dan gerak perjuangan identik dengan organisasi induk.

Adapun tokoh wanita pada periode itu antara lain Ibu Aminah Yusuf dari PSII yang membentuk Serikat Istri Selebes bersama Ibu Najamudin Daeng Malewa. Selain itu ada juga organisasi wanita Muhammadiyah yang didirikan yaitu Aisyiah yang selama periode revolusi phisik berperan sebagai kurir dengan tugas mencari informasi untuk para pejoang yang bermarkas di pedalaman. Agak menarik juga untuk dibicarakan di sini, karena di lingkungan adanya keterikatan ketentuan-ketentuan adat, hukum dan peraturan-peraturan agama bahkan ketentuan-ketentuan moral lainnya yang umumnya sangat ketat. Kenyataan yang ada tokoh-tokoh pejuang wanita di Sulawesi Selatan, mereka turut bahkan terlibat dalam perjuangan melawan penjajah asing yang ingin menguasai daerahnya.

Memang agak sulit untuk diterima kenyataan itu, karena dengan ikut sertanya mereka di tengah-tengah daerah pendudukan yang dikuasai Belanda, maka partisipasi mereka tentu tidak nampak. Oleh karena itulah di dalam mengungkap terlibatnya atau adanya peranan kaum wanita Sulawesi Selatan di masa perang kemerdekaan tahun 1945–1949 ini kami akan membatasi pada kenyataan yang lebih obyektif. Hal ini juga karena keterbatasan pada data yang telah terkumpul dan bahan-bahan yang belum pernah diteliti.

Kiranya perlu diungkap di sini bahwa pada masa revolusi phisik pun wanita di Sulawesi Selatan telah turut memberikan andil yang cukup besar dalam perlawanan melawan penjajah Belanda. Ini dapat kita lihat dengan tampilnya tiga orang dari golongan bangsawan adat yang cukup mempunyai pengaruh di dalam organisasi SII (Sarekat Islam Indonesia) yakni: Andi

Abdul Kadir dari Swapraja Tanete, Andi Ninnong dari Swapraja Wajo dan Opu Daeng Risaju dari Swapraja Luwu.[29] Opu Daeng Risaju adalah seorang tokoh bangsawan yang banyak berjasa dalam pendidikan Sarekat Islam Indonesia cabang Sulawesi Selatan di Palopo dan beliau berhasil pula membuka cabang di Malangke. Namun gerak beliau tidak dapat berlanjut, karena Belanda menangkap dan memasukkannya ke dalam penjara selama 13 bulan.

Dengan demikian beliau adalah tokoh wanita pertama Sulawesi Selatan yang dipenjarakan karena persoalan politik. Sesudah ke luar dari penjara beliau giat kembali membuka cabang Sarikat Islam Indonesia di daerah lain di Sulawesi Selatan yakni di Malili dan Patampanua.

Pada tahun 1933 Opu Daeng Risaju menghadiri konggres Sarikat Islam Indonesia di Jakarta. Demikianlah arena kegiatan-kegiatan beliau dianggap membahayakan pemerintah kolonial, maka pada tahun 1934 beliau kembali dimasukkan ke penjara selama 14 bulan.

Kemudian selama pendudukan Jepang beliau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dan di mana pun beliau berada senantiasa menanamkan semangat patriotisme bangsa dengan gigih.

Tokoh wanita Aisyiah lainnya di Sulawesi Selatan adalah Andi Coma, seorang bangsawan Wajo. Peresmian Muhammadiyah dan Aisyiah cabang Wajo dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah Pusat Jakarta yaitu Haji Nasir Nuri dan Ibu Hayyinah dari pimpinan pusat Aisyiah. Dari Wajo, Muhammadiyah berkembang ke wilayah Soppeng pada tahun 1930 dan selanjutnya ke Luwu. Sejak berdirinya Muhammadiyah dan Aisyiah di Sulawesi Selatan sejak tahun 1926 sampai masuknya pendudukan Jepang ternyata telah berhasil menimbulkan semangat kebangsaan Indonesia, terutama untuk kemajuan wanitanya juga mendapatkan perhatian.

Aktivitas wanita dalam organisasi pergerakan kebangsaan kemudian terhenti setelah masuknya pemerintah Jepang di Indonesia pada tahun 1942. Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Jepang pada bulan Maret 1943 yang melarang aktivitas semua organisasi yang bersifat politis, maka organisasi yang bersifat sosial dan kebudayaan tampil dan bergerak di mana-mana, terjangan ini dimaksudkan untuk mendapatkan kemerdekaan yang bersifat illegal.

Seperti di pulau Jawa, pemerintah Jepang juga melatih orang-orang Sulawesi Selatan dalam latihan kemiliteran, dan kerja paksa untuk pembuatan pelabuhan yang strategis bagi kepentingan Jepang. Latihan kemiliteran seperti Kei Bodan, Sei nendan dan Heiho kelak merupakan modal pengetahuan dalam pemakaian dan atau penggunaan senjata yang berguna pada masa revolusi pisik.

Pada awal tahun 1944 kejayaan Jepang mulai menurun dalam perang Pasifik dan setelah pemboman atas kota Hirosima dan Nagasaki pada tahun 1945, barulah Jepang menyerah pada Sekutu. Bagi Indonesia peristiwa itu merupakan peluang yang sangat baik untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan asing dan karenanya memproklamirkan kemerdekaan Negaranya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Kehidupan Bangsa Indonesia dalam wilayah Negara Indonesia yang telah merdeka ternyata memperkuat rasa persatuan dan kesatuan semua lapisan masyarakat dari kalangan kaum bangsawan sampai kalangan rakyat biasa. Dan untuk wilayah Sulawesi Selatan perasaan persatuan dan kesatuan itu dapat terbina dengan baik antara golongan bangsawan, pemuda, wanita, dan rakyat, dan ini merupakan faktor utama yang menumbuhkan adanya kekuatan dalam tubuh kelasykaran-kelasykaran.

Adapun proses pembentukan kekuatan dalam bentuk kelasykaran di Sulawesi Selatan ini didukung oleh ketrampilan menggunakan senjata, dan latihan militer yang telah mereka peroleh pada masa pendudukan Jepang. Di samping itu juga

timbulnya tokoh-tokoh masyarakat di Sulawesi Selatan seperti Raja-raja di Luwu, Mandar, Pare-Pare, Gowa, Bantaeng, yang selalu siap membantu memimpin perjuangan rakyat menentang kembali kedatangan Belanda dan tentara Sekutu.

Seperti kita ketahui kedatangan tentara Sekutu di Sulawesi Selatan pada bulan September dan Oktober 1945 bersama Nica, ternyata telah menimbulkan kemarahan rakyat Sulawesi Selatan. Kemarahan rakyat meledak, karena Nica telah bertindak sebagai penguasa di Sulawesi Selatan dengan menembaki dan menyiksa pemuda maupun rakyat, apalagi yang memakai tanda merah putih pada dadanya.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas inilah maka dianggap perlu untuk menyusun kekuatan dalam bentuk organisasi kemiliteran atau kelasykaran di Sulawesi Selatan. Dan menjadi kenyataan pula bahwa pada periode 1945–1949 timbul kelasykaran di daerah-daerah seperti: Harimau Indonesia, Keris Muda, Saudara, Lipan Bajeng dan sebagainya. Dalam kegiatan kelasykaran di Sulawesi Selatan ini ternyata kaum wanita telah ikut serta secara aktif membantu para pemuda membela dan mempertahankan kemerdekaan tanah airnya.

Timbulnya kelasykaran di Sulawesi Selatan

Kelasykaran di Sulawesi Selatan diperkirakan timbul sejak adanya berita tentang proklamasi 17 Agustus 1945 diterima oleh pemuda-pemudi dan rakyat secara menyeluruh. Adapun tujuan pembentukan kelasykaran itu adalah untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan dan adanya perasaan bahwa kemerdekaan adalah tanggung jawab bersama seluruh Bangsa Indonesia.

Selain itu kelasykaran juga merupakan suatu wadah yang dapat menghimpun kekuatan masyarakat, mengatur taktik dan strategis dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan itu. Oleh karena perlengkapan persenjataan yang kurang kuat,

maka berbagai taktik dan cara dipakai, misalnya: menghadang iring-iringan tentara Belanda, mengadakan sabotase ataupun mengadakan sergapan yang mendadak dan taktik perang gerilya. Jadi perjuangan di sini pada dasarnya sama dengan perjuangan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang di Jawa.

Tokoh-tokoh wanita yang secara aktif ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan di Sulawesi Selatan antara lain dapat kami sebutkan di sini: Siti Mulyati bin Hasyim, Andi Ninnong, Emmy Saelan, Ibu Depu, Ruaidah Nurdin, Sitti Aminah Yusuf dan masih banyak wanita lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di sini.

Adapun dorongan utama dari perjuangan tokoh-tokoh wanita tersebut adalah adanya perasaan cinta tanah air yang disertai oleh rasa tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan Bangsa dan Tanah Air Indonesia. Perasaan cinta tanah air dan tanggung jawab ini semakin matang dan kuat oleh karena adanya kesadaran bahwa kedatangan bangsa Belanda di Indonesia semata-mata untuk menguasai dan menjajah kembali dengan cara yang semakin lebih kejam.

Perasaan benci terhadap kekejaman tentara Nica yang telah membunuh suami, anak, dan sanak saudara atau keluarga mereka di depan mata mereka tanpa adanya rasa perikemanusiaan. Perasaan ini membuahkan semangat juang yang tinggi. Di samping itu tokoh wanita ini pada dasarnya adalah keluarga atau keturunan dari tokoh pejuang sebelumnya yang telah nyata dalam hidupnya menentang penjajahan Belanda.

Sebelum kami menguraikan satu persatu pengalaman dan peranan kaum wanita di Sulawesi Selatan dalam perjuangannya di masa perang kemerdekaan, maka perlu dilihat di sini perwatakan wanita Sulawesi Selatan, karena perwatakan ini tentu sangat mempengaruhi corak dari perjuangan mereka.

Pada dasarnya watak wanita Sulawesi Selatan dibentuk oleh faktor adanya sikap hidup yang keras sebagai warisan

biologis yang khas dan pengaruh warisan sosial yang bersifat normatif, yang nampak dalam ketentuan adat-istiadat yang berlaku di Sulawesi Selatan.

Sama seperti di lain-lain daerah, tidak banyak jumlah mereka. Kekangan adat-istiadat yang diwariskan oleh orang tua mengungkung mereka. Seandainya tirani kaum lelaki itu tidak ada sewaktu revolusi pisik, maka akan cukup banyak jumlah mereka yang ikut mengambil bagian, berani memberontaki kungkungan itu dan melepaskan dirinya dari keterikatan adat, dan tampil di depan. Jumlahnya tidak seberapa. Akan tetapi walaupun dalam jumlah yang sedikit, sebagai wanita Sulawesi Selatan sudah dapat memperlihatkan watak aslinya yang diwarisi dari leluhurnya. Mereka berani tampil untuk mempertahankan kesadaran bertanah-air Indonesia, berbangsa Indonesia dan berbahasa Indonesia sebagai pejuang wanita melawan penjajah Belanda di waktu itu.

Dari uraian-uraian di atas dapat dilihat, bahwa watak wanita Sulawesi Selatan pada hakekatnya dibentuk oleh dua faktor, ialah sikap hidup yang keras sebagai warisan biologis yang khas Sulawesi Selatan dan pengaruh warisan sosial yang bersifat normatif, yang bermanifestasi dalam dimensi-dimensi adat-istiadat yang berlaku.

Dalam masalah perwatakan ini, kita melihat dua hal yang sangat bertentangan yang dihadapi oleh kaum wanita di Sulawesi Selatan. Di satu pihak kita lihat bahwa dengan watak yang terkesan keras sebenarnya sangat bertentangan dengan kekangan-kekangan yang timbul sebagai refleksi dari adat-istiadat yang berlaku. Dan di lain pihak, secara normatif mengharuskan mereka untuk tunduk pada ketentuan-ketentuan adatnya. Oleh sebab itu dapat dilihat, bahwa penampilan kaum wanita di Sulawesi Selatan dalam keikut-sertaan mereka mengambil bagian melawan penjajah asing sebagai wanita pejuang sebenarnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kegiatan mereka hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan yang pada hakekatnya tidak ber-

tentangan dengan kodrat kewanitaannya, seperti kegiatan-kegiatan PMI, dapur umum, dan sebagainya

Perwujudan watak asli mereka mulai nampak sejak tumbuhnya benih-benih perjuangan kebangkitan nasional di Indonesia dan lebih menonjol pada perjuangan revolusi tahun 1945, terutama pada kurun waktu 1945–1950, di mana satu dua orang wanita Sulawesi Selatan secara konsekwen membuktikan keberanian dan kemampuan dirinya. Sikap mereka yang teguh dengan melibatkan diri masing-masing dalam arena perjuangan melawan penjajahan bangsa asing, menyebabkan ada beberapa di antara mereka yang namanya terukir dalam lembaran-lembaran sejarah nasional sebagai wanita pejuang di daerah Sulawesi Selatan ini.

Selama periode tahun 1945–1949, taktik, perjuangan dan peranan wanita dalam perang kemerdekaan di Sulawesi Selatan secara singkat dapat dilihat dalam:

1. Pembentukan lasykar wanita, antara lain yang terkenal adalah:
   a. *Devisi Melati,* dibentuk dalam kelasykaran Kris Muda Mandar yang diketuai oleh Ibu Ruaidah.
      Tugas Devisi Melati ini antara lain menyediakan keperluan-keperluan dapur Umum, palang Merah, kurir dan intelegen.
   b. Kelasykaran wanita, dirintis oleh Ibu Mulyati dan Emmy Saelan, Nursiah dari PPNI dan Harimau Indonesia.
      Anggota-anggotanya berjumlah 30 orang, bertugas antara lain dalam kepalangmerahan, penghubung, penyelidik, mencari peluru, mengadakan obat-obatan, dan menyediakan dapur umum.
2. Serikat Istri Selebes

   Organisasi adalah bagian dari Partai Selebes yang dipimpin oleh Najamudin Daeng Malewa dan bergerak dalam bidang Pendidikan.

3. Persatuan Wanita Penolong Sosial

   Organisasi ini didirikan oleh Ibu Ratulangi dan bertujuan memberikan bantuan dalam bidang kepalang-merahan, dapur umum pada pejuang dari Sulawesi Selatan. Di samping itu sesuai dengan namanya, organisasi ini juga bergerak dalam seksi pendidikan, mencari dana untuk Yatim Piatu, Palang Merah, khususnya untuk mencari obat-obatan.

4. Organisasi Wanita Muhammadiyah (Aisyiah)

   Organisasi ini sudah ada sejak periode pergerakan kebangsaan dan pada saat itu terutama memberikan dakwah di kalangan wanita dan melalui dakwah ini ternyata dipakai juga untuk menanamkan perasaan dan semangat perjuangan, agar mereka turut serta membantu perjuangan kaum pria.

   Sebagai gambaran peranan wanita di Sulawesi Selatan, maka di bawah ini kami uraikan kegiatan dan perjuangan mereka.

Sitti Mulyati bin Hasyim

Selama perang kemerdekaan (1945–1949) beliau aktif dalam perang bersama-sama dengan kakaknya yaitu Anwar bin Hasyim dan Ali Malaka. Beliau berusaha menghimpun kaum wanita untuk membentuk kelasykaran wanita. Dalam usaha menghimpun wanita itu, beliau dibantu oleh Emmy Saelan yang gugur pada tanggal 21 Januari 1947. Meskipun kelasykaran tidak terbentuk, tetapi beberapa wanita telah ikut serta berjuang bersama-sama bergabung dalam Harimau Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Ibu Mulyati memakai taktik penyamaran untuk menyusup masuk ke dalam tangsi tentara Nica.

Ibu Depu

Ibu Depu adalah tokoh wanita yang berasal dari kalangan bangsawan Mandar. Beliau berjuang karena kesadaran bahwa

penjajahan Belanda tidak berhak lagi atas bumi Indonesia terutama terhadap tekanan atas daerah Majenne akibat penandatanganan perjanjian pada tahun 1906.

Taktik perjuangannya adalah mengadakan penyergapan secara tiba-tiba terhadap pasukan Belanda yang sedang mengadakan ekspedisi. Sebagai contoh yang pernah terjadi, beliau bersama anggotanya menyergap tentara Belanda yang akan menuju ke daerah Tinambung. Berbeda dengan perjuangan ibu Sitti Mulyati, ibu Depu berhasil mengumpulkan pemuda-pemudi di daerah Majene dan membentuk pasukan wanita yang diberi nama Devisi Melati, dan akhirnya bergabung dengan Kris Muda Mandar. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejuang, ibu Depu tidak bergerak seorang diri, tetapi selalu mengadakan hubungan dengan pemimpin-pemimpin kelasykaran di daerah lain seperti Manai Sofyan di Makasar, dan pernah mengutus saudaranya yaitu A. Malik ke Kalimantan dan Jawa untuk meminta bantuan senjata-senjata.

Dalam taktiknya menghimpun anggota, perjuangan ibu Depu memakai *sistim satu mencari dua* (sistim segitiga). Taktik ini tidak lain memperbesar jumlah pengikut, tetapi tidak secara terang-terangan. Dalam hal ini satu dari tiga tadi mencari lagi dua anggota lainnya, dan dari tiga anggota tersebut, seorang mencari lagi anggota dua lainnya, dan demikian seterusnya sehingga terhimpun anggota yang cukup banyak.

Meskipun pelopor pembentukan Devisi Melati adalah ibu Depu, tetapi pimpinannya adalah ibu Ruaidah. Devisi Melati ini dalam tugasnya membantu perjuangan, khusus dalam hal kepalangmerahan, menyediakan makanan untuk pejuang dan sebagai kurir di samping sebagai mata-mata untuk memberi informasi kepada pejuang-pejuang di pedalaman.

Syarifah Ragwan.

Keikutsertaan ibu Syarifah Ragwan dalam perjuangan kemerdekaan didasarkan kepada rasa tanggungjawab dan do-

rongan harus membela, mempertahankan Republik Indonesia. Keaktifan beliau dalam kelasykaran sudah dimulai sejak beliau ada di Jawa dan dalam hal ini suaminya yaitu Said Hasan bin Tahir sangat mendukung dan bekerjasama bahu-membahu.

Dalam perjuangannya melawan penjajah Belanda, beliau selalu berpindah-pindah dan tidak pernah lama menetap di satu kota, karena Belanda selalu mencari dan berusaha menangkapnya. Mula-mula beliau bermarkas di Barombong, kemudian pindah ke Pulau Barang Lompo, pindah lagi ke Barang Caddi, dan akhirnya ke Pulau Salemo yang selanjutnya ke pulau Sapuka. Dalam kegiatannya sebagai pejuang, hal yang sering dilakukan adalah mengadakan serangan penghadangan, juga sabotase-sabotase yang sering menyulitkan Belanda untuk mengadakan serangan kembali. Dalam perjuangan itu beliau dan pasukannya selalu mengadakan kontak dengan pejuang-pejuang lainnya, seperti Emmy Saelan, Wolter Mongisidi dan Ali Malaka. Keaktifan beliau ini terhenti ketika Belanda berhasil menangkapnya di Pulau Sapuka pada tahun 1947 dan dipenjarakan di penjara Hogepad.

Nyonya H. Oemi Hani A. Salam

Dalam kegiatan perjuangannya di daerah Mandar, beliau aktif didua kelasykaran, yaitu: *Pemuda Republik Indonesia* (PRI) yang berpusat di Majene dan kelasykaran *Kris Muda* yang berpusat di Tinambung. Kedua organisasi ini adalah organisasi perjuangan yang dalam sejarah di daerah Mandar, ibarat dua sisi dari sekeping mata uang logam.[30] Maksudnya, banyak anggota dari PRI ini yang juga menjadi anggota *Kris Muda* dan demikian pula sebaliknya. Jelasnya, kalau PRI berada dalam Kesatuan ALRI Seberang, maka KRIS MUDA dalam perkembangannya menjadi suatu kelasykaran yang besar dan meliputi Sulawesi Tenggara dan 12 kabupaten di Sulawesi Selatan.

Di dalam PRI, ibu Oemi Hani bertugas sebagai anggota majelis kewanitaan dan Sekretaris Persatuan Wanita Majene

(PWM), sedang di dalam KRIS MUDA beliau bertugas sebagai salah seorang unsur pimpinan dan anggota Lasykar Wanita Melati.

Sebenarnya pembentukan PRI dan KRIS MUDA didasarkan pada adanya persamaan dan kesatuan pandang yang secara politis strategis, ternyata dikemudian hari paling efektif dalam usaha membina putera-puteri Mandar khususnya dan Sulawesi Selatan Tenggara pada umumnya, terutama dalam usaha mencapai kemerdekaan Republik Indonesia yang dicita-citakan seluruh bangsa. Kemudian dalam kegiatannya di beberapa organisasi kelasykaran, beliau menjelaskan secara terperinci tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh:

1. **Gerakan Tumapel.**

Secara inkonvensional gerakan ini merupakan kerjasama antara pihak PRI dan KRIS MUDA. Dan *Tumapel* adalah singkatan dari *Tunjangan Mahasiswa Pelajar.* Dalam tindakannya ke luar, gerakan Tumapel ini mencari dana untuk membiayai mahasiswa atau pelajar Mandar yang bersekolah di Makasar (Ujung Pandang), tetapi pada dasarnya gerakan ini adalah untuk mencari dukungan bagi usaha perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Di dalam organisasi ini ibu Oemi Hani mempunyai tugas menghubungi atau mempengaruhi polisi-polisi Belanda pribumi untuk memihak pada perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, di antaranya ialah saudara Sulo, Idris, Djalil, Sideng, A. Rahman Haddad dan di samping itu juga anggota masyarakat yang berpengaruh.[31]

2. **PRI (Pemuda Republik Indonesia) sekitar tahun 1943–1946.**

PRI adalah suatu organisasi di mana beliau untuk pertama kali melibatkan diri di dalamnya dan sekaligus beliau menerima kepercayaan untuk menempati posisi sebagai *Komandan Jozi Seinendan* di daerah Mandar. Jozi Seinendan ini adalah sebuah organisasi wanita pada masa pemerintahan militer Jepang yang

anggota-anggotanya terdiri dari guru-guru wanita, pegawai negeri sipil wanita serta tokoh-tokoh masyarakat wanita pada umumnya. Kegiatan Jozi Seinendan di daerah Mandar pada waktu itu meliputi kegiatan di antaranya: mempelajari peraturan baris-berbaris, menyelenggarakan kursus-kursus ketrampilan, kepalangmerahan, pendidikan keputrian, kesejahteraan keluarga, kesenian dan karya bakti sosial budaya lainnya. Aktivitas PRI menjelang kemerdekaan, mengikut sertakan seluruh anggota secara aktif kembali ke arena perjuangan dengan memasyarakatkan berita kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia di seluruh daerah Mandar, antara lain: memberi informasi pada masyarakat Mandar melalui berita-berita radio milik keluarga Atjo Luaor, di antaranya juga pidato-pidato Bung Tomo yang menggelorakan semangat joang ke seluruh tanah air. Di samping itu juga aktif mendorong aksi penyebarluasan pamflet-pamflet atau spanduk-spanduk perjuangan merah-putih. Hal ini disebabkan karena ketika itu musuh-musuh kemerdekaan pada tahap-tahap permulaan masih terlihat dan sedang berusaha menyiapkan aksi petualangannya di mana-mana. Untuk melawan itu tentu saja harus ada aksi pembersihan terhadap musuh-musuh seperti itu.

Dengan demikian dapat kita rekam seluruh kegiatan PRI sebagai organisasi kelasykaran pada waktu itu, yakni: membangun SMP – PPSM atau Perguruan Rakyat, menggalakkan usaha penerangan dan propaganda melalui penyelenggaraan rapat-rapat umum atau pertunjukan seni musik dan seni drama, membangun sarana perekonomian untuk kepentingan pembinaan dana perjuangan dan di samping itu berhasil pula mendirikan sebuah Koperasi Usaha Tenun Wanita Indonesia.

3. KRIS MUDA.

Berdirinya organisasi ini di daerah Mandar dipelopori oleh pemuda-pemuda dan kaum nasionalis dalam rangka menyambut proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Sementara itu pada bulan-bulan akhir tahun 1945 tentara Australia datang di Majene/Mandar dengan diikuti oleh tentara Nica/Knil. Peristiwa ini ternyata merupakan ujian bagi masyarakat Mandar pada umumnya dan para pemuda khususnya; oleh karena bekas-bekas pegawai di zaman Belanda segera menampakkan belangnya. Ada yang menunjukkan kesediaan bekerjasama dengan bekas tuannya yaitu si penjajah Belanda, dan ada yang tetap pada pendiriannya *MERDEKA* atau *MATI.* Di samping itu di kalangan raja-raja dan bangsawan serta cerdik cendekia juga terbagi dua, dengan alasan karena mereka terlalu lama sengsara dan letih dalam suasana perang sejak tahun 1942 sehingga ingin bekerjasama dengan pemerintah Belanda. Namun tidak kurang pula yang tetap pada pendirian bahwa penjajahan harus diakhiri, kemerdekaan harus ditegakkan. Dengan keadaan yang demikian maka mulailah aksi-aksi antara lain ancaman kepada para pengkhianat, pamflet disebarkan pada tempat-tempat yang strategis. Di sinilah kaum wanita mulai juga memainkan peranannya membantu menjernihkan suasana dan *Lasykar Kris Muda* meningkatkan keaktivannya menjadi organisasi pejuang bersenjata. Kegiatannya bertambah dengan usaha mengumpulkan senjata, baik dengan cara membeli, menukar, juga membujuk, mencuri, merampas untuk kepentingan perjuangan dan sebagainya. Seluruh rakyat di daerah Mandar memberikan dukungan dan simpati atas perjuangan Kris Muda. Di sini pula ibu Depu memutuskan untuk bergerilya, beliau berpindah-pindah dari satu desa ke desa yang lain. Sedang ibu Oemi Hani bertugas menjadi kurir, penghubung antara ibu Depu sebagai pucuk pimpinan Kris Muda dengan anggota-anggota pimpinan lainnya dari berbagai tempat di Mandar.[32] Sesuai dengan naluri wanita maka tugas ini tentu saja harus dilakukan dengan penyamaran dan sikap hati-hati. *Kris Muda* semakin mantap, wanita Kris Muda yang bergabung dalam Korps Melati harus menyiapkan pula lencana, lambang bagi anggota-anggota lain, di samping tugas rutin kepalangmerahan dan kurir ke pedalaman.

Peranan wanita di Sulawesi Selatan tidak terbatas pada tugas-tugas yang penuh resiko, di penjara pun mereka sering mengalami dan tidak luput dari siksaan maupun interogasi yang cukup menyakitkan. Hal semacam ini dialami pula oleh ibu Depu, ibu Oemi Hani, ibu Sitti Mulyati maupun ibu Siti Hasnah Suwardi dan masih banyak yang lain.[33] Dari penjara yang satu dipindahkan ke penjara yang lain, betul-betul dalam keadaan tak menentu dan hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Kebiadaban bangsa Belanda yang ingin kembali ke tanah air Indonesia, mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Bagaimana kejamnya Westerling dan atau Nica justeru menambah semangat mereka pada pendirian. Inilah yang mungkin berbeda dengan perjuangan dan peranan kaum wanita di Jawa saat itu. Yang diperjuangkan tokoh-tokoh wanita di Sulawesi Selatan pada awal abad XX ternyata tidak hanya terbatas pada perbaikan posisi dan status saja, tetapi sudah sampai pada memimpin perlawanan melawan kekuatan penjajah kolonial Belanda.

Jadi dapat dikatakan di sini, pola dan bentuk perjuangan seperti Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika dan sebagainya tidak terdapat di kalangan wanita pejuang Sulawesi Selatan; oleh karena pada saat itu wanita-wanita di Sulawesi Selatan masih termasuk wanita-wanita merdeka dari penjajahan Belanda. Walaupun adat tetap ketat melingkungi mereka, namun mereka bahu-membahu dengan kaum prianya mengadakan perlawanan bersenjata terhadap Belanda. Boleh kita contohkan bahwa perjuangan kaum wanita di Sulawesi Selatan mirip perlawanan Christina Martha Tiahahu dari Maluku atau mirip perjuangan Nyi Ageng Serang, seorang pejuang wanita yang cukup besar peranan dan andilnya dalam perang Diponegoro melawan Belanda.

Demikianlah sekilas gambaran gerakan dan peranan wanita di dalam organisasi *PRI (Pemuda Republik Indonesia)* maupun dalam *Kris Muda* yang dapat dikatakan mewakili organisasi kelasykaran yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi karena situasi dan

kondisi yang demikian maka dapat disimpulkan bahwa tokoh-tokoh wanita yang muncul di masa revolusi phisik di mana mereka bekerjasama bahu-membahu bersama-sama dengan pejuang laki-laki melawan penjajah Belanda, bukanlah dibesarkan atau dididik dalam pelbagai organisasi yang sudah ada, terselubung maupun tidak; namun mereka lahir dan bangkit dari kesadaran masing-masing. Sebagai wanita, mereka ingin melihat keturunannya kelak diperlakukan secara adil sebagaimana layaknya seorang manusia, maupun sebagai warga masyarakat yang tidak ingin lagi dijajah oleh kekuatan siapapun.

Dengan demikian nama-nama tokoh wanita di Sulawesi Selatan seperti: Ibu Depu, Emmy Saelan, Nyonya Milda Towolioe, Nyonya Sultan Daeng Raja yang ikut bersama suaminya dibuang ke Menado, Nyonya Sitti Mulyati, Nyonya Oemi Hani dan para isteri tokoh-tokoh pejuang Palopo yang diasingkan ke luar Sulawesi Selatan dan harus berpisah ditinggalkan oleh suami-suami mereka, bukanlah lahir dari organisasi seperti yang didirikan oleh Jepang di Pulau Jawa atau yang sudah ada sebelum Perang Dunia II. Mereka lahir dari kesadaran sendiri, terpelihara jauh di pedalaman Sulawesi Selatan, dan akan muncul pada saatnya.

Rupanya terbawa oleh semangat proklamasi, maka semangat kaum wanita Sulawesi Selatan tegak kembali. Dari tingkat elite bangsawan sampai kepada mereka yang tidak sempat mengenyam pendidikan apapun dan hanya mengikuti suami sebagai seorang isteri yang patuh dalam pergerakan, ternyata mampu juga bergerak dalam organisasi. Walaupun pengalaman pada masa Jepang tidak banyak membantu, tetapi perubahan yang dibawakan akibat zaman pendudukan itu, rupanya dapat juga melonggarkan keketatan ikatan adat istiadat yang mengungkung atas diri mereka masing-masing.

Dengan adanya perubahan seperti itu, maka tersedia bagi ibu Depu untuk memilih antara mengikuti suaminya yang bekerjasama dengan Nica, atau memilih bekerjasama dengan

pejuang-pejuang Sulawesi Selatan yang ingin hidup merdeka. Keadaan seperti itu dapat pula kita lihat dari adanya surat protes kepada Residen Sulawesi Selatan, Kontroler dan Walikota Makasar serta Komandan Teritorial Sulawesi Selatan tentang pembunuhan 40.000 jiwa rakyat Sulawesi Selatan pada tanggal 11 Desember 1946 yang mana surat protes itu berasal dari tujuh kaum wanita. Untuk jelasnya surat mereka itu kami kutip sebagai berikut:[34]

> "..... Sebagaimana paduka tuan telah maklum mulai 11 Desember 1946 menurut keputusan Lt. Gubernur-Jenderal diumumkan "keadaan perang" buat daerah Makassar, Bonthain, Pare-Pare dan Mandar. "Keadaan perang ini memberikan kekuasaan kepada militer dan kemerdekaan berbuat olehnya, apa yang dengan tidak terikat oleh salah satu undang-undang dan peraturan-peraturan. Kami wanita mengetahui benar, bahwa dalam "keadaan perang" kekuasaan militer itu besar sekali, tetapi sukar sekali untuk membenarkan semua tindakan militer itu, yang sudah dimulai pada 11 Desember 1946. Kami berpendapat, bahwa walaupun bagaimana juga besarnya kekuasaan militer itu, tetapi juga harus memakai dasar agama, keadilan dan kemanusiaan. Tindakan militer sebagaimana pembersihan yang dilakukan di sekeliling daerah Bara-Baraya (10-12-'46) Distrik Ujung Tanah, Jongaya (16-12-'46) Kerajaan Gowa, dan Sambung Jawa (16-12-'46) Distrik Mariso, adalah melanggar batas-batas agama, kemanusiaan dan keadilan.
>
> Dengan tidak diperiksa lebih jauh, kami perempuan seorang diri dan hanya diiringkan oleh beberapa orang saja, kami perempuan laki-laki dan anak-anak dibawa ke satu tanah lapang, di mana banyak orang dibunuh dan disiksa.
>
> Kami perempuan-perempuan sudah tentu tidak dapat menantikan, siapakah yang di antara yang terbunuh itu yang bersalah atau tidak, karena itu adalah kewajiban pemerintah. Tetapi kami sangat kaget karena caranya pembersihan itu dilakukan. Pembersihan serupa itu, menimbulkan perasaan takut dan kebencian rakyat!
>
> Takut, karena merasa tidak ada jaminan keamanan terhadap jiwa dan milik. Kebencian, karena tindakan-tindakan itu dikerjakan di

luar batas agama, kemanusiaan, dan keadilan. Dengan surat ini, bukan kami maksudkan sebagai protes atau keberatan-keberatan lainnya. Ini hanya kami maksudkan supaya tuan menyelidiki mereka yang telah mati itu.

Kami mengharap tindakan-tindakan itu menarik perhatian tuan-tuan dan akan mengenai perasaan hati tuan, hingga tuan akan mengambil tindakan-tindakan untuk menjernihkan keadaan ini, sebagaimana juga setiap manusia dari agama apapun juga yang berperasaan keadilan dan kemanusiaan. Kami dapat meramalkan, bahwa dengan tindakan militer ini, maka pergaulan di sini tidak pernah aman dan damai lagi. Sejarah tekanan militer Nazi dan Jepang cukup memberikan bukti, bahwa keamanan dan perdamaian di satu negeri tidak dapat ditimbulkan dengan cara membangkitkan perasaan takut dan kebencian yang disebabkan oleh tindakan-tindakan yang tidak didasarkan atas agama, kemanusiaan dan keadilan.

Kami menyampaikan salam dan hormat dari perempuan-perempuan di Makasar.

Atas nama Perhimpunan Sosial:
ttd.
Nyonya Salawati Daud
Nyonya Sikado Dg. Nai
Nyonya Tjongkeng
Nyonya Ranrang Tua
Nona Djohariah
Nyonya Kasim dan
Nyonya Maladjong.

Demikianlah antara lain tokoh-tokoh wanita yang telah berani memprotes sikap dan kesewenang-wenangan tentara Nica bersama kaki tangannya, termasuk tindakan Kapten Westerling. Meskipun pejuang-pejuang wanita dari Sulawesi Selatan ini tidak seberapa yang tampil, tetapi peranan mereka pada saat-saat itu cukup meyakinkan dan cukup terwakili sekali pun di antara mereka itu banyak yang berasal dari luar daerah Sulawesi Selatan. Jadi jelas di sini bahwa masalah kesukuan sudah bukan masalah untuk dibesar-besarkan.

Demikian sampai pada permulaan tahun 1950 di Makasar (Ujung Pandang) terjadi pergolakan-pergolakan yang hebat. Demonstrasi pembubaran Negara Boneka NIT dan kembali ke negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, kemudian peristiwa KNIL pada bulan Mei dan Agustus 1950, dalam gerakan-gerakan tersebut wanita di Sulawesi Selatan juga turut ambil bagian, bekerjasama membantu kaum laki-laki dalam bentuk yang lain. Dan ternyata perjuangan kaum wanita bersama kaum prianya membawa hasil yang meyakinkan yaitu tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1950 Negara Indonesia Timur dengan resmi kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita semua berjuang bagaimana mengisi kemerdekaan dan membangun bangsa Indonesia ini dengan berbagai kegiatan yang positif dan maju.

D. B A L I.

Menjelang akhir Perang Dunia II Jepang mendirikan Pasukan Pembela Tanah Air untuk membantunya dalam mempertahankan wilayah-wilayah yang telah mereka duduki. Harapan mereka dengan bantuan-bantuan penduduk setempat daerah ini masih dapat dipertahankan. Ternyata dengan dijatuhkannya bom atom yang mengakibatkan kerusakan dan pemusnahan yang hebat di Hiroshima dan Nagasaki harapan Jepang menjadi buyar. Sementara itu para pemuda Indonesia sudah terlanjur dilatih di dalam bidang kemiliteran, hal mana merupakan modal yang perlu diperhitungkan dalam masa perjuangan pisik rakyat Indonesia menghadapi Belanda. Baris-berbaris, latihan-latihan menyerbu, hidup disiplin dan serba kekurangan merupakan hal-hal yang sangat membantu dalam menghadapi serangan-serangan musuh. Begitu pun para putri, banyak yang juga mendapat latihan dalam membantu para pemuda dalam Palang Merah atau pekerjaan-pekerjaan yang lain.

Latihan-latihan dalam bidang kemiliteran juga diberikan Jepang pada para pemuda Bali. Pada tanggal 15 Maret 1944

para pemuda mulai dilatih selama tiga bulan di Banyuwala (Singaraja). Mereka dilatih dalam Barisan PETA sampai pertengahan bulan Juni tahun 1944. Setelah selesai mereka disebar ke seluruh Bali untuk melatih para pemuda. Dengan cara ini banyak pemuda Bali mempunyai kemampuan untuk memanggul senjata dan mempergunakannya.

Masyarakat Bali menjelang akhir Perang Dunia II boleh dikatakan sudah dalam keadaan serba kekurangan. Semua yang mereka miliki dan yang mungkin dapat dipakai Jepang dirampas dari mereka. Bukan harta milik saja yang mereka harus korbankan, tetapi juga tenaga mereka.

Ketika kekalahan Jepang bukan lagi merupakan rahasia, maka rakyat merasa lega, karena orang-orang yang telah membawa penderitaan bagi mereka, pasti akan meninggalkan Bali dalam waktu yang tidak begitu lama. Kelegaan ini tidak menjadi kenyataan, ternyata penderitaan masih harus mereka alami selama beberapa tahun dalam menghadapi Jepang dan kemudian NICA.

Jepang yang kalah perang dan patuh pada perintah Sekutu tidak mau menyerahkan senjata mereka kepada pihak Pemerintah Republik Indonesia Propinsi Sunda Kecil. Mereka hanya patuh pada Sekutu yang memerintahkan mempertahankan *status quo*. Dengan sikap yang demikian ini perundingan antara pihak Indonesia dan Jepang yang diadakan pada tanggal 8 Desember 1945, menemui jalan buntu. Oleh karena itu para pemimpin pemuda melatih para pemuda di desa-desa untuk siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Kaum wanita dan putri-putri yang waktu zaman Jepang telah tergabung baik dalam Fujinkai dan kegiatan-kegiatan ke-Palang Merahan juga ikut bersiap-siap. Mereka itu terlibat dalam barisan penyelidik, bagian logistik, penyelenggaraan dapur umum dan barisan penghubung.

Insiden-insiden mulai timbul ketika Jepang tidak mau dilucuti oleh Pemerintah Republik Indonesia Propinsi Sunda Kecil.

Sejak tanggal 8 Desember 1945, para pemuda mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Markas Besar Tentara Keamanan Rakyat mengeluarkan instruksi-instruksi ke seluruh pelosok Bali untuk siap dalam perjuangan pisik melucuti senjata dari pihak Jepang. Dalam persiapan-persiapan, mereka juga selalu mengadakan hubungan dengan pihak Republik Indonesia di pulau Jawa untuk mendapat petunjuk-petunjuk.

Keikut sertaan para wanita Bali dalam perjuangan terutama pada bidang Palang Merah. Untuk itu beberapa wanita menggabungkan diri ke badan ini. Mereka antara lain adalah I Gusti Ngurah Raka (Nyonya Nyoman Seriati), Desak Made Raka (Nyonya Nada), Ni Wayan Gatri, Desak Made Oka dan Gusti Nyoman Alit. Kelompok Palang Merah ini langsung berada di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai, dan mereka dibawa serta ke desa Munduk Malang, tempat perundingan para pemuda pejuang.[35] Di desa ini kekuatan perjuangan dimantapkan di bawah pimpinan Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Kelompok-kelompok yang tergabung di sini adalah Pemuda Republik Indonesia, Pesindo dan Resimen Sunda Kecil. Kesemuanya ini berada di bawah Komando Markas Besar Oemoem. Pada tanggal 4 April 1946 pembagian tugas telah rampung.

Para wanita yang dibawa ke pedalaman, yaitu ke desa Munduk Malang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut, merawat para pejuang yang sakit atau yang cedera, mengadakan hubungan-hubungan dengan rekan-rekannya di kota-kota untuk memperoleh bantuan obat-obatan. Hubungan dengan rekan-rekan di kota harus dilakukan secara rahasia untuk menjaga agar kubu mereka di pedalaman tidak diketahui lawan. Tugas yang lain adalah membantu masyarakat desa-desa yang tidak jauh, merawat orang-orang yang sakit atau yang memerlukan bantuan untuk bersalin.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya para wanita terlibat di beberapa bidang, salah satu di antaranya adalah sebagai

penghubung. Seorang yang bernama Wati pedagang keliling, sangat cocok untuk pekerjaan ini pada waktu itu. Ia sangat lincah dan mempunyai banyak teman di kalangan pegawai Rumah Sakit Umum Tabanan, sehingga obat-obatan mudah didapat dan diperoleh dari Rumah Sakit tersebut.

Bidang lain yang juga ditangani oleh nona Wati adalah mengatasi kekurangan obat-obatan dengan meramunya dari tanaman-tanaman. Ia membuat yodium dari kunyit yang diparut dan direbus dan kemudian mencampurkannya dengan alkohol.[36] Pembalut luka dibuat dari kapas atau pelepah pisang yang sudah dikeringkan.

Di samping bantuan obat-obatan yang harus dicari atau diusahakan dari mana-mana, para wanita Bali membantu para pejuang menjadi penghubung dari pedalaman ke kota. Tugas ini biasanya diberikan pada seorang wanita yang biasanya tidak dicurigai.

Para wanita yang pernah belajar di Jawa pada puluhan tahun keempat, pada umumnya pada revolusi ikut serta dalam perjuangan. Meskipun di Bali perlawanan pisik hanya dapat mereka lakukan sampai akhir 1946, namun keikutsertaan mereka telah memberi kemantapan pada tekad perjuangan mencapai Indonesia Merdeka.

Wanita-wanita itu adalah antara lain nyonya Oka Yasmin yang telah mendirikan Persatuan Wanita Indonesia, yang menjadi wadah federasi delapan belas organisasi wanita dari Swapraja Badung dan Gianyar. Ia juga pendiri PMI di kota Denpasar. Barisan putri dipimpin oleh nyonya Luh Putu Sundri dan pusatnya adalah di *banjar* Titih Denpasar. Anggota Barisan Putri ini selalu membantu perjuangan para pemuda, umpamanya sebagai penghubung.

Di kota Singaraja pada tahun 1946, banyak wanita yang bekerja di rumah sakit, hal ini dilakukannya hanya untuk mudah mendapat obat-obatan. Mereka itu adalah nyonya Jero Wilaya, nyonya Made Kanjeng, nyonya Sumartimah, I Gusti

Ayu Sukesi. Di samping para wanita yang baru disebut namanya terdapat pula nyonya I Gusti Ngurah Oka (Ni Luh Oka). Mereka dikoordinir oleh Dr. Hadiwidjojo. Yang juga aktif membantu para pejuang adalah Dr. Hansar yang bertempat tinggal di *banjar* Jawa. *Banjar* Jawa dan desa Panji yang terletak dekat Singaraja banyak menyumbang dalam perjuangan. Kedua tempat ini selalu siap membantu para gerilya bila ada yang mengetuk pintu salah satu rumah di kedua tempat ini.

Karena takut kegiatannya membantu para gerilyawan dengan obat-obatan akan diketahui musuh NICA, Dr. Hadiwidjojo masuk ke pedalaman dengan nyonya Sudarmi. Mereka bergabung dengan pasukan Ida Bagus Indra dan I Mengah Tamu di Markas Besar. Pekerjaan koordinasi kemudian diambil alih oleh nyonya I Gusti Ngurah Oka (Ni Luh Parmi), yang pada waktu itu menjabat komandan sektor penghubung di desa Banyumala. Sebelumnya tugas nyonya Sudarmi adalah penghubung ranting di desa Baku dan penyelenggara dapur umum.

Pada akhir tahun 1946 tempat-tempat kegiatan mereka tercium oleh NICA, karena ternyata ada mata-mata yang melaporkannya. Kemudian pada tahun 1947, tempat-tempat mereka di pedalaman diketahui karena ada beberapa surat mereka yang jatuh ke tangan NICA. Oleh karena biasanya gerilyawan tidak selalu di tempat, sedangkan wanitanya biasanya bertugas di dapur umum dan perawatan selalu berada di tempat, maka NICA berhasil menangkap sejumlah 30 orang wanita dari seluruh pulau Bali. Mereka sebenarnya akan ditahan selama 3 bulan, namun pada akhir Agustus 1947, pada ulang tahun Ratu Wilhelmina, mereka mendapat pengampunan. Pada tahun 1948 para wanita tersebut ditugaskan kembali di rumah-rumah sakit.

Pertempuran-pertempuran dahsyat yang terjadi di Bali antara pasukan-pasukan gerilya dan Belanda terjadi di tanah Aron yang terletak di lereng Gunung Agung. Wilayah ini sangat strategis untuk menjebak pasukan NICA yang pada tahun 1946 mulai berusaha untuk menguasai kembali seluruh pulau Bali.

Pasukan NICA yang mendekati tempat ini berhasil dihabiskan oleh para gerilyawan yang berada di bawah komando Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Pada kontak senjata ini korban di pihak Indonesia tidak banyak, sebaliknya yang terjadi di pihak Belanda. Dengan pengalaman ini pihak NICA memperkuat diri untuk menghadapi kaum *ekstremis*. Oleh sebab itu NICA menjaga ketat pantai Barat Bali untuk mencegah masuknya senjata-senjata dari Jawa. Pihak NICA sejak pertempuran Aron menjadi lebih ofensif dalam menghadapi para pejuang. Namun sebelum dapat menjalankan ofensif mereka secara besar-besaran, mereka masih harus mengalami kegagalan. Tangsi polisi Tabanan dapat dikelabui oleh para pejuang di bawah pimpinan Komandan Polisi Wagimin. Dari tangsi ini para pejuang Bali dapat merampas senjata. Keberhasilan ini dirayakan dengan hiburan dan upacara doa di Puri Dalem Basa Ole. Sementara perayaan itu berlangsung (19 Nopember 1946), datang berita bahwa NICA telah merencanakan untuk mengepung desa Pengembungan dan desa Adeng. Kedua desa ini merupakan tempat penarikan kembali para gerilyawan setelah operasinya ke Pos Polisi Tabanan.

Mendengar laporan yang tidak menggembirakan itu, I Gusti Ngurah Rai sebagai Komandan DPRI mengatur pasukannya. Di pihak lain NICA juga mengadakan persiapan dengan mengerahkan semua pasukan mereka yang ditempatkan di pos-pos mereka. Semuanya dikerahkan berjalan kaki menuju desa Marga dan memasuki desa Marga, yang tidak jauh dari kubu I Gusti Ngurah Rai. Semua penduduk dikumpulkan di depan pasar Marga.

Keunggulan pasukan NICA pada akhirnya dapat menguasai pihak gerilyawan yang dipimpin I Gusti Ngurah Rai, yang mengambil posisi di depan Candi Margarana. Keunggulan ini karena persenjataan yang lebih baik dan bantuan dari udara. NICA beberapa kali menembak dengan menggunakan Pipercub dari udara. Dalam pertempuran ini gugurlah I Gusti Ngurah Rai dan

sejumlah pejuang lainnya yang tergabung dalam pasukan Ciung Wanara. Rakyat pun tidak sedikit yang menjadi korban keganasan Belanda.

Periode perjuangan tahun 1945–1946, telah menampilkan kaum wanita di samping kaum pria dalam memperjuangkan cita-cita bangsa. Ternyata adat dan pendidikan bukan merupakan dua hal yang berlawanan atau bertentangan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Adat telah memberi kesempatan kepada wanita Bali untuk ikut berjuang sesuai dengan kodratnya sebagai wanita di dalam bidang-bidang kewanitaan, sementara pendidikan telah membuka mata para wanita bahwa mereka harus ikut berjuang untuk membantu pejuang pria mewujudkan kemerdekaan seluruh bangsa.

E. MALUKU.

Peranan wanita di Maluku dalam masa Perang Kemerdekaan mempunyai ciri tersendiri. Wanita di daerah Maluku sendiri nampaknya kurang berperan dalam masa itu. Hal itu disebabkan karena kondisi daerah dan latar belakang kehidupan masyarakat yang tertekan selama berabad-abad. Di samping itu karena kurangnya pendidikan pada sebagian besar kaum wanita di daerah merupakan faktor lain kurangnya peranan mereka dalam masa perang kemerdekaan bahkan masa-masa sebelum itu. Selain itu Politik Kolonial Belanda yang berhasil *membelandakan* pola pemikiran para pemimpin masyarakat terutama para raja patih ikut pula menentukan gerak masyarakat di daerah itu. Sebagian masyarakat menganggap dirinya sebagai bagian dari rakyat Belanda yang harus patuh pada atasannya atau pemimpinnya dan apa yang diprogramkan pemerintahnya.

Dalam masa pendudukan Jepang yang singkat tetapi sangat kejam menambah tekanan kejiwaan pada masyarakat. Kalau pun ada organisasi wanita seperti Fujinkai yang didirikan oleh pemerintah Jepang di daerah lain, maka di Maluku tak ada

sama sekali. Bahkan organisasi umum pun hampir tak ada. Itulah sebabnya kegiatan wanita di daerah ini tak dapat muncul sebagaimana mestinya. Akan tetapi di luar daerah, wanita-wanita Maluku giat berjuang bersama-sama wanita lainnya dengan membawa nama atau mengatas namakan daerahnya, oleh sebab itu untuk dapat menampilkan peranan wanita Maluku dalam masa Perang Kemerdekaan itu secara menyeluruh, yaitu tanpa melupakan peranan wanita Maluku di luar daerah Maluku, maka sub bab ini dibagi atas:

a. Peranan dan perjuangan wanita di dalam daerah.
b. Peranan dan perjuangan wanita di luar daerah.

a. Peranan dan Perjuangan Wanita di dalam Daerah.

Berita Proklamasi 17 Agustus 1945 agak terlambat diterima di daerah ini, karena berita kekalahan Jepang kemudian disusul dengan perlucutan senjata yang dilakukan oleh Sekutu yang diwakili tentara Australia begitu cepat berjalan, bahkan kedatangan NICA yang membonceng di belakang Sekutu pun sangatlah cepat. Itulah sebabnya arti kemerdekaan Indonesia di daerah ini masih gelap ketika itu, karena berita proklamasi kemerdekaan baru jelas sampai ketelinga rakyat Maluku setelah pemerintah Republik Indonesia pindah Ke Jogyakarta. Akan tetapi hal itu tidak berarti tidak ada pergerakan di sana. Pergerakan yang ada lebih bersifat kelompok-kelompok kecil bahkan cenderung bersifat individual.[37] Demikian pula pergerakan wanita dan kelompok sosialnya.

Suatu organisasi wanita yang tetap bertahan sejak zaman kolonial Belanda sampai masa perang kemerdekaan yaitu *Ina Tuni.* Organisasi ini merupakan seksi wanita dari Sarekat Ambon yang didirikan A.Y. Patti pada tahun 1920 di Semarang. Organisasi Ina Tuni ini sangat terkenal di kalangan wanita Maluku, baik di kalangan mereka yang menjadi anggotanya. Mungkin karena namanya dalam bahasa daerah yang dikenal oleh semua lapisan, yang berarti *Ibu sejati.* Pengaruh dari ke-

beradaan organisasi ini terasa sekali di kalangan wanita Maluku sesudah zaman Jepang, walau mereka sendiri tak dapat berbuat banyak.[38] Di samping tradisi dan adat yang masih membatasi gerak para wanita di Maluku, bayangan yang menakutkan dari zaman Jepang selalu menghantui alam pikiran mereka dan kedatangan NICA (Belanda) yang membonceng Sekutu menjadi rintangan besar bagi pergerakan wanita di sana terutama dalam bidang organisasi.

Setelah Jepang mengangkat kakinya dari daerah Maluku, para tokoh pergerakan makin menggalakkan pergerakan mereka. Tak lama sesudah itu tentara Sekutu kemudian datang dengan membawa NICA di belakangnya, makin menambah semangat juang mereka untuk mencapai kemerdekaan.

Pada bulan Desember 1945 terbentuk Barisan Pejuang Indonesia (BPI) di kota Ambon dengan para pemimpinnya antara lain Dr. Soedibjo, E.U. Pupella, Rokhiyat dan Wim Reawaru. Organisasi ini mempunyai suatu lasykar yang dipimpin Mohammad Qosim Maruapei. Lasykar ini pada akhir Desember 1945 merencanakan untuk mengadakan penyerbuan ke Benteng Victoria dan Tangsi Wailayat di Batu Merah. Namun sebelum waktunya rencana tersebut tercium oleh kaki tangan NICA sehingga komandan lasykar Mohammad Qosim Maruapei ditangkap dan dipenjarakan.[39]

Di dalam wadah ini wanita-wanita terutama istri dan anak-anak anggota BPI memegang peranan yang tak dapat diabaikan. Dalam keadaan ekonomi yang sangat sulit pada waktu itu mereka membantu suami-suaminya untuk mencari bahan makanan guna menunjang kehidupan keluarga. Mereka selalu mengadakan persiapan untuk menjamu dan memberi makan kepada para anggota organisasi yang mengadakan rapat-rapat rahasia pada waktu-waktu tertentu. Mereka juga selalu siap sedia bila sewaktu-waktu dipanggil atau ditangkap polisi NICA.

Pada awal tahun 1946 dibentuk pula suatu wadah perjuangan dengan nama Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) di ba-

wah pimpinan Wim Reawaru, Paul Maitimu dan Sutarto. Di Maluku Utara (Ternate) dibentuk juga wadah perjuangan dengan nama Persatuan Indonesia (PI) di bawah pimpinan Ali Kama, dan pada saat yang hampir bersamaan dibentuk pula Pemuda Keamanan Rakyat.[40] Kemudian di bawah pimpinan Abdulkadir Tuakia.

Pembentukan wadah-wadah perjuangan di atas selain melibatkan para pemuda pejuang yang terdiri dari para petani dan nelayan, juga badan-badan perjuangan ini berhasil menarik para bekas Heiho, Seinendan dan beberapa orang bekas anggota KNIL. Bahkan mereka itu merupakan kekuatan inti di dalam kelasykaran dan wadah-wadah tersebut di atas.

Keterlibatan para pejuang dalam perjuangan kemerdekaan itu justru melibatkan wanita Maluku karena mereka adalah istri anak-anak, saudara bahkan orang tua dari para pejuang tersebut. Merekalah yang menjadi sumber kehidupan ekonomi. Apabila para pejuang itu bersembunyi atau bergerilya di hutan-hutan maka para wanita itu membuatkan bekal dan mengantarkannya sendiri secara sembunyi-sembunyi. Jikalau tak ada lagi bahan makanan di desa basis para gerilya, maka kaum wanitalah yang pergi ke desa-desa lain untuk mencarikan bahan makanan. Untuk mendapatkan bahan makanan itu, tidak hanya uang sebagai nilai tukarnya, tetapi juga bahan pakaian bahkan pakaian yang melekat di badannya dan perhiasan yang dipakai dikorbankan sesuai permintaan atau keinginan yang empunya makanan. Untuk pekerjaan itu mereka harus menyeberangi teluk dan selat dari jazirah ke jazirah dan dari pulau ke pulau. Dalam kegiatan seperti itu mereka harus berhati-hati terhadap kawan sendiri, karena kadang-kadang ada kawan yang tidak senang pada kegiatan mereka yang bekerja untuk para pejuang. Pihak itu adalah mereka yang masih terbuai dengan mimpi kembalinya kekuasaan Belanda di Maluku.

Kegiatan kaum wanita di beberapa desa di pulau Ambon seperti di Tulehu, Hitu, Mamala, Hila, Wakasiku, Amahusu,

Latuhalat, Ema dan Lateri mempunyai andil dan peranan besar dalam masa *Nica sampai masa RMS,* (Perang Kemerdekaan 1945–1950). Kaum wanita di desa-desa tersebut sangat menunjang kegiatan suami-suami mereka yang bergerak dalam organisasi politik yang ketika itu terkenal dengan nama PIM (Partai Indonesia Maluku). Dari mulut ke mulut dan dari kuping ke kuping mereka mengadakan kegiatan semacam spionase. Ketika di kota Ambon terjadi tindakan-tindakan sewenang-wenang oleh tentara NICA, maka banyak penduduk mengungsi ke desa. Kaum wanita di desa-desa tersebut di atas menyediakan rumah mereka untuk menampung para pengungsi. Mereka mengadakan dapur umum untuk membantu dan melayani kebutuhan makanan para pengungsi. Apabila tiba-tiba muncul atau datang kaki tangan NICA di desa tersebut untuk mencari dan menangkap para pejuang, tidak sedikit wanita yang di seret ke rumah raja (kepala Desa) untuk diminta keterangannya. Kadang-kadang mereka ditampar, dipaksa untuk membuka mulut, tetapi wanita-wanita yang lugu itu selalu teguh pada kata hati mereka.

Wanita-wanita seperti itu dapat ditemui di desa-desa yang disebut di atas. Misalnya di desa Wakasihu, di sana terdapat seorang wanita dengan dua anak laki-laki dan seorang anak perempuannya, terkenal sebagai pejuang. Wanita itu bernama Fatimah. Ia merupakan pendorong bagi kaum laki-laki di desa itu. Anak laki-lakinya yang pertama adalah pemimpin pemuda pejuang dan ketua PIM ranting desanya. Anak laki-lakinya yang lain menjadi anggota TNI di pulau Jawa, sedang anak perempuannya Aminah dan menantunya selalu giat dalam bidang sosial ekonomi seperti mengadakan dapur umum, mencarikan bahan makanan dan menjahitkan pakaian bagi para pemuda, termasuk pakaian seragam pemuda PIM dengan warna putih-putih berhiaskan bisban merah dan kancing merah. Ibu Fatimah sendiri dengan statusnya sebagai guru mengaji yang juga dibantu oleh anak-anaknya, ia selalu mengobarkan semangat juang para muridnya. Mereka itu kemudian menjadi pemuda-pemuda

pejuang di antara tahun 1948–1950 di desa Wakasihu dan jazirah Hitu. Rumah wanita itu berfungsi pula sebagai markas rahasia tempat para pemuda berkumpul dan membicarakan rencana-rencana kegiatan. Ketika kegiatan itu tercium oleh kaki tangan NICA, rumah Ibu Fatimah seringkali digeledah dan sering kali pula wanita ini diseret ke depan polisi untuk dimintai keterangannya, di mana tempat para pejuang berada. Walau ditakuti dengan berbagai ancaman, tetapi wanita itu tidak surut dari usaha dan perjuangannya untuk mencapai kemerdekaan. Suatu peristiwa lagi ketika pada akhir tahun 1949, putranya yang menjadi pemimpin pemuda bersama beberapa kawannya lolos dari jaringan mata-mata NICA dan RMS. Mereka itu kemudian diselamatkan oleh kapal R.I. Rajawali pada tahun 1950 dan ikut bersama TNI mengadakan pendaratan di Namlea (pulau Buru) dan di Piru (Seram Barat). Akibat dari kejadian itu maka rumah Ibu Fatimah yang merupakan satu-satunya peninggalan dari suaminya, dibakar oleh kaki tangan NICA dan RMS. Beliau terpaksa pindah ke desa lain untuk menyelamatkan dirinya bersama keluarganya.[41]

Di desa Asilulu banyak pula kaum wanita yang ikut menunjang dan membantu kegiatan suami mereka, antara lain Ibu Haji Tjia dan Ibu Sa'adiah. Kedua wanita ini dalam tahun 1949–1950 menjahitkan bendera-bendera merah putih dalam ukuran kecil kemudian dibagikan kepada para pemuda dan orang-orang di desa yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kedua wanita itu juga menjadi penghubung antara pemuda pejuang dari Partai Indonesia Maluku (PIM) dengan para pemimpin perjuangan yang menamakan dirinya *Pasukan Terpendam.*[42]

Di desa Tulehu kaum wanita juga bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan sosial. Wanita-wanita itu bergabung membentuk seksi wanita dari Partai Indonesia Maluku (PIM) dibawah pimpinan bersama, antara lain Ny. Salimah Ishak, Ny. Boki, Ny. Rahimah dan Ny. Maryam. Untuk membantu para

pejuang mereka mengumpulkan uang dan perhiasannya untuk membelikan makanan, kemudian diantarkannya sendiri ke hutan tempat para pejuang bersembunyi. Akibat dari kegiatan itu, sama pula dengan kegiatan wanita di desa lainnya. Mereka harus berhadapan dengan polisi dan kaki tangan Nica dan RMS, dan tak jarang tamparan melayang singgah ke pipi wanita-wanita itu. Keadaan yang sama dialami pula di desa Hila, Hitu, Mamala dan Morela. Di desa Hitu tanggal 27 Desember 1949 para pejuang dari jazirah Hitu berkumpul untuk menyambut dan merayakan upacara *Hari Penyerahan Kedaulatan.* Pada peristiwa itu kaum wanita dari desa Hitu dan desa sekitarnya sibuk membuka dapur umum di setiap rumah pejuang untuk melayani rakyat yang datang mengikuti upacara tersebut. Bahan makanan untuk dapur umum itu didapat dari sumbangan warga desa sekitarnya yaitu; Wakal, Mamala, Moreka, Hila, Liang, Waai dan lain-lain. Kaum wanita di jazirah Leitimur misalnya di desa-desa Amahusu, Latuhalat, Ema Lateri dan di kota Ambon sendiri banyak yang ikut dalam kegiatan politik dan pendidikan. Tokoh wanita *Ina Tuni* yaitu Ina Bala Wattimena yang sejak tahun 1930 telah aktif dalam bagian wanita dari Sarekat Ambon ini, terus berjuang dalam bidang politik bersama tokoh-tokoh dari Partai Indonesia Maluku (PIM) seperti EU Pupella, Patimahu, Patimapau Rewaru dan lain-lain. Seorang wanita lain yaitu Ina Taule adalah pegawai kantor pos merupakan satu-satunya wanita yang duduk dalam kepengurusan PIM. Kedua wanita itu banyak membantu PIM dalam segala kegiatannya, termasuk mengkonsolidasi tenaga Ibu-Ibu untuk kegiatan-kegiatan sosial baik itu kegiatan kemanusiaan maupun kegiatan keagamaan. Kaum wanita lainnya walau tidak mengikuti kegiatan politik dan sosial secara terang-terangan tetapi pada dasarnya mereka semuanya mempunyai kegiatan sendiri-sendiri untuk ikut mewujudkan kemerdekaan. Peranan mereka yang kecil itu berpantulan dari suatu desa ke desa yang lain membentuk suatu kekuatan, ikut menunjang perjuangan bangsanya untuk mencapai kemerdekaan. Dan peranan mereka yang kecil

itu tak dapat diabaikan begitu saja, karena perjuangan itu ada di antara mereka dan mereka pasti terlibat di dalamnya.

Di Namlea- pulau Buru, pada tanggal 3 April 1946 tiba dua buah kapal motor dari Jawa yang membawa pasukan expedisi I ke Maluku. Masing-masing K.M. Sindoro di bawah pimpinan Kapten Ibrahim Saleh dan KM Semeru dipimpin oleh Kapten Mulyadi. Ikut dalam expedisi itu dua orang putri Maluku masing-masing, Nona An Luhukay dan Nona Telly Lawalatta. Kedua putri itu bersama-sama anggota expedisi lainnya berhasil mengkonsolidasi kekuatan dan mengobarkan semangat pemuda-pemuda di Namlea, sehingga pada tanggal 8 April 1948 berkobarlah suatu peristiwa yang terkenal dengan *Pemberontakan Merah Putih.* Pada peristiwa itu kaum nasionalis berhasil menurunkan bendera Belanda merah-putih-biru dan merobek bagian birunya sehingga tinggal merah-putih saja. Bagian Merah Putih itu kemudian dinaikkan lagi ke atas tiangnya. Kemudian kedua wanita itu menghadap Controleuur Gaspersz dan memaksanya supaya keluar dari kantornya dan meninggalkan tempat itu secara baik-baik.[43]

Pada tahun-tahun berikutnya dikirim berturut-turut expedisi ke II, III dan IV. Kemudian pada bulan Oktober 1949. Markas Besar Komando Djawa (MBKD) mengirim expedisi ke V di bawah pimpinan Lettu M.Q. Maruapei. Di dalam expedisi ini terdapat seorang wanita Letnan Dua Samsia. Setibanya di kota Ambon, Letda Samsia mulai menjalankan peranannya sebagai guru agama muda yang baru menyelesaikan pendidikan di Yogyakarta. Setelah menjalankan missinya beberapa lama di kota Ambon dan sekitarnya, gejala Pembentukan Republik Maluku Selatan makin menampakkan diri, bahkan meluas ke Maluku Utara dan Maluku Tenggara. Di samping itu tentara KNIL makin mengganas, dibantu lagi oleh pasukan Westerling (anak buah Westerling) yang didatangkan dari Makassar untuk mengawal pembentukan RMS.

Sehubungan dengan situasi itu maka Letda Samsia, berusaha untuk ke luar dari pulau Ambon. Dengan kedok sebagai guru agama ia menyurati pemerintah di daerah Sanana, Ternate dan Tual (Maluku Utara dan Maluku Tenggara) untuk segera menjemput 2 orang guru agama yang ditugaskan ke daerah itu. Ternyata sambutan dari daerah-daerah itu baik sekali. Jemputan dari Maluku Tenggara lebih cepat datang, maka dengan utusan itu pula Letda Samsia dan Pelda Solaeman menuju kota Tual. Setibanya di Tual pada bulan Desember 1949 mereka memulai kegiatan dengan membuka kursus buta huruf. Setelah beberapa Minggu berjalan, kegiatan ditambah lagi dengan membuka majelis pengajian pada malam hari. Melalui kursus dan majelis pengajian itu Letda Samsia menghimpun kaum wanita dan pria yang ada di sana, baik penduduk asli Tual, keturunan Arab, keturunan Cina, Bugis maupun suku-suku lain yang berada di sana. Mereka juga berhasil mendirikan sebuah madrasah yang diberi nama *Mustha Muallimin.* Dengan dibantu oleh Pelda Solaeman dan Sersan Kuning Renwarin, mereka menghimpun kekuatan pemuda dan memberi penerangan tentang perjuangan kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Dalam kegiatan itu mereka mendapat perhatian dan bantuan yang sangat besar dari masyarakat setempat, karena dalam masyarakat itu terhadap guru agama sangat dihormati.[44]

Setelah beberapa bulan kegiatan itu berjalan, ada kurir musuh yang mencari Letda Samsia sebagai mata-mata yang melarikan diri dari Yogyakarta. Pak Solaeman yang juga dikenal sebagai orang dari Jawa dianggap tidak begitu penting bagi mereka. Oleh sebab itu mereka mempercayai keterangan Pak Solaeman (Pelda Solaeman) bahwa orang yang dimaksud telah berangkat menuju Ternate dan Sanana.

Setelah kurir itu berangkat ke Ambon, Letda Samsia mulai mengadakan persiapan-persiapan untuk menyambut kedatangan TNI ke Maluku Tenggara khususnya kepulauan Kai. Seperti diketahui pada bulan Juni 1950 pasukan TNI dari Batalion 3 Mei telah menduduki Ambon. Segera setelah itu, mengadakan

pendaratan di pulau-pulau lain untuk merebutnya dari tangan RMS. Pasukan lainnya langsung dikirim dari Makasar, ke Dobo kepulauan Aru. Di kepulauan Kai, Letda Samsia mengadakan pengamanan lebih dahulu. Ia mengerahkan pemuda untuk menyergap Controleur La Reve dan tangsi polisi dan memaksa mereka untuk menerima kedatangan TNI tanpa perlawanan.[45] Ternyata usahanya berhasil dengan baik dan memberi peluang bagi pendaratan Bn. 711 di bawah pimpinan Mayor Abdullah dengan aman pada akhir November 1950.[46]

Sesudah keadaan menjadi aman, Ibu Samsia dan Pak Solaeman masih membaktikan diri di bidang pendidikan di Tual dan sekitarnya. Pada awal tahun 1951 Ibu Samsia kembali ke Yogyakarta untuk menyelesaikan studinya di Universitas Islam Indonesia.

b. Peranan dan perjuangan wanita Maluku di luar daerah.

Dalam masa perang kemerdekaan banyak pejuang asal Maluku yang berada di luar daerah ikut berjuang bersama para pejuang lainnya tetapi mengatas namakan daerahnya. Walau ketika itu ada sementara golongan orang Maluku (baca; orang Ambon) yang kurang disukai dan dicurigai sebagai orang-orang yang cenderung berpihak pada Belanda (NICA dan KNIL), namun tidak kurang pula jumlah mereka yang berjuang untuk kemerdekaan bangsanya. Mereka adalah kaum intelek, yang pernah mengecap pendidikan Belanda.

Di pulau Jawa kegiatan perjuangan orang Maluku dipusatkan di tiga kota yaitu di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Di Jakarta dibentuk suatu wadah perjuangan yang disebut Angkatan Pemuda Indonesia (API) Ambon, di Yogyakarta dibentuk wadah perjuangan dengan nama Pemuda Indonesia Maluku (PIM) dan di Surabaya dibentuk wadah perjuangan dengan nama Pemuda Republik Indonesia (PRI) Maluku.[47]

Di Jakarta dan sekitarnya kaum wanita Maluku yang bergabung dalam API-Ambon antara lain, Dokter Nona Din Tama-

ela, Nona Sar Sapakua, Nona Latuasan dan lain-lain berusaha memberi penerangan dan pengertian bagi masyarakat di beberapa kampung dan pasar, bahwa orang-orang Maluku adalah saudara sebangsa Indonesia. Hal itu dilaksanakan berhubung timbulnya bentrokan-bentrokan antar suku yang disebabkan karena kesalah pahaman antara pemuda-pemuda pejuang dengan bekas tentara KNIL. Semua orang Ambon (baca: Maluku) dianggap kaki tangan NICA sehingga dikejar-kejar dan mengakibatkan jatuhnya korban. Korban-korban diangkut oleh pemuda pemudi dari Api Ambon ke Kamp. Ambon di Laan-Wiechert, di jalan Kramat 7 Jakarta Pusat sekarang, untuk diberikan pertolongan seperlunya. Pemudi-pemudi Ambon ikut pula dalam kegiatan dapur umum di bawah pimpinan Ibu Erna Satoto Jayadiningrat, untuk menyalurkan bantuan makanan bagi para korban. Jadi kegiatan kaum wanita di API Ambon itu meliputi bidang-bidang penerangan, kepalang merahan, dan dapur umum. Ketika pemerintah R.I. hijrah ke Jogyakarta banyak pejuang yang juga ikut hijrah ke sana. Di antara rombongan itu terdapat pula sekelompok kaum wanita Maluku antara lain Nona An Latuasan dan Sar Sopakua. Di Jogyakarta kegiatan kaum wanita Maluku mengikuti irama pasang surutnya perjuangan di kota tersebut. Mereka bekerja sebagai tenaga sukarela pada rumah sakit Petronella, mengisi kekosongan tenaga perawat di sana. Beberapa wanita Maluku diperbantukan pada kepolisian Tugu untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pengungsi yang datang membanjiri Yogyakarta dari daerah-daerah pendudukan Belanda.

Dalam bulan Februari 1946 kaum wanita Maluku mendirikan Pengurus Pusat Pemuda Indonesia Maluku bahagian wanita atau seksi wanita dari PIM. Susunan pengurus dari seksi kewanitaan tersebut terdiri dari:

- An. F. Latuasan (Ny. Pupella) sebagai Ketua.
- Ny. Chris Watimena – Matulessy sebagai Sekretaris.
- Ny. Subandono–Siwalete sebagai Bendahara.[48]

Kegiatan yang dilakukan kaum wanita PIM itu meliputi bidang sosial ekonomi, politik dan penerangan, sama seperti yang dilakukan para wanita pejuang lainnya.
Kegiatan-kegiatan mereka antara lain:

1. mendirikan sebuah asrama dan membentuk dapur umum untuk menampung orang-orang Indonesia Maluku yang kembali dari Australia dan dari tempat pembuangan Digul,
2. menampung dan memberi makanan bagi para bekas KNIL yang baru ke luar dari kamp. interniran Bondowoso.
3. membawa dan atau mengantar makanan untuk para pejuang di garis depan bersama-sama dengan anggota Laswi Yogyakarta.
4. mengadakan kegiatan kepalang merahan dengan membantu para pejuang yang terluka dan merawat mereka yang sakit.
5. mengunjungi orang-orang Maluku bekas anggota KNIL dan pegawai Belanda secara terus-menerus untuk memberi penerangan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Untuk mengajak kaum wanita Maluku lainnya meresapi perjuangan kemerdekaan itu, wanita PIM berusaha mengembangkan organisasinya ke kota-kota seperti Cirebon, Purwakarta, Pekalongan, Magelang, Salatiga, Yogyakarta, Madiun, Kediri, Malang, Mojokerto, Batu dan Bondowoso, di mana terdapat masyarakat asal Maluku berdomisili. Mereka mengadakan pula kontak dengan organisasi wanita lainnya dan menjadi anggota dari Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Selain itu mereka mengadakan kontak dengan Pemuda Putri Indonesia (PPI), Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI), dan Lasykar Wanita Indonesia (Laswi) serta partai-partai politik lainnya. Mereka berusaha pula dalam bidang sosial ekonomi yakni dengan membuka usaha-usaha tertentu di mana para wanita yang ditinggal suaminya dapat bekerja untuk menjamin kelangsungan hidup mereka; antara lain membuat rokok, membuat kerajinan tangan

dan membuka warung makanan. Salah sebuah kedai makanan yang berkembang ketika itu diberi nama restauran Sarinande.[49]

Di bawah Ibu An Pupella-Latuasan sebagai ketua seksi kewanitaan PIM, wanita Maluku juga melakukan berbagai kegiatan untuk membantu pemerintah, khususnya pemerintah daerah Maluku yang ketika itu masih berkedudukan di Yogyakarta. Antara lain dengan membantu Kantor Gubernur Maluku di Yogya sebagai penghubung dengan Kementerian Sosial, mengikuti dan membantu kursus-kursus politik yang diselenggarakan oleh Gubernur Maluku dan aparat pemerintahannya, menyelenggarakan siaran-siaran radio dalam bahasa Belanda mengenai kemerdekaan Indonesia. Selain itu mengisi kekosongan tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang guru-gurunya berangkat ke medan pertempuran. Di samping itu semua, masih banyak kegiatan yang dilakukan wanita Maluku di bawah pimpinan Ibu-ibu lainnya seperti Ibu Yetti Latuharhary yang aktif dalam organisasi sosial dan keagamaan.

Pada bulan Februari 1947, dalam perjalanan menuju Jakarta Ibu An Pupella Latuasan ditangkap oleh Belanda di Kranji dan selanjutnya ditawan di penjara Glodok sebagai tawanan politik.[50]

Pada bulan Desember 1948 ketika terjadi Aksi Militer Belanda ke II Ibu An yang ketika itu membantu di R.S. Petronella ikut menyelundupkan obat-obatan, senjata, bahkan uang dan bahan pakaian untuk para pejuang yang berada di luar kota Yogyakarta. Di pertengahan tahun 1949, Ibu An Pupella Latuasan kembali ke Maluku bersama suaminya Bapak FM Pupella atas panggilan dari Partai Indonesia Maluku yang diketuai oleh saudaranya EU Pupella.

Selain kegiatan di bidang sosial, politik, ekonomi dan penerangan, kaum wanita Maluku juga bergerak dalam bidang kemiliteran di Yogyakarta misalnya Ibu Samsia dan Sania. Kedua pemudi ini adalah mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Fakultas Agama yang berasal dari Maluku. Antara tahun 1946

dan 1949 di samping mengikuti perkuliahan kedua pemudi itu ikut bergerilya di sektor selatan bersama anggota-anggota Resimen Telukabesi atau Batalion Pattimura dari lasykar seberang di bawah pimpinan Mayor Pellupesy. Kedua wanita itu mulai bergerak sebagai mata-mata kemudian masuk sebagai anggota tentara. Dalam menjalankan kegiatan itu, berbagai resiko mereka hadapi bahkan beberapa kali ditangkap dan diinterograsi. Berkat peranan kedua wanita itu, satu peleton tentara Belanda dapat dibekuk oleh Batalion Pattimura dan senjata Belanda dirampas.[51]

Berkat hubungan baik mereka pula dengan tentara Belanda berbagai informasi mengenai kekuatan musuh dapat diterima oleh tentara kita.[52] Kegiatan-kegiatan Samsia yang berhasil dengan baik menarik perhatian pimpinan TNI sehingga pada bulan Oktober 1949 ia dikirim ke Maluku oleh bahagian I MBKD (Markas Besar Komando Djawa) dengan pangkat "Letnan dua". Letnan dua Samsia bersama beberapa kawannya antara lain Letnan satu M. Qasim Marupei sebagai pimpinan expedisi dan pembantu Letnan dua Solaeman, dengan tugas memonitoring kekuatan RMS yang ada di Maluku.

Di kota Surabaya dan sekitarnya banyak pula kaum wanita Maluku yang mengadakan kegiatan untuk membantu para pejuang dalam Perang Kemerdekaan itu. Melalui wadah perjuangan Pemuda Republik Indonesia (PRI) Maluku, kaum wanita turut berpartisipasi melakukan berbagai kegiatan. Mereka bekerja sama dalam kegiatan kepalang merahan di bawah koordinasi Ibu Reny Siwabessy (isteri dokter GA Siwabessy) dan Sar Sopakua dari Palang Merah Indonesia. Rumah Ibu Renny dijadikan markas perjuangan dan sekaligus sebagai markas kepalang merahan, sebab suami Ibu Renny seorang dokter

Pekerjaan merawat senjata adalah sebagian kegiatan kaum wanita di samping menjalankan pekerjaan di dapur umum yang juga dikepalai oleh Ibu Renny. Di rumahnya, Ibu Renny dan dokter Siwabessy melayani orang-orang yang membutuhkan

perawatan dan pengobatan bahkan bahan makanan dan pakaian. Di samping kegiatan dan kesibukan-kesibukan itu Ibu Renny masih mengajar di sekolah desa tanpa bayaran. Melalui pengajaran beliau menanamkan rasa harga diri dan semangat nasionalisme Indonesia pada anak didiknya. Ibu Renny juga seorang seniman. Melalui nyanyian beliau memupuk perasaan nasionalisme itu bagi anak didiknya dan masyarakat umumnya.[53] Beberapa wanita yang bekerja sama dengan beliau antara lain, Lies Tauran, Din Wattimena dan Sar Sopakua serta Caroline Tomasoa (Nyonya Ina Lolokolo).

Nona Sar Sopakua sebagai petugas resmi Palang Merah Indonesia beberapa kali mendapat tugas ke daerah-daerah musuh dan ke daerah Indonesia Timur. Pada tahun 1950 ia ditugaskan ke Australia, namun malang tak dapat ditolak di negara Kangguru itu ia meninggal dunia dan jenazahnya dikembalikan ke Ambon.

Demikian kegiatan kaum wanita Maluku di tiga kota di pulau Jawa. Seperti diketahui ketiga kota tersebut terdapat tiga wadah perjuangan. Ketiga wadah itu kemudian bergabung mengadakan kongres Pemuda Indonesia Maluku ke II di Malang dan bersepakat mendirikan *Divisi* Pattimura. Komandan Divisi dijabat oleh dokter Pattirajawane dan kepala stafnya dijabat oleh dokter Siwabessy. Tujuan utama pembentukan divisi ini adalah untuk menggempur musuh di daerah Maluku kemudian nama ini akan diabadikan pada organ militer di daerah tersebut.[54]

Divisi Pattimura kemudian menjadi resimen Telukalessy dengan komandannya Bapak E.M. Pupella. Dari Resimen ini muncul Srikandi-srikandi Maluku yang ikut bergerilya di Yogyakarta dan menjalankan misi expedisi ke Maluku. Mereka itu seperti yang telah disebut di muka, adalah Nona Telly Lawalatta, Nona An Luhukai, Letda Samsia, Serma Sania dan Nona Saar Sopakua.

Demikian peranan kaum wanita Maluku yang telah ikut mengambil bagian di masa Perang Kemerdekaan bersama-sama dengan kaum wanita lainnya di daerah masing-masing.

CATATAN
BAB III

1) H.C. Zentgraaff, *Aceh,* P.N. Beuna, Jakarta, 1983, hlm. 78.
2) Team ex. Pengurus Tentara Pelajar, Peranan Tentara Pelajar Resimen II Aceh Dalam Perang Kemerdekaan, Makalah dalam rangka penyusunan buku Sejarah Tentara Pelajar di Aceh. hlm. 6.
3) *Ibid,* hlm. 7.
4) *Ibid,* hlm. 8.
5) Wawancara dengan Ibu Ainal Mardhiah, Banda Aceh, September 1985.
6) Wawancara dengan Ibu Syarifah, Banda Aceh, September 1985.
7) Dr. I. Ibrahim Alfian, M.A. et al, *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (1945–1949),* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh, 1982, hlm. 100–101.
8) Ny. T.O. Ihromi, M.A., *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia,* P.N. Gajah Mada University Press, hlm. 209.
9) Wawancara dengan Bapak M.D. Kartawinata di Manado pada tanggal 19 September 1985.

10) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Utara,* Proyek IDKD, 1983, hlm. 77–79; Departemen Hankam, *Peristiwa Merah Putih di Sulawesi Utara,* Jakarta, hlm. 9–10.
11) Ben Wowor, *Peristiwa Patriotik (Merah Putih) 14 Februari 1946 di Manado,* Manado, 1972.
12) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (IDKD 1983), *Op. Cit,* hlm. 103.
13) Depdikbud. (IDKD 1983), *Op. Cit.,* hlm. 91–92.
14) Keterangan Ibu Maas Wuisan-Tangkilisan, *Op. Cit.;* Departemen Hankam, *Op.Cit.,* hlm. 14.
15) *Loc. Cit.*
16) Keterangan Ibu Maas Wuisan-Tangkilisan.
17) Depdikbud. (IDKD 1983), *Op. Cit,* hlm. 69.
18) *Ibid,* hlm. 71.
19) Keterangan Bapak Hasyim Manuarfa.
20) *Ibid.*
21) *Ibid.*
22) Depdikbud. (IDKD 1983), *Op. Cit,* hlm. 99.
23) *Ibid,* hlm. 102.
24) Keterangan Bapak L.C. Mokoginta, *Op. Cit.*
25) Depdikbud. (IDKD 1983), hlm. 99–100.
26) *Ibid,* hlm. 143.
27) Ibid, hlm. 116–117; Wawancara Ibu Fatimah Lahida-Wonggo di Manado, 20 September 1985.
28) Rabinhatun Idris, dkk, *Peranan Wanita di Sulawesi Selatan Menentang Penjajahan Asing,* Panitia Seminar Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan menentang Penjajahan Asing, Ujung Pandang, 8–11 Desember 1982, hlm. 10.
29) *Ibid.*
30) Wawancara dengan Ibu H. Oemmi Hani, A. Salam di Ujung Pandang pada tanggal 10 September 1985.
31) H. Oemmi Hani A. Salam, *Kegiatan di masa Perjuangan,* tulisan pengalaman dan Riwayat Perjuangan, hlm. 2.
32) Ibid, hlm. 9.

33) Wawancara dengan Ibu Sitti Hasnah Suwardi di Ujung Pandang pada tanggal 11 September 1985.
34) Said Muhammad, *Korban 40.000 di Sulawesi*, Panitia Peringatan Sewindu Korban 40.000 di Sulawesi, Yogyakarta, tahun 1954, hlm. 19–20.
35) Tjok Istri Saraswati, *Peranan Wanita dalam Revolusi Physik di Badung, Tabanan, Buleleng, 1945–1949*, hlm. 37.
36) *Ibid*, hlm. 39.
37) Depdikbud. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Maluku*, Proyek IDSN, 1983/1984, hlm. 85.
38) Wawancara dengan Ibu Salama (62 tahun) dan Ibu Fatimah (60 tahun) di Ambon pada tanggal 5 Juli 1985.
39) Sejarah Militer Daerah Militer XV/Pattimura, *Mengenal dari dekat Komando Daerah Militer XV/Pattimura*, 1974, hlm. 18.
40) *Ibid*, hlm. 21.
41) Wawancara dengan Ibu Aminah (59 tahun) di Ambon pada tanggal 8 Juli 1985.
42) Wawancara dengan Nyonya Fatimah Elly (56 tahun), Jakarta, pada tanggal 24 Desember 1985.
43) Keterangan Bapak Amin Elly (62 tahun), Jakarta, pada tanggal 24 Desember 1985.
44) Wawancara dengan Ibu Samsiah Solaeman (62 tahun), di Kampung Batuceper Tanggerang, pada tanggal 24 Januari 1986.
45) *Ibid.*
46) Sejarah Militer (1974), *Op. Cit.*, hlm. 20.
47) Wawancara dengan Ibu A.F. Latuasan Pupella (60 tahun), Ambon, pada tanggal 9 Juli 1985.
48) *Ibid.*
49) *Ibid.*
50) *Ibid.*

51) Wawancara dengan Ibu Samsiah Solaeman.
52) *Ibid.*
53) Wawancara dengan Ibu Renny Matulessy Putiray (70 tahun), Jakarta, pada tanggal 30 Oktober 1985.
54) Sejarah Militer (1974), *Op. Cit.*, hlm. 16.

IV. PENUTUP

Di dalam uraian penutup ini gambaran menyeluruh yang dapat disimpulkan antara lain bahwa peranserta dan kegiatan para wanita di masa Perang Kemerdekaan tahun 1945–1950 sangat bervariasi. Perjuangan kaum wanita baik di Aceh, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali dan Maluku, pada dasarnya tidak jauh berbeda. Mereka bergerak dalam berbagai kegiatan, baik melalui organisasi maupun dalam bentuk kelasykaran, dan jelas terlihat bahwa mereka itu terdiri dari bermacam-macam kelompok atau golongan yang tersebar di daerah-daerah pedalaman maupun di kota di mana bangsa Belanda tinggal dan berkuasa.

Keberanian kaum wanita Indonesia dalam bertindak memang telah menimbulkan kekaguman baik di pihak Belanda maupun Jepang. Seperti di Aceh, dalam mempertahankan suatu pendirian yang merupakan kepentingan nasional dan agama, para wanita bergerak baik di belakang layar maupun secara terang-terangan; berani memimpin perlawanan dan ini tidak kalah unggulnya dengan kaum pria. Mereka berjuang atas dasar *sabilu'llah* (jalan Allah), menolak setiap kompromi dan tidak akan mengkhianati wataknya sebagai seorang wanita. Mereka

hanya mengenal alternatif membunuh atau dibunuh. Di antara mereka itu tersebutlah Cut Meutia, Cut Nyak Dien, Pocut di Rambong, Pocut Baren, adalah wanita-wanita yang telah memainkan peranan dalam politik dan peperangan di Aceh serta punya pengaruh yang cukup kuat di kalangan masyarakat.

Di Sulawesi Utara, tokoh Zus Kando, Nani Wartabone, Nona Gusta Ngantung dan masih banyak yang lain, tampil membakar semangat kaum wanita dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan tanah airnya. Kemudian di Sulawesi Selatan, wanita-wanita yang berkedudukan sebagai ratu atau permaisuri, seperti Andi Kambo, Opu Daeng Risaju atau Indok Saju, ibu Depu, juga berhasil mengobarkan semangat perjuangan, bahkan tampil sebagai pemimpin melawan penjajah asing. Adapun di Bali, dengan kembalinya beberapa pemuda setelah mengikuti pendidikan di Jawa, kemajuan kaum wanita Bali cukup pesat. Kehadiran kaum wanita di antara kaum pria bukan sesuatu yang aneh, bahkan sesudah itu mereka pun meneruskan pelajarannya ke luar Jawa. Di antara mereka itu antara lain terdapat Nyonya Merta (Nona Rapeg), Nona Sang Ayu Kompyang, Nona Sampreng, Made Catri. Akhirnya di Maluku, tokoh wanita yang tergabung dalam *Ina Tuni* seperti: Ina Bala Wattimena, Ina Taule, bersama tokoh-tokoh wanita lainnya bergerak bersama baik dalam bidang politik maupun dalam bidang sosial, khususnya pada kegiatan kemanusiaan dan keagamaan.

Organisasi-organisasi wanita itu, baik yang sudah bergabung dalam Kowani maupun yang belum, semuanya berpartisipasi turut membantu dengan sepenuh jiwanya dalam perjuangan phisik rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan tanah air yang mereka cintai. Dan mereka menyadari bahwa dengan pendidikan yang diberikan, dapat memberi pengaruh yang besar terhadap pembinaan semangat perjuangan dan kebangsaan.

Wanita dengan tugas ganda itu ternyata mampu bergulat dengan keadaan yang harus dihadapinya. Dalam keadaan apapun, wanita harus dapat mengambil keputusan. Contoh dalam mengisi keperluan dapur umum, palang merah, kaum wanita punya cara tersendiri untuk melaksanakan dan mengatasi bila ada kekurangan-kekurangan. Di satu pihak kaum wanita pun harus menjaga kelangsungan kehidupan keluarganya, di lain pihak dia juga harus memikirkan bagaimana membantu pejuang-pejuang di garis depan, meskipun di antara mereka ada yang tidak tahu menggunakan senjata untuk mempertahankan dirinya. Namun semangat mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan tanah air mengalahkan segalanya. Dengan semangat yang sudah digembleng sejak masa kekuasaan Jepang, kaum wanita mau tidak mau ikut terseret dalam arus keadaan pada waktu itu. Mereka yang tadinya hanya berperan dalam lingkungan rumahtangga dan keluarganya saja, sekarang terjun dalam kegiatan kemasyarakatan. Kaum wanita sadar akan kewajibannya sebagai warga negara untuk turut aktif menunjang usaha mempertahankan kemerdekaan. Meskipun mereka tidak harus terjun semua maju ke medan pertempuran, tetapi mereka juga berlatih untuk menghadapi bahaya.

Dalam hal mencari perbekalan, baik itu bahan makanan, obat-obatan, pakaian dan lain sebagainya, kaum wanita dapat mengerahkan anggotanya. Di sinilah dimensi baru terbuka bagi kaum wanita. Dalam masa perang kemerdekaan melawan penjajahan kembali ini, organisasi-organisasi wanita tampil sesuai dengan tuntutan zaman. Kegiatan yang nampak jelas ialah adanya semangat persatuan dan semangat perjuangan.

Kemudian bila kita melihat pada wilayah-wilayah yang ketat dengan adat dan ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan yang mengikat dalam kehidupan sehari-hari.untuk kaum wanitanya, seperti di Aceh dan Sulawesi Selatan, maka kegiatan dan peranan mereka secara keseluruhan dalam membantu perjuangan kaum pria tidak dapat diabaikan. Sedikit

banyak kaum wanita mempunyai peranan yang nyata dalam kegiatan pertahanan dan turut berpartisipasi dalam mempersiapkan keperluan pejuang-pejuang di garis depan.

Akan halnya di Sulawesi Utara, Bali dan Maluku, kaum wanita di sini tidak begitu terikat oleh adat yang ketat, sehingga mereka mudah bergerak terutama dalam memperoleh pendidikan barat, agar mereka mempunyai kemampuan untuk mengabdikan diri pada kepentingan masyarakat luas. Pendidikan dianggap penting, karena dapat membantu menghilangkan segala macam penderitaan yang ada dalam masyarakat pada waktu itu. Dari penelitian di kelima wilayah: Aceh, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali dan Maluku, nampak bahwa peranan wanitanya mempunyai kesamaan di dalam perjuangannya mempertahankan dan membela kemerdekaan negaranya. Pengalaman-pengalaman di medan pertempuran dan di garis belakang pada umumnya tidak banyak berbeda, meskipun situasi dan kondisinya tentu berbeda.

Dari kenyataan yang ada, kita dapat memahami bahwa faktor pendidikanlah antara lain yang menjadi pendorong bagi kaum wanita untuk melangkah sesuai perkembangan zaman, namun tanpa meninggalkan tugas dan kedudukannya dalam keluarga dan rumahtangga.

Dengan menghimpun diri baik melalui wadah-wadah yang dibentuk oleh kaum wanita sendiri, maupun dalam badan-badan yang dibentuk bersama-sama kaum pria, juga yang bergerak secara perseorangan, mereka dapat bersatu membantu para gerilyawan. Di sini pun kaum wanita juga telah memikirkan perlu adanya keseimbangan tanggungjawab antara kelangsungan hidup keluarga dan masyarakat. Peranan yang nampak lagi yakni selama wanita menangani dapur umum, biasanya makanan untuk tentara atau rakyat yang bertempur tidak pernah kekurangan. Demikian pula sebelum pasukan pejuang datang ke suatu daerah, mereka sudah diberitahu terlebih dahulu. Bukankah semua ini dikerjakan oleh wanita? Dengan cekatan mereka juga

segera mengumpulkan bahan-bahan makanan untuk kepentingan pasukan. Jumlah memang tidak menentu, terkadang sedikit, terkadang banyak. Dan wanita-wanita yang bekerja di dapur umum pun diatur bergiliran. Di antara mereka tidak ada yang merasa lelah dan tidak ada yang merasa sayang atau mengeluh untuk memberikan sumbangan dari sebagian apa yang dimilikinya untuk kepentingan perjuangan. Betul-betul rasa solidaritas seperti ini jarang ditemui di kota-kota besar.

Hal lain yang tidak kurang pentingnya ialah kegiatan memberikan penerangan tentang arti perjuangan dan kemerdekaan. Tanpa penerangan yang terus-menerus dan berkesinambungan, rakyat di pelosok-pelosok, apalagi yang tidak dapat membaca dan menulis, tidak akan tahu bagaimana situasi negara atau peristiwa apa yang sedang terjadi di pusat-pusat kota atau daerah sekitarnya.

Demikianlah berbagai cara telah dilakukan oleh para wanita dalam usahanya membangkitkan semangat kebangsaan. Peningkatan dan kematangan dalam aktivitas mereka patut dicatat, bahwa dalam bidang-bidang kegiatan yang semula hanya ditangani oleh laki-laki, ternyata kaum wanita pun dapat melaksanakannya dan ternyata peranan serta keikutsertaan wanita pada masa perang kemerdekaan, telah memberikan andil yang cukup berarti dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh pada tahun 1950.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Alfian, Ibrahim, T., Dr., MA, et.al., *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh 1945–1949,* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh, 1982

Amin, S.M., Mr., *Kenang-kenangan dari Masa lampau,* Jakarta, Pradnya, 1978

Benda, H.J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada masa pendudukan Jepang,* Jakarta, Pustaka Jaya, 1980

Dharma Wanita Propinsi Sulawesi Utara, *Pahlawan Nasional Ibu Maria Walanda Maramis,* Manado, 1983

Djojohadikusumo, Margono, *Kenang-kenangan dari tiga zaman,* terj. Drs. Muhammad Rajab, Jakarta, Indira,

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di daerah Bali,* Proyek IDSN, Jakarta, 1983/1984

———, *Sejarah Kebangkitan Nasional (1900–1942) Daerah Bali,* Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978

———, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan kolo-*

nialisme di Daerah Maluku, Proyek IDSN, Jakarta 1980/1981

———, *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan kolonialisme di Sulawesi Utara*, Proyek IDSN, Jakarta, 1984

———, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sulawesi Utara*, Proyek IDKD, Jakarta, 1983

———, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi Utara*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1979

Departemen Pertahanan Keamanan, *Peristiwa Merah Putih di Sulawesi Utara*, Jakarta, 1972

Elsbree, Williard, H., *Japan's Role in Southeast Asian Nationalist Movement 1940–1942*, Harvard University Press Cambridge, Massachussets, 1953

Gusti Ayu Putri, "Pemerintahan di Bali tahun 1945–1949", Skripsi Sarjana, FSUI, 1985

Ida Bagus Gde Budharta, "Peranan Wanita dalam Pergerakan Nasional di Bali" (sebuah studi tentang permulaan emansipasi wanita di Bali)

Ihromi, T.O., Dr, MA, Ny, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, Gajah Mada University Press

Jamil, Joenoes, M., Riwayat Barisan "F" (Fujiwara Kikan) di Aceh, Banda Aceh, Pusat Latihan Ilmu-Ilmu Sosial, 1975

Jarahdam I/Iskandar Muda, *Dua Windu Kodam I/Iskandar Muda*, 1972

Kahin, George Mc. Turnan, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca, 1977

Kanahele, George, "The Japanese Occupation of Indonesia Prelude to independence", Ph.D. Thesia, Cornell University, 1967

Kementrian Penerangan R.I., *Republik Indonesia Propinsi Sulawesi*, Jakarta, 1953

Moniaga, Eveline E, "Pendidikan Wanita di Minahasa sebagai salah satu kegiatan Pikat, sejak awal berdirinya sampai tahun 1931", Skripsi Jurusan Sejarah FSUI, Jakarta 1983

Nasution, A.H., *Sekitar Perang Kemerdekaan*, I, Dinas Sejarah Militer TNI Angkatan Darat, 1976

Nursima Ali, H., "Profil Pejuang Wanita di Daerah Sulawesi Selatan", "Skripsi Sarjana UNHAS, 1983

Nugroho Notosusanto, ed., *Sejarah Nasional Indonesia*, VI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek IDSN, tahun 1981/1982

Nyoman Leci Artini, "Peranan Perkumpulan Wanita di Bali Masa Pendudukan Jepang 1942–1945", Skripsi Sarjana Muda Jurusan Ilmu Sejarah, Universitas Udayana, Denpasar, 1981

Nyoman Suargana, "Perkembangan Pergerakan Wanita di Bali (1935–1942)", Skripsi Sarjana Muda Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Udayana, Denpasar, 1979

Pikaar, A.J., *Atjeh en de oorlog met Japan*, Bandung: van Hoeve, 1949

Pringgodigdo, A.G., *Tatanegara di Djawa pada waktu pendudukan Djepang dari bulan Maret sampai bulan Desember 1942*, Jajasan Fonds Universiteit Negeri Gadjah Mada, Jogyakarta, 1952

Pringgodigdo, A.K., *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1984 (1949)

Pudjiwati Sajogyo, *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*, Penerbit C.V. Rajawali, Jakarta, 1983

R.Z. Leirissa, MA, *Maluku dalam Perjuangan Nasional*, Lembaga Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1973

Rabihatun Idris, dkk., "Peranan Wanita di Sulawesi Selatan menentang Penjajahan Asing", Seminar Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan menentang Penjajahan Asing, Ujung Pandang, 8–11 Desember, 1982

Sejarah Militer Daerah Militer XV/Pattimura, *Mengenal dari dekat Komando Daerah Militer XV/Pattimura*, 1974

Sekretariat Negara R.I., *Tiga puluh tahun Indonesia Merdeka, I:* 1945–1949, Jakarta, 1981 (1977)

Sihombing, ODP, *Pemuda Indonesia menentang fasisme Jepang,* Djakarta, Sinar Djaja, 1962

Sukanti Suryochondro, *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia,* Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1984

Subadio, Maria Ulfah dan T.O. Ihromi, ed., *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia, Bunga Rampai Tulisan-Tulisan,* Gajah Mada University Press Yogyakarta, 1983 (1978)

Sewaka, *Tjorat-Tjoret dari djaman ke djaman,* Bandung

Tjok Istri Saraswati, "Peranan Wanita dalam revolusi physik di Badung, Tabanan, Buleleng 1945–1949", Skripsi Sarjana Muda Jurusan Ilmu Sejarah, Universitas Udayana, Denpasar, 1982

Vreede-de Stuers, Cora, *The Indonesian Woman Struggles and Achievements,* 's-Gravenhage, 1960

Veer, Paul van't, *Perang Belanda di Aceh,* terj. Aboe Bakar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh, 1977

Wowor, B., *Peristiwa Patriotik (Merah-Putih): 14 Pebruari 1946 di Manado,* Departemen Penerangan RI, Prop. Sulawesi Utara, 1972

Zentgraaff, H.C., *Aceh,* PN. Beuna, Jakarta 1983

Suratkabar

Asia Raya, Februari 1944


P. WEH
BANDA ACEH
JOULIMEUM
SELAT SUMATERA
SIGLI
TANGSE
KAB. ACEH BESAR
KAB. PIDIE
KAB. ACEH UTARA
SEUM-PANG
KAB. ACEH TENGAH
TAKENGON
KAB. ACEH TIMUR
KAB. CALANG
ACEH BARAT
KUALA SIMPANG
KAB. ACEH TENG. BARA
BLANG KEJEREN
SAMUDRA INDONESIA
MEULABOH
BELANG PIDIE
KAB. ACEH SELATAN
KOTA CANG
PROP. SUMATERA UTARA
U
P. SIMELUE
TAPAK TUAN
SINABANG
SIKONG AYI
P. BANYAK

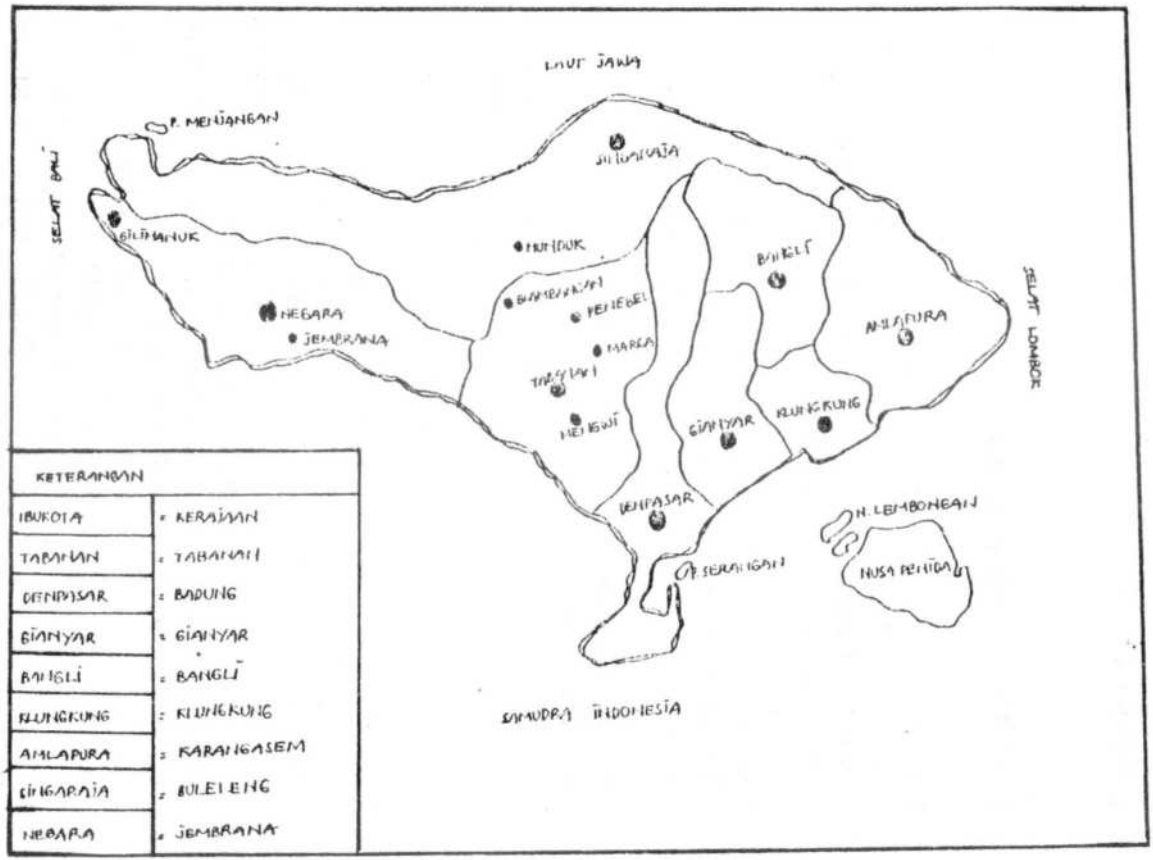

KETERANGAN	
IBUKOTA	= KERAJAAN
TABANAN	= TABANAN
DENPASAR	= BADUNG
GIANYAR	= GIANYAR
BANGLI	= BANGLI
KLUNGKUNG	= KLUNGKUNG
AMLAPURA	= KARANGASEM
SINGARAJA	= BULELENG
NEGARA	= JEMBRANA

LAMPIRAN

DAFTAR INFORMAN DAERAH ACEH

1. N a m a : Sukayah Sadiah
   Tempat/tgl. lahir : Montasiek, Aceh Besar: 7 Juni 1922
   Kegiatan di masa Perang Kemerdekaan : anggota PERWARI cabang Aceh Besar Ketua GPII, tahun 1947

2. N a m a : Hasnah Anwar Bustam
   Tempat/tgl. lahir : Bonjol, 25 Juli 1924
   Alamat : Yayasan Kesejahteraan Anak, Banda Aceh
   Kegiatan di masa Perang Kemerdekaan :
   – anggota Muslimat Masyumi
   – anggota Aisyah
   – anggota Perwari, tahun 1948, ikut secara aktif memberantas butahuruf, memberikan penerangan tentang kemerdekaan.

3. N a m a : Syarifah Hadidjah
   Tempat/tgl. lahir : Meulaboh, 25 Desember 1931
   Alamat : d/a. Asrama Putri Kanwil Depag. Jl. Teuku Nyak Arif, Lorong Panjau Darussalam, Banda Aceh
   Kegiatan di masa Perang Kemerdekaan :
   – Sekretaris Palang Merah Tentara Pelajar Islam
   – Ikut mengumpulkan bahan makanan dari rumah ke rumah
   – Anggota Gerakan Pemuda Islam Indonesia, dan ikut serta memberikan penerangan ke desa-desa tentang kemerdekaan.

4. N a m a : Hajah Asmah
Tempat/tgl. lahir : Slimun, Juni 1931
Alamat : Komp. Taman Sari Baru – SD. 29 Banda Aceh
Kegiatan di masa Perang Kemerdekaan : – anggota GAPII
– anggota Palang Merah TPI
– ikut aktif di bidang penerangan

5. N a m a : Nurdin Mahmud
Tempat/tgl. lahir : Aceh Barat, 16 November 1927
Alamat : Jl. Jati 10, Banda Aceh
Kegiatan di masa Perang Kemerdekaan : – Pengurus Pelajar Islam (Persatuan Pelajar Islam Indonesia), dan aktif di seksi perjuangan.
– Ikut membangkitkan semangat rakyat, dengan memberikan penerangan.

6. N a m a : T.A. Mahmudi
Tempat/tgl. lahir : Lhok Seumawe, 16 Februari 1930
Alamat : Kanwil Departemen Agama Jl. Balaikota, Banda Aceh
Komp. PGAN, Jl. Teuku Umar, Lamtemen, Banda Aceh
Kegiatan di masa Perang Kemerdekaan : anggota TPI

7. N a m a : Mahyudin Hasyim
Tempat/tgl. lahir : Kembang Tanjung (Sigli), 17 Desember 1929
Alamat : Jl. Ujung Batee 7, Banda Aceh
Kegiatan di masa Perang Kemerdekaan : anggota TRIP

LAMPIRAN

DAFTAR INFORMAN SULAWESI UTARA

1. N a m a : Felix Rudolf Andaria alias Tatehe
   Tgl./tempat lahir : 10 Februari 1916 di desa Kuma Sangihe Talaud (Satal).
   Kegiatan di masa Perang Kemerdekaan :
   - Anggota BPNI/PPI Satal
   - Anggota Partindo/Gappi Satal
   - Aksi Agiprop
   - Aksi pengacauan ekonomi dan penyelundupan senjata dari Tawao dan Davao.

2. N a m a : Ny. L. Andaria Menangkoda
   Tgl/tempat lahir : 28 Mei 1936/Sangir
   Kegiatan di masa Perang Kemerdekaan :
   - masih bersekolah

3. N a m a : Ny. F. Lahida-Wonggo (Fatimah)
   Tgl/tempat lahir : 27-11-1927 - Tondano
   Kegiatan di masa Perang Kemerdekaan :
   - IM (Indonesia Muda) 1945–1946
   - Anggota BPNI (Barisan Pemuda Nasional Indonesia).
   - Anggota PPI (Pasukan Pemuda Indonesia)
   - Anggota TRISU (Tentara Republik Indonesia Sulawesi Utara)
   - Giat dalam Barisan Palang Merah di Tondano.

4. N a m a : Ny. Dra. Petronella Maas Wuisan Tangkilisan.
   Tgl/tempat lahir : 3 Nopember 1923, Manado
   Kegiatan di masa Perang Kemerdekaan :
   - Aktif terlibat dalam Peristiwa Merah Putih, Manado.

5. N a m a : Hasyim Manuarfa.
Tgl/tempat lahir : 1925, di Gorontalo
Kegiatan di masa Perang Kemerdekaan : – Anggota PSII Bolaang Mangondow
– Anggota GIM (Gerakan Indonesia Merdeka).
– Anggota PII/Lasykar Banteng Bolaang Mangondow.

6. N a m a : Ny. L.C. Mokoginta Pontoh
Tgl/tempat lahir : 14 Nopember 1934/Bolang Stang.
Kegiatan di masa Perang Kemerdekaan : di Bolaang Mangondow.

7. N a m a : J.C. Mokoginta
Tgl/tempat lahir : 8 April 1928/Kotamobagu
Kegiatan di masa Perang Kemerdekaan : – Anggota Pengurus GIM (Gerakan Indonesia Merdeka) Bolaang Mongondow.

8. N a m a : B. M u n d o k
Tgl/tempat lahir : Molinou, Kotamobagu.
Kegiatan di masa Perang Kemerdekaan : – Anggota PPI/Lasykar Banteng, Bolaang Mongondow.

9. N a m a : Muhammad Djazuli Kartawinata
Tgl/tempat lahir : 27 Juli 1912/Garut (Jawa Barat)
Kegiatan di masa Perang Kemerdekaan : – Pucuk Pimpinan PSII Bolaang Mongondow.
– Anggota GAPRIBOM (Gabungan Partai-partai Rakyat Indonesia Bolaang Mongondow).
– Giat di lapangan pendidikan dan politik.

10. N a m a : Ny. S. Kartawinata Abbas
Tgl/tempat lahir : 15 April 1917/Gorontalo
Kegiatan di masa Perang Kemerdekaan : – Anggota Aisyiah
– Aktif di bidang pendidikan.

11. N a m a : Ny. Sofie Komelia Pandean
Tgl/tempat lahir : 28 Agustus 1911, Paniki Bawah.
Kegiatan di masa Perang Kemerdekaan : – Pimpinan KRIS – Magelang
– Dapur umum di Wonosobo
– Ketua Barisan Palang Merah, Magelang.

LAMPIRAN

DAFTAR INFORMAN SULAWESI SELATAN

1. Ibu Siti Hasnah Suwardi,
   Lahir : di Takalar, tanggal 11 Nopember 1927
   Tempat tinggal : di Jl. Singa 35 Ujung Pandang.
   Putera : 3 (tiga) orang.
   Suami : Sumardi, bekerja di pelayaran.

2. Nyonya H. Halimah Dg. Pudji,
   Lahir : di Ujung Pandang, tanggal 14 Juni 1927
   Tempat tinggal : di Jl. Bayam no. 28 Ujung Pandang
   Putera : 6 (enam) orang
   Suami : Encik Moh. Salim, pensiunan dari kantor Biro Statistik.

3. Ibu Mulyati,
   Lahir : di Mandar, tanggal 2 Juli 1927
   Putera : 8 (delapan) orang, perempuan 6 orang dan laki-laki 2 orang.
   Tempat tinggal : Jl. Sungai Limboto no. 74 Ujung Pandang
   Suami : Rustam Kusumadjaja.

4. Nyonya Hayati Rohani.
   Lahir : di Enrekang, tanggal 19 Desember 1932
   Putera : 9 (sembilan) orang, putera 6 orang dan puteri ada 3 orang.

5. Nyonya H. Oemmi Hani A. Salam,

Lahir	:	di Majene, tanggal 1 Agustus 1924
Tempat tinggal	:	di Jl. A. Mengerangi I Lr. 3 No. 22 Ujung Pandang
Putera	:	1 (satu) orang, nama: Muhd. Djafar
Suami	:	Drs. Abdul Salam almarhum.

LAMPIRAN

DAFTAR INFORMAN BALI

1. Nama : I Ketut Gde Dharma Yudha
   Tempat/tgl. lahir : Celuk, 7 Juni 1928
   Alamat : Celuk, Sukawati, Gianyar Bali
   Pekerjaan : Sekretaris Markas Daerah LVRI-Nusa Tenggara
   Kegiatan pada masa perang kemerdekaan : 1. Komandan Markas Besar DPRI Resimen Ngurah Rai daerah Gianyar-Badung, 1945–1949
   2. Kepala Pasukan Gabungan III Ciung Wanara, Badung, Gianyar.

2. Nama : Ny. A.A.G. Putra Wiladja
   Tempat/tgl. lahir : Tabanan, 12 Februari 1932
   Alamat : Jl. Bali 12A Denpasar
   Pekerjaan : Pegawai Negeri/Rumah Sakit Umum Pusat Denpasar.
   Kegiatan pada masa Perang Kemerdekaan : – Ketua Kowaveri, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara
   Pendidikan : 1. SD. 6 tahun di Tabanan
   2. Sekolah Jururawat di RSCM, tahun 1948–1952.

3. Nama : Desak Gede Raka
   Tempat/tgl. lahir : Lumajang (Tabanan), 26 April 1926
   Alamat : Jl. Kenanga 17 Denpasar
   Pekerjaan : Pensiunan Guru PR Saraswati
   Kegiatan pada masa Perang Kemerdekaan : Mengajar, bergerilya
   Pendidikan : 1. Hollands Balise School, sampai klas 5
   2. Partiwi Putra School, sampai klas 6, tamat 1939

3. Taman Dewasa Taman Siswa Yogyakarta, tamat 1939
4. Taman Guru Muda Taman Siswa Yogya, tamat 1944

4. Nama : I Gusti Ayu Rapeg (Ibu Merta)
Tempat/tgl. lahir : Denpasar, 11 Mei 1917
Alamat : Jl. Rambutan 39 Denpasar, Bali
Pekerjaan : Pensiun
Kegiatan pada masa Perang Kemerdekaan :
1. Sekolah Kelas 2, no. 1, Denpasar 1926/1930
2. Sekolah di Blitar Meisjes Normaal School 1931/1934.
3. Mengajar di Meisjes Vervolg School tahun 1935
4. Tahun 1941, merangkap sebagai Pimpinan O.V.O. Denpasar.

: Kegiatan di luar, membantu perjuangan di dalam urusan dapur umum, mengumpulkan kepentingan-kepentingan untuk pejuang. Usaha-usaha di bidang sosial memelihara anak yatim piatu, memelihara orang-orang miskin dan lain-lain.

5. Nama : Yasmin Oka
Tempat/tgl. lahir : –
Alamat : Jl. Durian 17, Denpasar
Pekerjaan : PMI Bali
Kegiatan pada masa Perang Kemerdekaan :
1. Tahun 1938 guru Landschaps Huishord School di Denpasar – Openbare Nijverheids School Yogya 1935

- Mode Vak School di Yogya.
- Tahun 1941, Van Deventer School Bandung untuk memperoleh Huishord Acte sampai kedatangan Jepang.

2. Pendiri Persatuan Wanita Indonesia (sebuah federasi 18 organisasi wanita) tahun 1945–1954
3. PBH pada periode setelah tahun 1945.
4. Bekerja sebagai guru di Sekolah Normaal Perempuan (SGB Putri) tahun 1942–1944 dimana Kepala Sekolahnya adalah Pak Maruta
5. Mengadakan Ondergroundse actie pada tahun 1946.
6. – Guru Tidak tetap tahun 1946-1950
   - Sekolah Lanjutan Umum
   - Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Saraswati
7. Anggota DPR tahun 1960–1967

LAMPIRAN

DAFTAR INFORMAN DAERAH MALUKU

1. Nama : An F. Pupella Latuasan
   Umur : 65 tahun
   Pekerjaan : Pensiunan/ex Pemudi PIM (Pemuda Indonesia Maluku)
   Alamat : Jl. Jenderal A. Yani – Ambon

2. Nama : Aminah Peisamual
   Umur : 68 tahun
   Pekerjaan : Petani/ex wanita Partai Indonesia Maluku (PIM)
   Alamat : Jl. Mesjid Raya S.K. 47/20 – Ambon

3. Nama : Salmah Lestaluhu
   Umur : 62 tahun
   Pekerjaan : Petani
   Alamat : Jl. Slamet Riadi 5 Tulehu – Ambon

4. Nama : Hajah Rahimah
   Umur : 61 tahun
   Pekerjaan : ex wanita Partai Indonesia Maluku
   Alamat : Jl. Air Panas-Tulehu, Ambon

5. Nama : E.U. Pupella
   Umur : 75 tahun
   Pekerjaan : Wiraswasta/ex ketua PIM; Kepala pemerintahan Sipil di jaman Jepang
   Alamat : – Jl. Tebet Timur Dalam V/1-Jakarta
   – Jl. Dr. Apituley no. 28 Ambon

6. Nama : M. Amin Ely
   Umur : 62 tahun
   Pekerjaan : Pensiunan anggota DPRRI/ex. anggota PIM; wartawan Surat kabar Sinar Matahari, Ambon

Alamat : Komp. DPR Slipi, Jakarta Barat

7. Nama : Renny Matulessy Puteray
Umur : 70 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta/ex anggota PRI Maluku-Surabaya
Alamat : Jl. Jatibarang IX no. 11 - Jakarta Timur

8. Nama : Yetty Latuharhary
Umur : 71 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta, janda alm. Dr. Latuharhary
Alamat : Jl. Pal Batu no. 14, Jakarta Selatan

9. Nama : Samsiah Solaeman
Umur : 62 tahun
Pekerjaan : Da'i/Guru Agama, ex anggota resimen Telukabesy-Pattimura
Alamat : Kampung Batu Ceper-Tangerang

10. Nama : Fatimah Elly
Umur : 56 tahun
Pekerjaan : ex. anggota PIM Maluku-Ambon
Alamat : Komp. DPRRI–Slipi, Jakarta Barat

11. Nama : Moh. Padang
Umur : 65 tahun
Pekerjaan : Pensiunan/ex. Gubernur Maluku
Alamat : Jl. Cipinang Baru Raya no. 14, Jakarta Timur.

PERPUSTAKAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN	
Peminjam	Tanggal kembali

Perpust
Jende